

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2025**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BANJARBARU
2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Kinerja Tahun 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan ini. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dilengkapi dengan berbagai data dan perbandingan, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pelaporan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

Akhirnya disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini. Saran dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang sangat diperlukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Banjarbaru, Januari 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Selatan



RUSDI HARTONO, S.Pi., MP.
NIP. 19720426 199703 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2024. **Laporan Kinerja pada IKU RPJMD dan IKU Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.** Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru.

Laporan ini disusun sebagai bahan untuk mendukung penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pencapaian realisasi IKU terhadap target yang ditetapkan tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Realisasi IKU Produksi Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 92,99% (Sangat Memuaskan)
- 2) Realisasi IKU Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) mencapai 96,99% (Sangat Memuaskan)
- 3) Realisasi IKU Angka Konsumsi Ikan mencapai 101,50% (Sangat Memuaskan)
- 4) Realisasi IKU Persentase Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Kelautan dan Perikanan mencapai 133,33% (Sangat Memuaskan)
- 5) Realisasi IKU Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21 mencapai 100% (Sangat Memuaskan)
- 6) Realisasi IKU Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 100,02% (Sangat Memuaskan)
- 7) Realisasi IKU Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan mencapai 100% (Sangat Memuaskan)

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai **KOMITMEN** untuk terus berupaya membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja yang dipahami dan diterapkan diseluruh unit dan aparatur penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh aparatur berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas atas segala beban tugas yang diberikan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Bumi Lambung Mangkurat.

Kata Kunci: Laporan Kinerja Tahun 2024, IKU RPJMD dan IKU Kepala Dinas, Komitmen.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	2
1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	2
a. Tugas	2
b. Fungsi	2
c. Uraian Tugas	3
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	4
a. Pelabuhan Perikanan Banjarmasin	4
b. Pelabuhan Perikanan Batulicin	5
c. Pelabuhan Perikanan Muara Kintap	6
d. Pelabuhan Perikanan Kotabaru	6
e. Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan	7
f. Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru	8
g. Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan	9
C. Struktur Organisasi	10
1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	10
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	11
D. Isu Strategis SKPD	13
E. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 33

A.	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	33
I.	Sasaran RPJMD	33
II.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	65
III.	Bidang Pengelolaan Ruang Laut	90
III.1	Sasaran Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut	90
III.2	Sasaran Kepala Seksi Lingkup Bidang Pengelolaan Ruang Laut	96
III.2.1	Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut	96
III.2.2	Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut	103
III.2.3	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	110
IV.	Bidang Perikanan Tangkap	119
IV.1	Sasaran Kepala Bidang Perikanan Tangkap	119
IV.2	Sasaran Kepala Seksi Lingkup Bidang Perikanan Tangkap	127
IV.2.1	Kepala Seksi Kenelayanan	127
IV.2.2	Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan	133
IV.2.3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	137
V.	Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)	145
V.1	Sasaran Kepala Bidang PSDKP	145
V.2	Sasaran Kepala Seksi Lingkup Bidang PSDKP	152
VI.	Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (BP2HP)	178
VI.1	Sasaran Kepala Bidang BP2HP	178
VI.2	Sasaran Kepala Seksi Lingkup Bidang BP2HP	187
VI.2.1	Kepala Seksi Budidaya Perikanan	187
VI.2.2	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	198
VI.2.3	Kepala Seksi Sarpras BP2HP	210
VII.	Sekretariat	215
VII.1	Sasaran Sekretaris	215
VII.2	Sasaran Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat	220
B.	Akuntabilitas Keuangan	228

1.	Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024	228
2.	Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	231
3.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberd Daya	232
BAB IV	PENUTUP	239
A.	Kesimpulan	239
B.	Strategi Peningkatan Kinerja	239
LAMPIRAN		vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam LAKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2024. LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan,

Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100; yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95); serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi;

- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangan daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil;
- 6) Pengelolaan pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
- 7) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis usaha bidang kelautan dan perikanan;
- 8) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
- 9) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD; dan
- 10) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

c. Uraian Tugas

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi;
- 3) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangan daerah;
- 4) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil;
- 6) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan perikanan;
- 7) Membina, mengawasi, dan mengendalikan Cabang Dinas;
- 8) Membina, mengawasi, dan mengendalikan UPTD;
- 9) Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0124 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 7 (tujuh) UPTD, yaitu : a). Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, b). Pelabuhan Perikanan Batulicin, c). Pelabuhan Perikanan Muara Kintap, d). Pelabuhan Perikanan Kotabaru, e). Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan Karang Intan, f). Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru, dan g). Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan. Berikut dijelaskan tugas dan fungsi pada masing-masing UPTD di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan :

a. Pelabuhan Perikanan Banjarmasin

Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.

Sementara itu, Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis pelayanan kesyahbandaran, dan pengelolaan serta pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas kapal perikanan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan serta bongkar muat ikan;
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengawasan sumberdaya ikan, mutu hasil penangkapan, dan mutu pengolahan hasil perikanan;

- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan tempat pemasaran dan distribusi ikan;
- 8) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, wisata bahari dan atau jasa lainnya terkait hasil perikanan; dan
- 9) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

b. Pelabuhan Perikanan Batulicin

Pelabuhan Perikanan Batulicin mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.

Sementara itu, Pelabuhan Perikanan Batulicin mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis pelayanan kesyahbandaran, dan pengelolaan serta pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas kapal perikanan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan serta bongkar muat ikan;
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengawasan sumberdaya ikan, mutu hasil penangkapan, dan mutu pengolahan hasil perikanan;
- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan tempat pemasaran dan distribusi ikan;
- 8) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, wisata bahari dan atau jasa lainnya terkait hasil perikanan; dan
- 9) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

c. Pelabuhan Perikanan Muara Kintap

Pelabuhan Perikanan Muara Kintap mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.

Sementara itu, Pelabuhan Perikanan Muara Kintap mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis pelayanan kesyahbandaran, dan pengelolaan serta pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas kapal perikanan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan serta bongkar muat ikan;
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengawasan sumberdaya ikan, mutu hasil penangkapan, dan mutu pengolahan hasil perikanan;
- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan tempat pemasaran dan distribusi ikan;
- 8) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, wisata bahari dan atau jasa lainnya terkait hasil perikanan; dan
- 9) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

d. Pelabuhan Perikanan Kotabaru

Pelabuhan Perikanan Kotabaru mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.

Sementara itu, Pelabuhan Perikanan Kotabaru mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis pelayanan kesyahbandaran, dan pengelolaan serta pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas kapal perikanan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan serta bongkar muat ikan;
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengawasan sumberdaya ikan, mutu hasil penangkapan, dan mutu pengolahan hasil perikanan;
- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan tempat pemasaran dan distribusi ikan;
- 8) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, wisata bahari dan atau jasa lainnya terkait hasil perikanan; dan
- 9) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

e. Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan

Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul ikan air payau dan air tawar serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul

- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pendampingan teknis penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerjasama uji terap penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian monitoring dan evaluasi penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemuliaan dan pengembangan ikan lokal
- 8) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sistem informasi dan publikasi
- 9) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

f. Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru

Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengembangan teknologi produksi, penyediaan dan produksi, distribusi benih, bimbingan teknis perikanan budidaya air payau dan laut.

Sementara itu, Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis produksi dan layanan teknis budidaya ikan air payau dan laut;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan teknologi produksi dan budidaya ikan air payau dan laut;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyediaan dan produksi induk unggul dan benih bermutu ikan air payau dan laut;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan air payau dan laut;

- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan kerjasama uji terap produksi dan layanan teknis budidaya ikan air payau dan laut;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perikanan budidaya air payau dan air laut; dan
- 7) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

g. Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan.

Sementara itu, Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis pelayanan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengujian mutu produk perikanan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diversifikasi produk perikanan;
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi penerapan mutu untuk proses rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan monitoring dan pengujian mutu keamanan produk perikanan yang distribusinya lintas kabupaten/kota; dan
- 7) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

C. Struktur Organisasi

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Eselon II : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

b. Eselon III : Sekretariat

Eselon IV :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Eselon III : Bidang Pengelolaan Ruang Laut

Eselon IV :

1) Seksi Konservasi Ekosistem Laut;

2) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut; dan

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

d. Eselon III : Bidang Perikanan Tangkap

Eselon IV :

1) Seksi Kenelayanan;

2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan; dan

3) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.

e. Eselon III : Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Eselon IV :

1) Seksi Budidaya Perikanan;

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan

3) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

f. Eselon III : Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Eselon IV :

1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

2) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum; dan

3) Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Sementara itu terlampir disampaikan struktur organisasi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0152 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

a. UPTD yang membidangi Perikanan Tangkap sebanyak 4 (empat) unit kerja, yaitu:

1) Pelabuhan Perikanan Banjarmasin

a) Eselon III: Kepala PP Banjarmasin

b) Eselon IV :

(1) Sub Bagian Tata Usaha

(2) Seksi Kesyahbandaran

(3) Seksi Tata Operasional

c) Kelompok Jabatan Fungsional

2) Pelabuhan Perikanan Muara Kintap

a) Eselon III: Kepala PP Muara Kintap

b) Eselon IV :

(1) Sub Bagian Tata Usaha

(2) Seksi Kesyahbandaran

(3) Seksi Tata Operasional

c) Kelompok Jabatan Fungsional

3) Pelabuhan Perikanan Batulicin

a) Eselon III: Kepala PP Batulicin

b) Eselon IV :

(1) Sub Bagian Tata Usaha

(2) Seksi Kesyahbandaran

(3) Seksi Tata Operasional

c) Kelompok Jabatan Fungsional

- 4) Pelabuhan Perikanan Kotabaru
 - a) Eselon III: Kepala PP Kotabaru
 - b) Eselon IV :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha
 - (2) Seksi Kesyahbandaran
 - (3) Seksi Tata Operasional
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. UPTD yang membidangi Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kerja, yaitu:
 - 1) Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru
 - a) Eselon III: Kepala PBAPL Kotabaru
 - b) Eselon IV :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha
 - (2) Seksi Produksi
 - (3) Seksi Layanan Teknis
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan
 - a) Eselon III: Kepala PBKL
 - b) Eselon IV :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha
 - (2) Seksi Produksi
 - (3) Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan Prov. Kalsel
 - a) Eselon III: Kepala BPMHP
 - b) Eselon IV :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha
 - (2) Seksi Pengujian Mutu
 - (3) Seksi Penerapan Mutu
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional

D. Isu Strategis SKPD

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi dasar dalam penentuan sasaran strategis, yang dipandang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa mendatang, serta merupakan hal yang akan ditangani dalam jangka waktu pembangunan jangka menengah kedepan yaitu:

- 1) Pemulihan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan terdampak Covid-19 yang diarahkan untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- 2) Percepatan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan, Nilai Ekspor Hasil Perikanan, dan Konsumsi Ikan Masyarakat.
- 3) Pemulihan kualitas lingkungan ekosistem dan perairan wilayah pesisir serta penguatan ketahanan bencana yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, penataan dan pemanfaatan ruang laut, serta pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan yang diarahkan untuk pengembangan kompetensi teknis bagi nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- 5) Pemberdayaan SDM dan kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha perikanan, serta kapasitas kelembagaan dan kemandirian kelompok pelaku usaha perikanan.
- 6) Penguatan tata kelola sumber daya kelautan yang bertanggung jawab yang diarahkan untuk menjaga proporsi tangkapan jenis ikan di laut dan perairan umum daratan yang berada dalam batasan biologis yang aman, serta perluasan kawasan reservaat di perairan umum yang telah direstocking sumber daya ikannya.
- 7) Pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing yang didukung dengan penguatan ketersediaan dan kontinuitas Produksi perikanan, serta pembangunan kawasan sentra industri perikanan terpadu.
- 8) Pengendalian preventif pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan masyarakat yang telah meleak peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan yang aktif, serta cakupan wilayah penyebaran informasi tentang peraturan perundang-undangan bidang perikanan.

- 9) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif yang diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan per-UU yang berlaku, pemantauan terhadap aktifitas illegal fishing di laut dan perairan umum, serta pemberkasan perkara kasus IUU Fishing yang tertangani sd. Tahap P.21.
- 10) Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik yang diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB, Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, serta kinerja anggaran.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan LAKIP Tahun 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.
- Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2024, dan Penetapan Kinerja Tahun 2024
- Bab III Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2024.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini telah mengikuti tata laksana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SOP Penyusunan LAKIP (Lampiran 1). Selain itu dalam proses pembuatan Laporan ini juga telah disusun Penanggung Jawab Pengumpulan Data dan Informasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor.....Tahun 2024 (Lampiran 2).

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana yang diamanahkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah mendukung dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026.

Berikut keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Sasaran RENSTRA-PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026

VISI	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA
MISI - 2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata
Tujuan 1 RPJMD	Meningkatnya Perekonomian Daerah
Indikator Tujuan 1 RPJMD	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Sasaran 1 RPJMD	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata
Indikator Sasaran 1 RPJMD	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Sasaran 1 RENSTRA-PD	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan
Indikator Sasaran 1 RENSTRA-PD	LPE Perikanan
	Produksi Perikanan

Tujuan 2 RPJMD	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan
Indikator Tujuan 2 RPJMD	Persentase Penduduk Miskin
	Indeks Gini
Sasaran 2 RPJMD	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Indikator Sasaran 2 RPJMD	Pengeluaran per Kapita
Sasaran 2 RENSTRA-PD	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
Indikator Sasaran 2 RENSTRA-PD	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)
	Nilai Ekspor Perikanan
MISI - 5	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana
Tujuan 3 RPJMD	Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator Tujuan 3 RPJMD	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran 3 RPJMD	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
Indikator Sasaran 3 RPJMD	Indeks Tutupan Lahan
	Indeks Kualitas Air
	Indeks Kualitas Udara
	Indeks Kualitas Air Laut
Sasaran 3 RENSTRA-PD	Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing
Indikator Sasaran 3 RENSTRA-PD	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21
Sasaran 4 RPJMD	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca
Indikator Sasaran 4 RPJMD	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Sasaran 4 RENSTRA-PD	Meningkatnya Kontribusi Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi
Indikator Sasaran 4 RENSTRA-PD	Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Sumber : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PEMDA (RPJMD Prov. Kal-Sel 2021 – 2026)

Berdasarkan Tabel 2.1, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) **Tujuan 1** : Meningkatnya Perekonomian Daerah
 - Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan
 - Indikator Kinerja :
 - LPE Perikanan
 - Produksi Perikanan
- 2) **Tujuan 2** : Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan
 - Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
 - Indikator Kinerja :
 - Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)
 - Nilai Ekspor Perikanan
- 3) **Tujuan 3** : Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 - Sasaran Strategis 3.a** : Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing
 - Indikator Kinerja : Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21
 - Sasaran Strategis 3.b** : Meningkatnya Kontribusi Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi
 - Indikator Kinerja : Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Berikut disajikan target untuk indikator sasaran pada masing-masing tujuan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2020	Baseline 2021	Target Kinerja				
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Perikanan (%)	4,30	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
			Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi	207.229	247.864,99	264.476,48	211.000	212.500	214.000	215.500
			Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	139.079	131.116,25	157.000	167.419	177.272	187.465	198.450
2	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan/NTNP (angka)	98,99	102,99	101,16	102,03	102,95	103,92	103,97
			Nilai ekspor hasil perikanan (milyar Rupiah)	167,68	168,00	169,00	170,00	171,00	172,00	173,00
			Angka konsumsi Ikan masyarakat	60,24	61,74*	62,06	63	64	65	66
3.	Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2020	Baseline 2021	Target Kinerja				
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi (Ha)	75,80	87,80	90	135,80	155,80	175,80	195,80

Sumber: RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel 2021-2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada Tabel 2.3 disampaikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 ini :

Tabel 2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
		Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
		Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sd 12 Mil
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil

		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sd 12 Mil
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
		Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing
		Pelaksanaan Bimbingan Fasilitas Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021 – 2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja di setiap tahunnya.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Eselon II)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan	397.272 Ton	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,95	
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	64,70 Kg/Kapita	
4	Menurunnya Kerusakan Lingkungan	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Kelautan dan Perikanan	0,27%	
5	Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21	100%	
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Poin	
		Jumlah Inovasi Pelayan Publik Yang Diterapkan	1	

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang (Eselon III)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perikanan Tangkap				
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dari Seluruh Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	220.000 Ton	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
2	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	99,00	
Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	177.272 Ton	Kepala Bidang BP2HP
2	Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	100,20	
3	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan (UPI) Yang Memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)	14 UPI	
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut				
1	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	155,80 Ha	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	100%	Kepala Bidang PSDKP
Sekretaris				
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Berbasis SMART Goals	100%	Sekretaris
		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Telah Diversifikasi/Direkonsiliasi Oleh Instansi Terkait	100%	
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Dapat Dimanfaatkan/ Dioperasionalkan/Digunakan Sesuai Dengan Fungsi/Peruntukkan/ Masterplan Yang Telah Ditetapkan	100%	
		Persentase ASN Yang Dapat Menerapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Umum Kantor Yang Telah Diberikan	100%	
		Persentase Pengadaan Barang Yang Telah Termanfaatkan Untuk Menunjang Layanan Kantor	100%	
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Jasa Kantor Yang Telah Diberikan	100%	
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dapat Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya	100%	

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Eselon IV)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Bidang Perikanan Tangkap				
Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan				
1	Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	1 Dokumen	Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan
2	Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	
Kepala Seksi Kenelayanan				
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Kepala Seksi Kenelayanan
2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan	240 Rekomendasi	
3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	4 Dokumen	
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan				
1	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	14 Unit	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	3 Unit	
Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
Kepala Seksi Budidaya Perikanan				
1	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	2 Dokumen	Kepala Seksi Budidaya Perikanan
2	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
3	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat	3 Dokumen	
4	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konsrvasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	215 Orang	
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
1	Terlaksananya Bimbingan dan penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2	Terlaksananya Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Bagi Unit Usaha Dalam rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Bedaya Saing	Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	25 Unit Usaha	
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Pengolahan dan Pemasaran				
1	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Pengolahan dan Pemasaran
2	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudiyaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Bidang Pengelolaan Ruang Laut				
Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut				
1	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan Dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola	179.659,89 Ha	Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut
2	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi	32,15 Ha	
Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut				
1	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Rekomendasi	Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut
2	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Yang Diterbitkan	8 Rekomendasi	
3	Tercatatnya Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
1	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	105 Orang	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	
3	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				
Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan SDKP				
1	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Laut sd 12 Mil	Jumlah Laporan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Laut sd 12 Mil	5 Dokumen	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan SDKP
2	Terlaksananya Temu Koordinasi PSDKP Kal-Sel	Jumlah Laporan Hasil Temu Koordinasi PSDKP Kal-Sel	1 Dokumen	
3	Terlaksananya Temu POKMASWAS	Jumlah Laporan Hasil Temu Pokmaswas	1 Dokumen	
4	Terlaksananya Pembinaan POKMASWAS	Jumlah Lokasi Pembinaan POKMASWAS Yang Dibina	5 Lokasi	
5	Terlaksananya Patroli/Razia Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan SDKP di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Lokasi Patroli/Razia Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan SDKP di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	6 Lokasi	
6	Terlaksananya Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan	Jumlah Lokasi Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan Yang Terawasi	3 Lokasi	
7	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Lokasi Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Terawasi	3 Lokasi	
8	Terlaksananya Konsolidasi Pokmaswas	Jumlah Lokasi Konsolidasi Pokmaswas	3 Lokasi	
9	Terlaksananya Penilaian Pokmaswas	Jumlah Lokasi Penilaian Pokmaswas	7 Lokasi	
10	Terlaksananya Koordinasi/ Konsultasi/ Bimtek/Rapat/ Pertemuan	Jumlah Lokasi Koordinasi/Konsultasi/Bimtek/Rapat/Pertemuan	9 Lokasi	
Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum				
1	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan Laut sd 12 Mil	100%	Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Perairan Laut sd 12 Mil	100%	
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Laut sd 12 Mil	100%	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
		Jumah Peserta Sosialisasi Yang Paham Tentang Peraturan Per-UU di Bidang Perikanan (di Perairan Laut)	100 Orang	
		Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran di Laut Yang Difasilitasi Proses Pemberkasan Perkaranya sd P.21	1 Kasus	
2	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran di Perairan Umum Daratan Yang Difasilitasi Proses Pemberkasan Perkaranya sd P.21	1 Kasus	
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Umum Daratan	100%	
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Perairan Umum Daratan	100%	
		Jumah Peserta Sosialisasi Yang Paham Tentang Peraturan Per-UU di Bidang Perikanan (di Perairan Umum Daratan)	50 Orang	
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	100%	
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan				
1	Terlaksananya Serah Terima Pemasangan Papan Seruan Untuk POKMASWAS	Jumlah Papan Seruan Untuk POKMASWAS Yang Terpasang di Perairan Laut dan di PUD	13 Buah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan
2	Terlaksananya Serah Terima Hibah Bantuan Perahu Motor Tahun 2024	Jumlah Perahu Motor Yang Telah Diserahkan Kepada POKMASWAS di Perairan Laut dan di PUD	6 Unit	
3	Terlaksananya Serah Terima Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pengawasan Untuk POKMASWAS	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pengawasan Yang Telah Diserahkan Untuk POKMASWAS di Perairan Laut dan di PUD	4 Kelompok	
Sekretariat				
Kepala Sub Perencanaan dan Pelaporan				
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset				
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/Bulan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
7	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian				
1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	
3	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	520 Orang	
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	489 Orang	
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	
7	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1 Dokumen	
9	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	7 Unit	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
10	Tersedianya Mebel Untuk Menunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	6 Paket	
11	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	129 Unit	
12	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
13	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	
14	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarnya Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	
16	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	218 Unit	

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut Tabel 3.1. Kategorisasi Pencapaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

Sumber: Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015

I. Sasaran RPJMD

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 ditetapkan berdasarkan PERDA Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026.

Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang diamanatkan untuk dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan indikator kinerja:

1. LPE Perikanan;
2. Produksi Perikanan;
3. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)
4. Nilai Ekspor Perikanan
5. Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21
6. Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Berikut penjelasan dan penggunaan persamaan terkait dengan 6 (enam) indikator tujuan/sasaran Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan :

1. LPE Perikanan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Perikanan adalah peningkatan PDB perikanan pada tahun n terhadap capaian PDB perikanan pada tahun n-1, dengan satuan hitung %. Angka PDB berasal dari data yang dirilis oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk menghitung pertumbuhan PDB Perikanan dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = \left[\frac{B - C}{C} \right] \times 100\%$$

Dimana :

A = Pertumbuhan PDB Perikanan pada tahun n

B = PDB Perikanan pada tahun n

C = PDB Perikanan pada tahun sebelumnya (n-1)

Keterangan : PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

2. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah total volume hasil perikanan yang diperoleh dari penjumlahan antara volume produksi perikanan tangkap dan volume produksi perikanan budidaya pada tahun n, dengan satuan hitung ton. Data produksi ikan tersebut diperoleh dari Aplikasi Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk menghitung produksi ikan dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = B + C$$

Dimana :

A = Produksi Perikanan pada tahun n

B = Volume Produksi Perikanan Tangkap pada tahun n

C = Volume Produksi Perikanan Budidaya pada tahun n

3. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan/NTNP

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) merupakan proxy untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan dan pembudidaya ikan (Ib) dikalikan dengan 100. Angka NTNP berasal dari data yang dirilis oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk menghitung Nilai Tukar ikan dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana :

A = Nilai Tukar

B = Indeks Harga Yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It)

C = Indeks Harga Yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)

Keterangan: PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Keterangan:

Nilai tukar > 100: pendapatan surplus, dimana It > Ib.

Nilai tukar = 100: pendapatan impas, dimana It = Ib.

Nilai tukar < 100: pendapatan defisit, dimana It < Ib.

4. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai Ekspor Hasil Perikanan adalah nilai seluruh produk/komoditas hasil perikanan yang diperdagangkan ke luar negeri yang ditentukan oleh permintaan luar negeri pada tahun n, yang dikonversikan dalam satuan hitung milyar rupiah. Dalam hal ini, nilai ekspor diperoleh dari kompilasi nilai ekspor FOB (Free on Board) produk perikanan yang keluar dari daerah Pabean Kalsel selama kurun waktu 1 tahun yang dipasarkan langsung ke luar negeri. Nilai ekspor produk perikanan diperoleh melalui serifikasi karantina yang diterbitkan oleh BKIPM Banjarmasin.

5. Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21

Dalam penanganan kasus IUU Fishing, batas kewenangan PPNS Perikanan sampai dengan P.21, yang artinya pemberkasannya sudah pada tahap pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap.

Untuk menghitung Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing yang Tertangani sd. P.21 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana:

A = Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21

B = Jumlah Kasus IUU Fishing Yang Tertangani sd P.21

C = Jumlah Kasus IUU Fishing Pada Tahun n

Sumber data : PPNS Perikanan

6. Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi merupakan perbandingan antara luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi sampai dengan tahun n (luas akumulatif) terhadap total luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang terdapat di Kalimantan Selatan.

Untuk menghitung persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana:

A = Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

B = Jumlah Luas Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun n

C = Jumlah Total Luas Ekosistem Pesisir Kritis

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD

Berikut disajikan capaian ke 6 (enam) indikator kinerja sasaran RPJMD pada tahun 2024 :

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2024 Pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	RPJMD		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan	LPE Perikanan	6,50	2,97%	45,69%
		Produksi Perikanan	397.272 Ton	369.460 **) Ton	92,99%
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,95	99,86	96,99%
		Nilai Ekspor Perikanan	171,00 Milyar Rupiah	231.044.949.297 Milyar Rupiah	135,11%
3	Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kontribusi Ekosistem Pesisir Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	1,26%	1,77%	140,47%
Rata-rata Capaian					101,87%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Keterangan : **) = angka sementara

(1). LPE Perikanan

Dari sisi sektoral, kelautan dan perikanan dimasukkan dalam sub kategori perikanan. Sub kategori perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan. Beberapa data lainnya bersumber dari BPS, misalnya: data harga berupa harga produsen, data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah subkategori perikanan adalah melalui pendekatan produksi perikanan. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi perikanan dan harga untuk masing-masing komoditi perikanan.

Nilai Tambah Bruto (NTB) subkategori perikanan diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha perikanan yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga produsen dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga konstan tahun 2010 untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

Pertumbuhan Ekonomi (PE) Perikanan dikatakan mengalami pertumbuhan apabila hasil produksi ikan pada tahun tertentu (T_n) lebih besar dari pada tahun sebelumnya (T_{n-1}). Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat PE Perikanan adalah tingkat pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, maka digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (tahun 2010). Artinya pertumbuhan ekonomi perikanan tidak terpengaruh oleh perubahan harga atau inflasi. Pendapatan regional atas dasar harga konstan dapat pula digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sub kategori perikanan, dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi sub kategori lainnya. Dengan membandingkan pertumbuhan masing-masing sub kategori menurut lapangan usaha, maka akan dapat pula mengukur kemajuan yang telah dicapai setiap lapangan usaha tersebut, sehingga prioritas pembangunan masing-masing daerah dapat diketahui. Berikut cara menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Perikanan adalah sebagai berikut :

$$A = \left[\frac{B - C}{C} \right] \times 100\%$$

Dimana :

A = Pertumbuhan PDB Perikanan pada tahun n

B = PDB Perikanan pada tahun n

C = PDB Perikanan pada tahun sebelumnya (n-1)

Keterangan : PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) diperoleh dari BPS Kalimantan Selatan

Berdasarkan data tahun 2024 dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, maka perhitungan pertumbuhan LPE Perikanan tahun 2024 Atas Dasar Harga Konstan 2010 adalah sebagai berikut:

Jika diketahui:

—	PDB Perikanan (2024)	=	5.156,07 Milyar
—	PDB Perikanan (2023)	=	5.007,18 Milyar

Maka Pertumbuhan LPE Perikanan tahun 2024 yaitu:

$$A = \left[\frac{\text{PDB 2024} - \text{PDB 2023}}{\text{PDB 2023}} \right] \times 100\%$$

$$A = \frac{5.156,07 \text{ Milyar} - 5.007,18 \text{ Milyar}}{5.007,18 \text{ Milyar}} \times 100\%$$

$$A = \mathbf{2,97\%}$$

Dari hasil perhitungan, maka Pertumbuhan Ekonomi Perikanan (Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut Lapangan Usaha) pada tahun 2024 adalah sebesar 4,16%.

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja indicator kinerja LPE Perikanan tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian LPE Perikanan} = \frac{\text{Realisasi LPE Perikanan Tahun 2024}}{\text{Target LPE Perikanan Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian LPE Perikanan} = \frac{2,97\%}{6,5\%} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian LPE Perikanan} = 45,69\%$$

Dengan demikian realisasi capaian kinerja LPE Perikanan tahun 2024 terhadap target LPE Perikanan tahun 2024 hanya tercapai sebesar 45,69%.

(2). Produksi Perikanan

Produksi Ikan adalah volume hasil produksi ikan yang diperoleh dari penjumlahan volume produksi perikanan tangkap dan volume produksi perikanan pembudidaya pada tahun berjalan (tahun n), dengan satuan hitung ton. Data produksi ikan tersebut diperoleh dari Aplikasi Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan KKP RI. Adapun rumus perhitungan volume produksi ikan adalah sebagai berikut:

$$A = B + C$$

Dimana :

A = Produksi Perikanan pada tahun n

B = Volume Produksi Perikanan Tangkap pada tahun n

C = Volume Produksi Perikanan Budidaya pada tahun n

Berdasarkan data sementara untuk realisasi jumlah total produksi perikanan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} A &= B + C \\ &= 218.022 \text{ Ton (produksi tangkap)} + 151.438 \text{ Ton (produksi budidaya)} \\ &= \mathbf{369.460^{**} \text{ Ton}} \end{aligned}$$

Keragaan produksi perikanan di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 :

Target = 397.272 Ton

Realisasi = 369.460 **) Ton

**) = angka sangat sementara karena belum diselenggarakannya kegiatan validasi nasional oleh KKP untuk statistik produksi perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya)

Tabel 3.3. Data Produksi Perikanan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Total **)
1	Balangan	1.795	738	2.533
2	Banjar (Martapura)	54.274	9.225	63.499
3	Barito Kuala	11.940	8.646	20.586
4	Hulu Sungai Selatan	7.314	12.561	19.875
5	Hulu Sungai Tengah	3.014	8.370	11.384
6	Hulu Sungai Utara	9.899	12.568	22.467
7	Banjarbaru	464	352	816
8	Banjarmasin	2.758	1.624	4.382
9	Kotabaru	32.456	75.125	107.581
10	Tabalong	18.076	2.056	20.132
11	Tanah Bumbu	6.472	47.398	53.870
12	Tanah Laut	2.587	35.756	38.343
13	Tapin	387	3.602	3.989
	Total	151.438	218.022	369.460

Sumber Data : Bidang BP2HP dan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

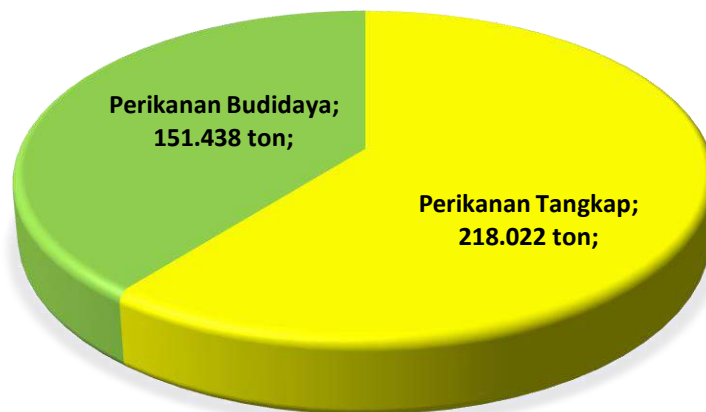
Keterangan **) : angka sementara

Data produksi ikan yang diperoleh tersebut merupakan data yang telah di input oleh petugas enumerator pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang tersebar di 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan melalui aplikasi Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan. Data yang telah ter-input selanjutnya oleh petugas validator kabupaten/kota dan provinsi dilakukan validasi akuntabilitas datanya pada tingkat provinsi, dan akhirnya di validasi kembali di tingkat pusat oleh petugas validator Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Validasi satu data statistik kelautan dan perikanan di tingkat pusat untuk tahun n, baru akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun n+1. Sementara itu , rilis resmi angka tetap untuk satu data statistik kelautan dan perikanan secara nasional baru akan dirilis pada bulan Maret tahun n+2. Oleh karena itu data volume produksi ikan yang disampaikan dalam LAKIP

2024 ini masih bersifat sementara, dan akan dikoreksi kembali setelah validasi tingkat pusat dilaksanakan, dan rilis resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi sementara volume produksi perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 tercatat sebesar 369.460**) ton, atau lebih sedikit 27.812 ton jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu 397.272 ton



Sumber: Data Terolah dari Aplikasi Satu Data Statistik-KKP (2024)

Gambar 3.1. Kontribusi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Terhadap Volume Produksi Ikan Tahun 2024

Dari Gambar 3.1 tersebut mengindikasikan bahwa produksi perikanan masih sebagian besar dihasilkan dari kegiatan perikanan tangkap, baik yang berasal dari perairan laut maupun perairan umum daratan. Usaha perikanan tangkap yang produksinya sangat tergantung pada musim dan kondisi cuaca serta potensi pemanfaatan sumber daya ikannya. Oleh karena itu kedepan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berupaya meningkatkan peran perikanan budidaya dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

Untuk pengembangan usaha perikanan budidaya, kedepan akan diarahkan pada pengembangan komoditas perikanan berbasis ikan lokal untuk pengendalian inflasi serta mendukung ekspor perikanan Kalimantan Selatan.

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja indikator kinerja produksi ikan tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{\% Capaian Produksi Ikan} &= \frac{\text{Realisasi Volume Produksi Perikanan Pada Tahun 2024}}{\text{Target Volume Produksi Perikanan Pada Tahun 2024}} \times 100\% \\ \text{\% Capaian Produksi Ikan} &= \frac{369.460}{397.272} \times 100\% \\ \text{\% Capaian Produksi Ikan} &= 92,99 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka persentase realisasi capaian kinerja produksi ikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebesar 92,99% (Sangat Memuaskan).

(3). Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) berasal dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) dikalikan dengan 100. Nilai It dan Ib tersebut pada posisi per Desember tahun berjalan. Nilai Tukar Perikanan digunakan sebagai alat pengukur tingkat kemampuan/daya beli nelayan baik nelayan tangkap maupun nelayan pembudidaya.

Nilai Tukar Perikanan digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur kesejahteraan pelaku usaha yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh pelaku usaha.

Adapun cara menghitung Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) adalah sebagai berikut :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana :

A = Nilai Tukar

B = Indeks Harga Yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It)

C = Indeks Harga Yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)

Keterangan:

Nilai tukar > 100: pendapatan surplus, dimana $It > Ib$.

Nilai tukar = 100: pendapatan impas, dimana $It = Ib$.

Nilai tukar < 100: pendapatan defisit, dimana $It < Ib$.

Berdasarkan rilis data BPS Kalimantan Selatan, maka NTNP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jika diketahui:

$$- It_{(2024)} = 122,22$$

$$- Ib_{(2024)} = 122,39$$

Maka NTNP tahun 2024 yaitu:

$$NTNP_{2024} = \frac{122,22}{122,39} \times 100\%$$

$$NTNP_{2024} = \mathbf{99,86}$$

Sementara itu apabila realisasi sementara capaian kinerja NTNP tahun 2024 adalah 99,86 dibandingkan dengan NTNP tahun 2023 yang tercatat sebesar 99,22 maka capaian NTNP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 mengalami peningkatan. Untuk menghitung persentase peningkatan capaian kinerja dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{\text{Nilai 2024} - \text{Nilai 2023}}{\text{Nilai 2023}} \times 100\%$$

Jika diketahui:

$$- \text{Realisasi NTNP}_{(2024)} = 99,86$$

$$- \text{Realisasi NTNP}_{(2023)} = 99,22$$

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{\text{Nilai 2024} - \text{Nilai 2023}}{\text{Nilai 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{99,86 - 99,22}{99,22} \times 100\%$$

$$\% \text{ Peningkatan} = 0,64\%$$

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja indikator kinerja NTNP tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian NTNP} = \frac{\text{Realisasi NTNP Pada Tahun 2024}}{\text{Target NTNP Pada Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian NTNP} = \frac{99,86}{102,95} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian NTNP} = 96,99 \%$$

Dengan menggunakan persamaan tersebut di atas, maka persen capaian NTNP tahun 2024 adalah sebesar 96,99% (Sangat Memuaskan).

(4). Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Perdagangan luar negeri merupakan sektor ekonomi yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Selatan pada khususnya. Dari kegiatan ekspor seperti yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan dapat diperoleh devisa yang merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan.

Ekspor hasil perikanan dapat diartikan sebagai pengiriman komoditas hasil perikanan yang diperdagangkan keluar negeri melalui pelabuhan (laut dan udara) diseluruh wilayah Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial.

Sementara itu pengertian nilai ekspor hasil perikanan adalah nilai transaksi komoditas hasil perikanan yang di ekspor sampai di atas kapal pelabuhan (laut dan udara) yang dimuat dalam keadaan *free on board* (f.o.b).

Adapun lembaga legalisasi komoditas ekspor hasil perikanan di Kalimantan Selatan di bawah otoritas Balai Karantina Indonesia Kalimantan Selatan.

Data nilai ekspor hasil perikanan dihitung dengan menggabungkan nilai ekspor hasil perikanan Semester I dan Semester II pada tahun n, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TNEP_{Tn} = NES_{1Tn} + NES_{2Tn}$$

Dimana:

$$\begin{aligned} TNEP_{Tn} &= \text{Total Nilai Ekspor Hasil Perikanan Pada Tahun } n \\ NES_{1Tn} &= \text{Nilai Ekspor Hasil Perikanan sd. Semester 1 Tahun } n \\ NES_{2Tn} &= \text{Nilai Ekspor Hasil Perikanan sd. Semester 2 Tahun } n \end{aligned}$$

Jika diketahui:

- Nilai Ekspor Hasil Perikanan sd. Semester 1 Tahun n = 152.620.574.697 Milyar
- Nilai Ekspor Hasil Perikanan sd. Semester 2 Tahun n = 78.424.374.600 Milyar

$$\begin{aligned} TNEP_{Tn} &= NES_{1Tn} + NES_{2Tn} \\ TNEP_{2024} &= 152.620.574.697 + 78.424.374.600 \\ TNEP_{2024} &= \mathbf{231.044.949.297 \text{ Milyar}} \end{aligned}$$

Target nilai ekspor hasil perikanan pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 171 Milyar. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor hasil perikanan tahun 2024 sebesar 231.044.949.297 Milyar, maka realisasi tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 74.196.200.097 Milyar, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% A &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \% A &= \frac{231.044.949.297 \text{ Milyar}}{171 \text{ M}} \times 100\% \\ \% A &= 135,11\% \end{aligned}$$

(5). Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21

Persentase kasus *illegal fishing/destructive fishing* yang tertangani sampai dengan P.21 adalah persentase jumlah kasus *illegal fishing/destructive fishing* selama tahun n yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan proses pemberkasan perkaranya dapat tuntas diselesaikan sampai dengan tahap P.21.

Tahap P.21 merupakan batas kewenangan PPNS Perikanan untuk menangani proses penyidikan kasus perkara IUU Fishing. Pada P.21 ini menunjukkan kinerja PPNS Perikanan telah sampai pada tahap pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses pada tahap selanjutnya.

Persentase kasus *illegal fishing/destructive fishing* yang tertangani sampai dengan P.21 pada tahun n dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PKP_{P.21} = \frac{KPT_{P.21}}{KPP_n} \times 100\%$$

Dimana :

$PKP_{P.21}$ = Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21

$KPT_{P.21}$ = Jumlah Kasus Perkara Yang Tuntas sd P.21

KPP_n = Jumlah Kasus Yang Sedang Diproses Perkaranya pada tahun n

Jika diketahui:

- Jumlah Kasus Perkara Yang Tuntas sd. P.21 = 12 kasus
- Jumlah Kasus Yang Sedang Diproses Perkaranya = 12 kasus

$$PKP_{P.21} = \frac{KPT_{P.21}}{KPP_n} \times 100\%$$

$$PKP_{P.21} = \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$PKP_{P.21} = \mathbf{100\%}$$

Target persentase kasus IUU Fishing/Destructive Fishing yang tertangani sd. P.21 pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga mencapai 100%, maka realisasi tersebut memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% PKP_{P.21} = \frac{\text{Realisasi 2024}}{\text{Target 2024}} \times 100\%$$

$$\% PKP_{P.21} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% PKP_{P.21} = \mathbf{100\%}$$

(6). Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Kerusakan ekosistem pesisir sudah terjadi hampir diseluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Hal ini karena kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan pesisir yang bertanggung jawab masih rendah. Terumbu karang dan mangrove merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang sangat berperan penting dalam kelestarian sumberdaya hayati di laut, jika terjadi kerusakan pada terumbu karang dan mangrove maka akan berpengaruh pada menurunnya keanekaragaman hayati. Sehingga perlu adanya langkah-langkah dalam menanggulangi masalah kerusakan ekosistem laut tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi kawasan yang rusak.

Persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi merupakan perbandingan antara luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi sampai dengan tahun n (luas akumulatif) terhadap total luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang terdapat di Kalimantan Selatan.

Adapun cara menghitung persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana:

A = Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

B = Jumlah Luas Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun n

C = Jumlah Total Luas Ekosistem Pesisir Kritis

Jika diketahui:

- Jumlah Luas Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi = 218,55 Ha
sd Tahun 2024

- Jumlah Total Luas Ekosistem Pesisir Kritis (*baseline data*) = 12.353,10 Ha

Maka perhitungan untuk mengetahui persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi pada tahun 2024 adalah :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

$$A = \frac{218,55}{12.353,10} \times 100$$

$$A = 1,77 \%$$

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja indikator kinerja persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{\% Capaian Ekosistem} \\ \text{Yang Direhabilitasi} \end{array} = \frac{\begin{array}{c} \text{Realisasi} \\ \text{Pada Tahun 2024} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Target} \\ \text{Pada Tahun 2024} \end{array}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{\% Capaian Ekosistem} \\ \text{Yang Direhabilitasi} \end{array} = \frac{1,77\%}{1,26\%} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{\% Capaian Ekosistem} \\ \text{Yang Direhabilitasi} \end{array} = 140,48 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka persentase realisasi capaian kinerja persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2024 adalah sebesar 140,48% (Sangat Memuaskan).

2). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

a) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi		Capaian % dari Target 2024
			2023	2024	
1	LPE Perikanan	6,50%	2,88%	2,97%	45,69%
2	Produksi Perikanan	397.272	367.214,25 Ton	369.460 **) Ton	92,99%
3	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,95	99,22	99,86	96,99%
4	Nilai Ekspor Perikanan	171,00 Milyar Rupiah	152 Milyar Rupiah	231.044.949.297 Milyar Rupiah	135,11%
5	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	1,26%	1,41%	1,77%	140,47
Rata-rata Capaian					101,87%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

b). Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.5 ditampilkan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 ini dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	LPE Perikanan	1,23%	2,34%	2,77%	2,88%	6,50%	2,97%	45,69%
2	Produksi Perikanan	332.850,00	344.522,82	337.609,18	367.214,25	397.272 Ton	369.460 **) Ton	92,99%
3	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	98,99	102,99	98,27	99,22	102,95	99,83	96,96%
4	Nilai Ekspor Perikanan	167,68 Milyar Rupiah	200,53 Milyar Rupiah	171,67 Milyar Rupiah	152,00 Milyar Rupiah	171,00 Milyar Rupiah	231.044.949.297 Milyar Rupiah	135,11%
5	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	0,77%	0,83%	1,02%	1,41%	1,26%	1,77%	140,47%
Rata-rata Capaian								101,87%
Kategori Capaian								Sangat Memuaskan

c). Perbandingan Capaian Indikator Kinerja RPJMD dengan Regional Kalimantan Selatan dan Nasional

Pada Tabel 3.6 disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan capaian indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap capaian indikator kinerja regional Kalimantan dan nasional pada tahun 2024 ini :

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Regional Kalimantan dan Nasional 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024					Nasional (**)
		Kal-Bar	Kal-Sel	Kal-Teng	Kal-Tim	Kal-Tara	
1	LPE Perikanan	4,90	4,16	4,46	6,17	4,57	N/A
2	Produksi Perikanan	282.147	369.460 **) Ton	299.622	419.545	1.013.775	N/A
3	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	N/A	99,86	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Nilai Ekspor Perikanan	N/A	231.044.949.297 Milyar Rupiah	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	N/A	1,77%	N/A	N/A	N/A	N/A

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

(1). LPE Perikanan

Pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha seperti pada lapangan usaha kelautan dan perikanan biasanya selalu dikaitkan dengan iklim bisnis yang subur. Hal ini juga tidak luput dari peran investasi dalam pemulihan ekonomi pada sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Selatan. Pada dasarnya investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan perekonomian khususnya di sektor lapangan usaha kelautan dan perikanan Kalimantan Selatan. Apabila ingin memprediksi atau menganalisis kondisi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Selatan, maka hal yang perlu diketahui adalah angka pertumbuhan ekonomi terkini, peran investasi, serta upaya yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya pada lapangan usaha kelautan dan perikanan.

Realisasi laju pertumbuhan ekonomi perikanan pada tahun 2024 sebesar 2,97%. Berikut perkembangan data Pertumbuhan PDB Perikanan selama kurun waktu 2023-2024:

Tabel 3.7. Perkembangan Data Pertumbuhan PDB Perikanan Kalimantan Selatan Selama Kurun Waktu 2023-2024

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1.	PDB Perikanan (Milyar Rupiah)	5.007,18 Milyar	5.156,07 Milyar
2.	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	2,88%	2,97%

Sumber : BPS Kalimantan Selatan (2023-2024)

Penentu peningkatan dan penurunan Pertumbuhan PDB Perikanan Kalimantan Selatan diantaranya adalah investasi pada sektor kelautan dan perikanan. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur suatu wilayah. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor. Selain itu, investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Kondisi ini pada akhirnya akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

(2). Produksi Perikanan

Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di 13 kabupaten/kota dengan membandingkan capaian tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Perbandingan Produksi Perikanan di 13 Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Produksi Tahun 2023 (ton)			Produksi Tahun 2024 (ton)		
		Budidaya	Tangkap	Total Produksi	Budidaya	Tangkap	Total Produksi
1.	Balangan	1.190,15	833,80	2.023,95	1.795	738	2.533
2.	Banjär	49.906,51	8.718,01	58.624,52	54.274	9.225	63.499
3.	Barito Kuala	12.685,61	10.023,57	22.709,18	11.940	8.646	20.586
4.	Hulu Sungai Selatan	6.589,98	8.849,95	15.439,93	7.314	12.561	19.875
5.	Hulu Sungai Tengah	2.888,03	8.206,98	11.095,01	3.014	8.370	11.384
6.	Hulu Sungai Utara	30.089,81	13.487,30	43.577,11	9.899	12.568	22.467
7.	Banjarbaru	449,96	343,01	792,97	464	352	816
8.	Banjarmasin	2.598,00	2.106,75	4.704,75	2.758	1.624	4.382
9.	Kotabaru	25.718,46	73.145,70	98.864,16	32.456	75.125	107.581
10.	Tabalong	16.160,52	1.958,18	18.118,70	18.076	2.056	20.132
11.	Tanah Bumbu	6.991,55	46.284,02	53.275,57	6.472	47.398	53.870
12.	Tanah Laut	1.422,98	32.516,60	33.939,58	2.587	35.756	38.343
13.	Tapin	425,22	3.623,60	4.048,82	387	3.602	3.989
	Jumlah	157.116,78	210.097,47	367.214,25	151.438	218.022	369.460

Sumber: Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan-KKP (2023, 2024)

Berdasarkan Tabel 3.7 terlihat bahwa capaian produksi perikanan Kalimantan Selatan tahun 2024 tercatat sebesar 369.460 ton. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 yang tercatat sebesar 367.214,25 maka produksi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2.245,75 Ton.

Apabila ditinjau dari aspek kegiatan usaha perikanan, produksi perikanan budidaya tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5.678,78 Ton dibanding capaian produksi perikanan budidaya tahun 2023. Sementara itu produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 7.924,53 Ton dibanding realiasi produksi perikanan tangkap tahun 2023.

(3). Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)

Target NTNP yang ditetapkan tahun 2024 adalah sebesar 102,95. Sementara itu realisasi capaian tahun 2024 tercatat sebesar 99,83. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja NTNP tahun 2024 hanya mencapai 96,96%.

Pada Desember 2024, NTNP naik sebesar 1,20 persen. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 1,41 persen, sementara Ib hanya naik sebesar 0,21 persen. Kenaikan It didorong oleh naiknya harga berbagai kelompok perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sementara kenaikan Ib disebabkan oleh naiknya indeks KRT sebesar 0,42 persen.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada Desember 2024, NTN naik sebesar 1,02 persen. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 1,25 persen sementara Ib hanya naik sebesar 0,23 persen. Kenaikan It ini sejalan dengan kenaikan It pada subkelompok penyusunnya, yaitu subkelompok penangkapan di perairan umum yang naik sebesar 0,61 persen (khususnya komoditas ikan gabus, papuyu, baung, dan udang) dan subkelompok penangkapan di laut yang naik sebesar 1,41 persen (khususnya komoditas ikan teri, tenggiri, gulamah, tembang, sembilang, dan beberapa komoditas ikan lainnya) terutama karena cuaca ekstrem dan ombak yang tinggi. Adapun kenaikan pada nilai Ib disebabkan oleh naiknya indeks KRT sebesar 0,43 persen. Sementara indeks BPPBM tidak mengalami perubahan.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Pada Desember 2024, NTPi naik sebesar 1,84 persen karena kenaikan It lebih besar daripada Ib. It naik sebesar 1,98 persen sementara Ib hanya naik sebesar 0,14 persen. Kenaikan It sejalan dengan kenaikan It pada subkelompok penyusunnya, yaitu subkelompok budidaya air tawar (khususnya komoditas ikan nila, patin, mas, dan bawal) yang naik sebesar 2,23 persen dan subkelompok budidaya air payau (khususnya komoditas

udang dan ikan bandeng) yang naik sebesar 0,41 persen. Kenaikan Ib disebabkan oleh naiknya nilai indeks KRT sebesar 0,39 persen dan indeks BPPBM sebesar 0,02 persen.

Berikut perkembangan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP), Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) selama tahun 2024:

Tabel 3.9. Perkembangan NTNP, NTN dan NTPi Selama Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024												
Nilai Tukar Perikanan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	NTNP
It	120.41	121.83	122.40	123.31	122.69	122.02	120.94	119.53	120.19	119.99	120.52	122.22	122.22
Ib	120.19	120.23	121.20	121.95	121.83	122.34	121.64	121.57	121.57	121.41	122.13	122.39	122.39
Nilai Tukar Perikanan	100.18	101.33	100.99	101.12	100.71	99.74	99.42	98.32	98.86	98.83	98.68	99.86	99,86
Nilai Tukar Nelayan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	NTN
It	120.46	121.58	121.99	122.37	121.46	120.99	119.97	118.35	119.20	119.10	119.69	121.17	121.17
Ib	120.49	120.50	121.48	122.29	122.24	122.46	121.70	121.63	121.59	121.38	122.16	122.44	122.44
Nilai Tukar Nelayan	99.98	100.90	100.42	100.07	99.36	98.80	98.58	97.30	98.03	98.12	97.98	98.96	98,96
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	NTPi
It	120.20	122.78	123.95	126.89	127.37	125.94	124.65	124.02	123.97	123.39	123.76	126.21	126.21
Ib	119.08	119.21	120.11	120.67	120.27	121.89	121.39	121.36	121.48	121.51	122.00	122.18	122.18
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	100.94	102.99	103.20	105.15	105.90	103.32	102.69	102.19	102.05	101.55	101.44	103.30	103,30

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

(4). Nilai Ekspor Perikanan

Ekspor termasuk ekspor hasil perikanan merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat. Oleh sebab itu dinamika aktifitas ekspor dapat mempengaruhi tingkat pendapatan daerah sekaligus nasional yang akan dicapai. Apabila ekspor bertambah, maka pengeluaran agregat bertambah tinggi dan selanjutnya akan menaikkan pendapatan daerah dan nasional. Akan tetapi sebaliknya pendapatan daerah dan nasional tidak dapat mempengaruhi ekspor. Ekspor belum tentu bertambah apabila pendapatan daerah dan nasional bertambah, atau ekspor dapat mengalami perubahan walaupun pendapatan nasional tetap. Dengan demikian ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan fungsi pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka ekspor juga digolongkan sebagai pengeluaran otonomi oleh karena pendapatan daerah dan nasional bukanlah penentu penting dari tingkat ekspor yang dicapai suatu negara. Daya saing di pasaran luar negeri, keadaan ekonomi di negara-negara lain, kebijakan proteksi di negara luar, pendapatan dan kurs valuta asing merupakan faktor utama yang akan menentukan kemampuan suatu negara mengekspor ke luar negeri. Ekspor yang akan dilakukan sesuatu negara bergantung kepada banyak faktor. Suatu negara dapat mengekspor barang-barang yang akan dihasilkannya ke negara-negara lain apabila barang-barang tersebut diperlukan negara-negara lain dan mereka tidak dapat menghasilkan sendiri barang-barang tersebut.

Ekspor bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Adapun tujuan dari teori permintaan (*Demand*) dan penawaran (*Supply*) adalah menggambarkan bagaimana harga bisa terbentuk dalam mekanisme pasar. Pertemuan antara kedua hukum ini dalam satu kondisi merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh para pelaku bisnis. Kondisi ideal demikian dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah titik keseimbangan (*equilibrium*).

Berikut data ekspor hasil perikanan Kalimantan Selatan selama tahun 2024:

Tabel 3.10. Data Ekspor Hasil Perikanan Kalimantan Selatan Tahun 2024 dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Selatan

Komoditas Produk Perikanan	Volume		Total Frekuensi	Total Perdagangan (Milyar Rp)	Negara Tujuan
	Ekor	KGM			
Semester I					
Frozen Shrimp		1.220.837,37	248	107.108.156.236,00	Japan dan China
Live Clam		61.772,00	72	2.877.285.485,00	Thailand
Live Crab	189.700		67	6.984.098.380,00	China dan Taiwan
Live Ricefield Eels	803.444		51	8.698.543.136,00	Japan
Frozen Cooked Shrimps		189.000,00	16	25.961.474.160,00	Taiwan dan United Kingdom (GB)
Arowana Banjar Red	2.060		6	728.880.000,00	Malaysia
Arowana Golden Red	20		2	13.096.100,00	United Kingdom (GB) dan Singapore
Arowana Super Red	90		2	248.766.200,00	Korea (South) dan Malaysia
Ikan Sepat Kering		5,00	2	275.000,00	Philippines dan Thailand
Total Semester I	995.314	1.471.614	466	152.620.574.697	
Semester II					
Frozen Shrimp		238.614	9	24.698.040.000	Japan dan United Kingdom
Live Clam		15.041	15	45.040.573.800	China
Live Crab	543.236		270	1.820.044.800	China
Live Ricefield Eels	401.722		10	2.361.276.000	China
Arowana	511		7	4.504.440.000	China
Total Semester II	945.469	253.655	311	78.424.374.600	
Grand Total 2024	1.940.783	1.725.269	777	231.044.949.297	

Sumber: Data Terolah dari BKI Kal-Sel (2024)

Realisasi pada tahun 2024 ini untuk nilai ekspor hasil perikanan sebesar Rp. 231.044.949.297 Milyar maka terjadi peningkatan sebesar Rp. 60.044.949.297 Milyar jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 ini sebesar 171 Milyar.

(5). Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21

Penangkapan ikan secara ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau resmi. Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan

penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing). Tindakan IUU Fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar daerah maupun antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *United Nations Convention on The Law Sea* 1982 (UNCLOS 1982). Untuk itu harus ada penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan nelayan asing beserta kapalnya untuk diproses secara hukum. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan perbatasan dengan negara lain. Dalam penegakan hukum tersebut, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional.

Sudah banyak regulasi yang diundangkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum terkait IUU Fishing, beberapa diantaranya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Namun demikian kasus pelanggaran IUU Fishing masih saja terjadi.

Untuk di Kalimantan Selatan sendiri, terhitung sejak Januari hingga pertengahan Desember 2024, jumlah kasus IUU *Fishing/Destructive Fishing* yang tertangani sampai dengan P.21 di Kalimantan Selatan tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2023 lalu. Adapun jumlah perkara yang ditangani sd. P.21 pada tahun 2024 sebanyak 5 kasus. Sementara itu pada tahun 2023 tercatat sebanyak 7 kasus. Dengan demikian pada tahun 2024 terjadi penurunan perkara IUU Fishing sebanyak 2 kasus dari tahun 2023 sebelumnya. Berikut jumlah perkara IUU Fishing yang tertangani sd. P. 21 selama tahun 2024:

Tabel 3.12. Jumlah Perkara IUU Fishing Yang Tertangani sd. P.21 Tahun 2024

No.	Instansi/Aparat Penegak Hukum yang Menangani	Perkara Perikanan yang ditangani (kasus)	Perkara Perikanan yang ditangani sd. Tahap P.21 (kasus)	Persentase Capaian (%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%	(6)
1.	Polair Polda Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	3	3	100,00	Setrum
2.	Polair Polsek Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	2	2	100,00	Setrum
Jumlah		5	5	100,00	
Rata-rata Capaian				100,00	
Kategori Capaian				Sangat Muemuaskan	

Sumber: Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel (2024)

Selain pengenaan sanksi pidana perikanan, seiring dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, maka di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 ini terdapat kasus perikanan yang putusan perkaranya bersifat sanksi administratif, baik berupa pengenaan denda administratif dan pemberian Surat Peringatan. Berikut rincian data pengenaan saksi administratif tahun 2024:

Tabel 3.13. Penanganan Sanksi Administratif Tahun 2024

No.	Jenis Sanksi Administratif	Jumlah Perkara Administratif (kasus)	Instansi/Aparat Penegak Hukum yang Menangani
1.	Surat Peringatan/Teguran I	7	Satwas SDKP Tarakan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Surat Peringatan/Teguran II	-	
3.	Paksaan Pemerintah	-	
4.	Denda Administratif	-	
5.	Pembekuan Perizinan Berusaha	-	
6.	Pencabutan Perizinan Berusaha	-	
Jumlah		7	

Sumber: Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel (2024)

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan jumlah kasus perikanan yang ditangani oleh aparat penegak hukum di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2024 adalah sebanyak 12 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14. Penanganan Kasus Perikanan Tahun 2024

No.	Jenis Sanksi	Jumlah Perkara (kasus)
1.	Pengenaan Sanksi Pidana	5
2.	Pengenaan Sanksi Administratif	7
Jumlah		12

Sumber: Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel (2024)

Permasalahan dan Langkah Strategis Dalam Rangka Optimalisasi Pengendalian Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Permasalahan Utama	Langkah Strategis	Penanggung Jawab
1.	Masih perlu ditingkatkannya kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan per-UU di bidang perikanan	Sosialisasi peraturan per-UU di Bidang Perikanan kepada masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha perikanan	Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.	Masih terbatasnya SDM Aparatur pengawas sumber daya kelautan dan perikanan	Pengusulan Diklat PPNS Perikanan/Diklat Polsus WP3K	
3.	Luasnya jangkauan pengawasan yang tidak dibarengi dengan ketersediaan SDM Pengawasan yang memadai, serta kelengkapan sarana dan prasana pengawasan yang mencukupi	Kerjasama dengan Polair Polda Kalsel dan instansi penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan (patroli terpadu) di laut dan perairan umum daratan	
4.	Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan bagi POKMASWAS Perikanan	Fasilitasi/stimulan pemberian paket bantuan hibah sarana dan prasarana pengawasan bagi POKMASWAS Perikanan	

Sumber: Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel (2024)

(6). Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Berdasarkan Dokumen RZWP3K yang ditetapkan pada tahun 2018, total luas kawasan ekosistem pesisir kritis di Kalimantan Selatan adalah 12.353,10 Ha, dimana untuk luas kawasan kritis ekosistem mangrove seluas 4.972 Ha dan luas kawasan kritis ekosistem terumbu karang seluas 7.381 Ha.

Target persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi pada tahun 2024 ini adalah sebesar 1,26%. Sementara itu realisasi capaian tahun 2024 tercatat sebesar 1,77%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi pada tahun 2024 ini dengan capaian sebesar 140,48%.

Pada tahun 2024 ini berdasarkan anggaran yang tersedia pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut, kegiatan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir dapat dilaksanakan :

- kegiatan rehabilitasi terumbu karang di Kabupaten Kotabaru seluas **1,80 Ha**,
- kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan di Kabupaten Kotabaru seluas **42,50 Ha**,

Adapun perkembangan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir di Kalimantan Selatan sd. tahun 2024 yang bersumber dari APBD dan Non APBD Provinsi Kalimantan Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15. Perkembangan Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Pesisir sd Tahun 2024

No	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir sd. 2017	Tahun	Terumbu Karang (Ha)	Mangrove (Ha)	Total Pada Tahun n	Total Luas Kawasan Pesisir Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun n	% Luas Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun n	Sisa Luas Kawasan Ekosistem	% Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem per Tahun
	1	2	3	4	5 (3 + 4)	6 (6 + 5)	7 (6 / 1)*100	8 (1 - 6)	9 (Tahun N-1 - Tahun N) dibagi Tahun N-1 *100
1	12,353.10	sd. 2017	28	58	86	86	0.70	12,267.10	—
2		2018	2	3	5	91	0.74	12,262.10	0.04
3		2019	1	3.30	4.3	95.30	0.77	12,257.80	0.04
4		2020	0.25	—	0.25	95.55	0.77	12,257.55	0.00
5		2021	3	4	7	102.55	0.83	12,250.55	0.06
6		2022	3	20.10	23.10	125.65	1.02	12,227.45	0.19
7		2023	1	47.60	48.60	174.25	1.41	12,178.85	0.40
8		2024	1.80	42.50	44.30	218.55	1.77	12,134.55	0.36

Sumber : Bidang PRL (2024)

4). Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Berikut program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2024 :

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, melalui:

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- c. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT;
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT;
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, melalui:

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan.
- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, melalui:

- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing.
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melalui:

- a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sd 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat;
 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut.
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan Sub Kegiatan berupa:

- Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, melalui:

- a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil
 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- h. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- i. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

II. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.16. Perjanjian Kinerja Eselon II

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan	397.272 Ton
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,95
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	64,70 Kg/Kapita
4	Menurunnya Kerusakan Lingkungan	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Kelautan dan Perikanan	0,27%

5	Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	100%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Poin
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan	1 Inovasi

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja Eselon II

Berikut disajikan target dan realisasi sasaran strategis dan indikator kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024.

Tabel 3.17. Target dan Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Kepala Dinas		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan	397.272 Ton	369.460 Ton	92,99%
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,95	99.86	96,99%
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	64,70 Kg/Kapita	65,50 Kg/Kapita	101,23%
4	Menurunnya Kerusakan Lingkungan	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Kelautan dan Perikanan	0,27%	0,36%	133,33%
5	Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Poin	90,02 Poin	100,02%
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
Rata-rata Capaian					103,50%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

(1). Produksi Perikanan

Pengertian :

Produksi Ikan adalah volume hasil produksi ikan yang diperoleh dari penjumlahan volume produksi perikanan tangkap dan volume produksi perikanan pembudidaya pada tahun berjalan (tahun n), dengan satuan hitung ton.

Rumus :

Untuk menghitung produksi perikanan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$VPP_n = VPPT_n + VPPB_n$$

Dimana :

$$VPP_n = \text{Volume Produksi Perikanan}$$

$$VPPT_n = \text{Volume Produksi Perikanan Tangkap se Kal-Sel pada tahun n}$$

$$VPPB_n = \text{Volume Produksi Perikanan Budidaya se Kal-Sel pada tahun n}$$

Sumber : Data Terolah dari Aplikasi Satu Data Statistik-KKP (2024)

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah total produksi perikanan tangkap dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} VPP_n &= VPPT_n + VPPB_n \\ &= 218.022 + 151.438 \\ &= \mathbf{369.460^{**}) \text{ Ton}} \end{aligned}$$

Keragaan Produksi Perikanan se Kalimantan Selatan pada tahun 2024:

$$\text{Target} = 397.272 \text{ Ton}$$

$$\text{Realisasi} = 369.460^{**}) \text{ Ton}$$

****)** = angka sangat sementara karena belum diselenggarakannya kegiatan validasi nasional oleh KKP untuk Statistik Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Budidaya.

Dengan demikian realisasi sementara untuk total produksi perikanan pada tahun 2024 adalah 369.460 **) ton atau lebih sedikit 27.812 ton jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang ditetapkan sebanyak 397.272 ton.

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator total produksi perikanan tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian Produksi Perikanan} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Produksi Perikanan} = \frac{369.460}{397.272} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Produksi Perikanan} = 92,99\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja produksi perikanan tahun 2024 adalah sebesar 92,99% (Sangat Memuaskan).

Berikut pada Tabel 3.18 disajikan data produksi perikanan tangkap kabupaten/kota se Kalimantan Selatan tahun 2024 :

Tabel 3.18. Data Produksi Perikanan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Total **)
1	Balangan	1.795	738	2.533
2	Banjar (Martapura)	54.274	9.225	63.499
3	Barito Kuala	11.940	8.646	20.586
4	Hulu Sungai Selatan	7.314	12.561	19.875
5	Hulu Sungai Tengah	3.014	8.370	11.384
6	Hulu Sungai Utara	9.899	12.568	22.467
7	Banjarbaru	464	352	816
8	Banjarmasin	2.758	1.624	4.382
9	Kotabaru	32.456	75.125	107.581
10	Tabalong	18.076	2.056	20.132
11	Tanah Bumbu	6.472	47.398	53.870
12	Tanah Laut	2.587	35.756	38.343

13	Tapin	387	3.602	3.989
	Total	151.438	218.022	369.460

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang BP2HP (2024)

(2). Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)

Pengertian.

NTNP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh nelayan dan pembudidaya ikan (It) dan indeks harga yang dibayar oleh nelayan dan pembudidaya ikan (Ib) yang dihasilkan pada tahun n (tahun berjalan)

Rumus :

Adapun rumus perhitungan untuk NTNP adalah sebagai berikut :

$$\text{NTNP} = \frac{\text{It NTNP}}{\text{Ib NTNP}} \times 100\%$$

Dimana :

It NTNP = Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It)
Ib NTNP = Indeks Harga yang Dibayar oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)

Capaian Kinerja :

Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh realisasi NTNP tahun 2024 sebagai berikut:

Nilai It = 122.22

Nilai Ib = 122.39

$$\text{NTNP} = \frac{\text{It NTNP}}{\text{Ib NTNP}} \times 100\%$$

$$\text{NTNP} = \frac{122.22}{122.39} \times 100\%$$

$$\text{NTNP} = \mathbf{99,86}$$

Sedangkan untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja indikator kinerja NTNP tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian NTNP} = \frac{\text{Realisasi NTNP Pada Tahun 2024}}{\text{Target NTNP Pada Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian NTNP} = \frac{99,86}{102,95} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian NTNP} = 96,99 \%$$

Dengan menggunakan persamaan tersebut di atas, maka persen capaian NTNP tahun 2024 adalah sebesar 96,99% (Sangat Memuaskan).

(3). Angka Konsumsi Ikan

Pengertian :

Angka Konsumsi Ikan (AKI) adalah ukuran atau indicator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun.

Rumus :

Untuk menghitung Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kalimantan Selatan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AKI Kal-Sel} = \frac{\text{Jumlah AKI Kab/Kota di Kal-Sel}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Kal-Sel}}$$

Sedangkan untuk mendapatkan Angka Konsumsi Ikan dapat diperoleh melalui beberapa cara diantaranya melalui:

Penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat (AKI = A + B + C). Sumber data yang diperlukan dari hasil pelaksanaan Sensus sosial ekonomi nasional oleh BPS.

- Konsumsi rumah tangga merupakan jumlah konsumsi ikan segar, ikan dalam awetan, ikan dalam makan jadi dan ikan dalam bumbu-bumbuan (A = KIDS + KIDA + KIMJ + KIMU).
- Konsumsi ikan diluar rumah tangga adalah jumlah konsumsi ikan dari hotel, restoran dan catering (B = 8% x A).

- Konsumsi ikan tak tercatat adalah jumlah konsumsi ikan dari Rumah sakit, Lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren dan panti asuhan ($C = 5,5\% \times (A + B)$)

Adapun rumus perhitungan AKI adalah sebagai berikut :

$$AKI = A + B + C$$

Dimana :

A = Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT)

B = Konsumsi di Luar Rumah Tangga

C = Konsumsi Tidak Tercatat

Capaian Kinerja :

Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh realisasi AKI tahun 2024 sebagai berikut:

$$AKI \text{ Kal-Sel} = \frac{\text{Jumlah AKI Kab/Kota di Kal-Sel}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Kal-Sel}}$$

$$AKI \text{ Kal-Sel} = \frac{851,45}{13 \text{ Kab/Kota}}$$

$$AKI \text{ Kal-Sel} = 65,50 \text{ Kg/Kapita/Tahun}$$

Keragaan AKI di Kalimantan Selatan pada tahun 2024:

Target = 64,70 Kg/Kapita/Tahun

Capaian = 65,50 Kg/Kapita/Tahun

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator AKI tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% AKI = \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian AKI} = \frac{65,50}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\%$$

64,70

% Capaian AKI = 101,23%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja AKI tahun 2024 adalah sebesar 101,23% (Sangat Memuaskan).

Berikut disajikan rekap data Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kal-Sel Tahun 2024 berdasarkan AKI Kab/Kota se Kalimantan Selatan.

Tabel 3.19. Data AKI Kab/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	AKI
1	Tanah Laut	70.13
2	Kotabaru	72.10
3	Banjar	63.34
4	Barito Kuala	67.79
5	Tapin	70.63
6	Hulu Sungai Selatan	69.11
7	Hulu Sungai Tengah	58.08
8	Hulu Sungai Utara	67.68
9	Tabalong	67.62
10	Tanah Bumbu	59.96
11	Balangan	58.99
12	Kota Banjarmasin	64.00
13	Kota Banjarbaru	62.02
	Total AKI	851.45
	AKI Kal-Sel	65.50

(4). Persentase Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Kelautan dan Perikanan

Pengertian :

Merupakan perhitungan sisa total luas kawasan ekosistem pesisir kritis sd tahun n yang dibagi dengan angka konstanta 12.353,10 dikali dengan 100%. Angka konstanta tersebut merupakan data total luas Kawasan ekosistem pesisir kritis di Kalimantan Selatan yang tercatat seluas 12.353,10 Ha. Realisasi penurunan luas kawasan kritis ekosistem wilayah pesisir ditentukan berdasarkan aksi kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilaksanakan sd tahun n (sd tahun berjalan). Luas kawasan kritis ekosistem

kelautan dan perikanan dikatakan mengalami penurunan apabila sisa total lahan kritis pada tahun berjalan (tahun n) lebih kecil dari sisa total lahan kritis pada tahun sebelumnya (tahun n-1).

Rumus :

Adapun cara menghitung persentase penurunan luas kawasan kritis ekosistem kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ Penurunan} = \frac{\text{Nilai Penurunan Tahun } n-1 - \text{Nilai Penurunan Tahun } n}{\text{Nilai Penurunan Tahun } n-1} \times 100\%$$

Capaian Kinerja :

Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh realisasi persentase penurunan luas kawasan kritis ekosistem kelautan dan perikanan sebagai berikut:

$$\% \text{ Penurunan} = \frac{\text{Nilai Penurunan Tahun } n-1 - \text{Nilai Penurunan Tahun } n}{\text{Nilai Penurunan Tahun } n-1} \times 100\%$$

$$\% \text{ Penurunan} = \frac{12.178,85 - 12.134,55}{12.178,85} \times 100\%$$

$$\% \text{ Penurunan} = \mathbf{0,36\%}$$

Dan untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator persentase penurunan luas kawasan kritis ekosistem kelautan dan perikanan tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,36\%}{0,27\%} \times 100\%$$

% Capaian = **133,33%**

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja persentase penurunan luas kawasan kritis ekosistem kelautan dan perikanan pada tahun 2024 adalah sebesar 133,33% (Sangat Memuaskan).

(5). Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21

Pengertian :

Persentase kasus illegal fishing yang tertangani sd P.21 adalah persentase jumlah kasus IUU Fishing selama tahun n yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan proses pemberkasan perkaranya dapat tuntas diselesaikan sd tahap P.21

Tahap P.21 merupakan batas kewenangan PPNS Perikanan untuk menangani proses penyidikan kasus perkara IUU Fishing. Pada P.21 ini menunjukkan kinerja PPNS Perikanan telah sampai pada tahap pemberitahuan bahwa penyidikan sudah lengkap, dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses pada tahap selanjutnya.

Rumus :

Untuk menghitung persentase kasus iuu fishing/destructive fishing yang tertangani sd P.21 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$PKP_{P.21} = \frac{KPT_{P.21}}{KPP_n} \times 100\%$$

Dimana :

PKP_{P.21} = Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21
KPT_{P.21} = Jumlah Kasus Perkara Yang Tuntas sd P.21
KPP_n = Jumlah Kasus Yang Sedang Diproses Perkaranya pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi persentase kasus iuu fishing/destructive fishing yang tertangani sd P.21 tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jika diketahui:

- Jumlah Kasus Perkara Yang Tuntas sd. P.21 = 12 kasus
- Jumlah Kasus Yang Sedang Diproses Perkaranya = 12 kasus

$$PKP_{P.21} = \frac{KPT_{P.21}}{KPP_n} \times 100\%$$

$$PKP_{P.21} = \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$PKP_{P.21} = \mathbf{100\%}$$

Target persentase kasus IUU Fishing/Destructive Fishing yang tertangani sd. P.21 pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga mencapai 100%, maka realisasi tersebut memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\% PKP_{P.21} = \frac{\text{Realisasi 2024}}{\text{Target 2024}} \times 100\%$$

$$\% PKP_{P.21} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% PKP_{P.21} = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja persentase kasus IUU Fishing/Destructive Fishing yang tertangani sd. P.21 pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

(6). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengertian :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) yang berada di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan beserta 7 UPTD. Hasilnya berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Rumus :

Nilai IKM pada tahun n diperoleh dengan cara merata-ratakan nilai IKM UPP 7 UPTD pada tahun n. Berikut persamaan untuk menghasilkan IKM tahun n:

$$IKM_{Tn} = \frac{TIKM_{UPP\ Tn}}{TUKPP}$$

Dimana:

- IKM_{Tn} = Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Tahun n
- IKMD_{Tn} = Nilai Total IKM Pada Tahun n
- TUKPP = Jumlah Total Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan

Capaian Kinerja :

Berikut nilai IKM pada UPP di UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024:

Tabel 3.20. Nilai IKM pada UPP di UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024

No	Unit Kerja	Nilai IKM Tahun 2023
1	PP Banjarmasin	92.46
2	PP Batulicin	93.24
3	PP Muara Kintap	89.19
4	PP Kotabaru	89.82
5	BPMHP	90.24
6	PBKL	88.04
7	PBAPL Kotabaru	87.12
	Total	630.11

Sumber: 7 UPTD

Dari tabel tersebut di atas, maka:

Jika diketahui:

- Nilai total IKM pada UPTD = 630.11
- Jumlah total UPTD = 7 unit

$$\begin{aligned} \text{IKM}_{Tn} &= \frac{\text{TIKM}_{\text{UPP } Tn}}{\text{TUKPP}} \\ \text{IKM}_{2022} &= \frac{630.11}{7} \\ \text{IKM}_{2023} &= \mathbf{90.02} \end{aligned}$$

Target Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 ditetapkan yaitu dengan nilai 90, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang tercapai dengan nilai 90.02 maka realisasi tersebut dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% A &= \frac{\text{Realisasi 2024}}{\text{Target 2024}} \times 100\% \\ \% A &= \frac{90.02}{90} \times 100\% \\ \% A &= 100,02\% \end{aligned}$$

(7). Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan

Pengertian :

Jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dan 7 (tujuh) UPTD pada tahun n.

Rumus :

Berikut persamaan untuk menghasilkan IPPT tahun n:

$$\text{JIPPT} = \text{JIPPG}_{Tn}$$

Dimana:

JIPPT = Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan

JIPPG_{Tn} = Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Tahun n

Capaian Kinerja :

Berikut daftar inovasi pelayanan publik yang dihasilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan beserta UPTD sampai dengan tahun 2024:

Tabel 3.21. Daftar Inovasi Pelayanan Publik Yang Dihasilkan Oleh Dinas Beserta UPTD sampai dengan Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Inovasi Pelayanan Publik	
		Nama Pelayanan Publik	Tahun
1.	Dinas	• Sifaras	2021
		• Sepat-BP2HP	2022
		• Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan melalui Sistem Berbasis Spasial	2024
2.	UPTD		
	1)PP Banjarmasin	Sipeda	2019
	2)PP Batulicin	-	-
	3)PP Muara Kintap	-	-
	4)PP Kotabaru	E-Lakasi	2020
	5)BPMHP	E-Mutuskan	2019
	6)BPKL	-	-
	7)PBAPL Kotabaru	-	-
Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sd. Tahun 2024		6 buah	

Sumber: Dislautkan Prov. Kalsel + 7 UPTD (2024)

Salah satu inovasi pelayanan publik yang baru dicanangkan pada tahun 2024 ini adalah Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan Melalui Sistem Berbasis Spasial.

Maksud dari dilaksanakannya pengelolaan data kelautan dan perikanan melalui system berbasis spasial ini adalah agar data-data di sektor kelautan dan perikanan dapat terkelola, terstruktur, mutakhir, terhimpun dengan baik dan dapat diintegrasikan.

Manfaat dari pengelolaan data kelautan dan perikanan melalui system berbasis spasial pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Dapat menyediakan informasi dengan lengkap;
2. Dapat menyediakan informasi dengan cepat;

3. Dapat menyediakan informasi dan data yang akurat dan terbaru;
4. Dapat dijadikan sebagai masukan pengambilan kebijakan dan pengukuran indikator kinerja sektor kelautan dan perikanan;
5. Dapat mengimplementasikan salah satu tema reformasi birokrasi berupa digitalisasi penyelenggara pemerintahan.

Pelaksanaan aksi perubahan ini diharapkan mempunyai manfaat untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui pengelolaan data berbasis spasial memungkinkan penyajian data kelautan dan perikanan secara lebih visual dan interaktif, up to date (terkini), efektif dan efisien serta dapat berbagi pakai data secara cepat. Hal tersebut membantu pengambil keputusan di Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data aktual dan distribusi spasial, baik untuk penentuan zona penangkapan ikan, pengelolaan kawasan konservasi, maupun pemanfaatan ruang laut dan perikanan secara umum.

Data yang terintegrasi dalam sistem berbasis spasial ini tidak hanya berguna bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh peneliti, akademisi, masyarakat dan inovator untuk mengembangkan teknologi atau metode baru dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Ini membuka peluang untuk kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan yang berbasis data.

Dengan semua kemanfaatan ini, diharapkan pengelolaan data kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat menjadi lebih baik, dan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

2). Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a). Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023

Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi		Capaian % dari Target 2024
				2023	2024	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan	397.272 Ton	367.214,25 Ton	369.460 Ton	92,99%
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,95	99,22	99.83	96,99%
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	64,70 Kg/Kapita	64,64 Kg/Kapita	65,50 Kg/Kapita	101,23%

4	Menurunnya Kerusakan Lingkungan	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Kelautan dan Perikanan	0,27%	0,40%	0,36%	133,33%
5	Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Poin	87,88 Poin	90,02 Poin	100,02%
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
Rata-rata Capaian						103,50%
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan

b). Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.23 ditampilkan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 ini dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024		Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	Produksi Perikanan	332.850,00 Ton	344.522,82 Ton	337.609,18 Ton	367.214,25 Ton	397.272 Ton	369.460 Ton	92,99%
2	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	98,99	102,99	98,27	99,22	102,95	99.83	96,99%
3	Angka Konsumsi Ikan	60,24 Kg/Kapita	63,74 Kg/Kapita	64,11 Kg/Kapita	64,64 Kg/Kapita	64,70 Kg/Kapita	65,50 Kg/Kapita	101,23%
4	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Kelautan dan Perikanan	0,00%	0,06%	0,19%	0,40%	0,27%	0,36%	133,33%
5	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	85,34 Poin	87,88 Poin	90 Poin	90,02 Poin	100,02%
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan	-	4 Inovasi	5 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100%
Rata-rata Capaian								103,50%
Kategori Capaian								Sangat Memuaskan

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

(1). Produksi Perikanan

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Jumlah total produksi perikanan pada tahun 2024 ini masih bersifat angka sementara, karena belum dilaksanakan validasi satu data statistik kelautan dan perikanan di tingkat pusat untuk tahun 2024, baru akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun n+1 berikutnya (bulan Maret tahun 2025).

Pada tahun 2024 ini total produksi perikanan adalah 369.460 Ton, dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 367.214,25 Ton maka pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 2.245,75 Ton.

Sejauh ini upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan baik itu produksi perikanan tangkap ataupun produksi perikanan budidaya adalah :

- 1). Produksi Perikanan Tangkap dengan cara meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan melalui penyediaan paket bantuan sarana perikanan tangkap ramah lingkungan, pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum melalui pelepasliaran (restocking) ikan lokal di reservaat perairan umum, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM nelayan untuk meningkatkan kemandirian usahanya.
- 2). Produksi Perikanan Budidaya dengan cara meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah dengan cara meningkatkan produksi dan produktifitas pembudidaya ikan melalui penyediaan paket bantuan berupa sarana budidaya bandeng, sarana dan prasarana budidaya gabus haruan dan sarana budidaya rumput laut, selain itu juga dilaksanakan kegiatan pembinaan kepada pembudidaya ikan dengan melaksanakan kegiatan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan juga dengan melaksanakan kegiatan monitoring hama dan penyakit ke beberapa kabupaten.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

1. Produksi Perikanan Tangkap

- Terjadinya penurunan kegiatan penangkapan ikan karena factor cuaca dan iklim yang menyebabkan kegiatan penangkapan ikan cukup berkurang secara signifikan.
- Adanya pembatasan tangkapan ikan di laut dengan adanya Maksimum Sustainable Yield (MSY) atau Potensi Lestari Sumberdaya Ikan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 270.000 Ton, dengan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) untuk program sumberdaya perikanan berkelanjutan, dengan indikator kinerja proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu $\leq 72\%$.

Pada tahun 2024 ini perhitungan untuk JTB dari Potensi Lestari :

$$\text{JTB} = \frac{218.022 \text{ Ton}}{270.000 \text{ Ton}} \times 100\%$$

$$\text{JTB} = 80,74\%$$

Dari hasil produksi perikanan tangkap Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah 218.022 Ton, maka 80,74% hasil yang didapat dari potensi lestari.

2. Produksi Perikanan Budidaya

- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
- Tidak ada fasilitas untuk pupuk subsidi bagi pembudidaya ikan oleh pemerintah sehingga menggunakan pupuk non subsidi dengan jumlah tidak sesuai rekomendasi karena harganya yang relative mahal.
- Tingginya harga pakan ikan dan lemahnya permodalan, sehingga pemberian pakan terhadap ikan budidaya tidak sesuai rekomendasi
- BBI local produksinya belum optimal dan sebagian besar benih patin didatangkan dari Pulau Jawa sehingga menambah biaya produksi.
- Adanya kejadian kematian massal ikan pada budidaya ikan di karamba akibat perubahan kualitas air sungai yang drastis rendah akibat hujan di bagian hulu.
- Hilangnya ikan yang dibudidayakan akibat jebolnya pematang tambak karena adanya banjir rob di pesisir Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala.
- Permasalahan utama yang dihadapi oleh pembudidaya ikan adalah terbatasnya permodalan usaha.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja untuk produksi perikanan di Kalimantan Selatan, maka hal-hal yang akan dilakukan adalah :

1. Melaksanakan kegiatan restocking ikan dan pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan di perairan umum daratan.
2. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi SDM nelayan dan pembudidaya ikan.
3. Mengadakan penyediaan pupuk bersubsidi kepada pembudidaya ikan
4. Melakukan identifikasi harga pakan ikan yang ada dipasaran dengan harapan harga pakan ikan tersebut dapat diminimalisir.
5. Sekaitan dengan terbatasnya modal usaha oleh para pembudidaya ikan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan

program/kegiatan/sub kegiatan menyediakan paket bantuan hibah sarana budidaya bagi Kelompok Pembudidaya Ikan. Bantuan tersebut sifatnya stimulan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas usaha perikanan.

(2). Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

1. Melakukan koordinasi dengan BPS Kalimantan Selatan
2. Memberikan bantuan/hibah kepada nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Kalimantan Selatan

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat melakukan intervensi terhadap nilai yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

c. Rencana Tindak Lanjut

Berkoordinasi secara terus menerus dengan BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan terus menerus memberikan bantuan/hibah kepada nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Kalimantan Selatan.

(3). Angka Konsumsi Ikan

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Trend meningkatnya AKI Kalimantan Selatan mengindikasikan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan gemar makan ikan. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan AKI di Kalimantan Selatan adalah dengan kegiatan GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dan Kegiatan Bazar/Pasar Murah. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terus dilaksanakan setiap tahunnya, dengan harapan masyarakat Kalimantan Selatan terus mengkonsumsi ikan sebagai menu utama di hidangan makanan di rumah mereka masing-masing karena banyak manfaat dari makan ikan ini, banyaknya kandungan gizi yang terdapat pada ikan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak dan makan ikan dapat mencegah stunting.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Secara pelaksanaan dalam rangka capaian realisasi Angka Konsumsi Ikan (AKI) ini tidak ada hambatan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Terus melaksanakan kegiatan GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), kegiatan Bazar/Pasar Murah dan kegiatan Diversifikasi Hasil Olahan Ikan melalui lomba masak ikan baik, semua kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan Angka Konsumsi Ikan di Kalimantan Selatan.

(4). Persentase Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Kelautan dan Perikanan

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Dalam rangka akselerasi pencapaian kinerja persentase penurunan luas kawasan kritis ekosistem kelautan dan perikanan, maka upaya yang dilakukan adalah :

1. Dengan pengusulan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang maupun kegiatan lain yang mendukung program dari Bidang Pengelolaan Ruang Laut terutama pada Seksi Konservasi Ekosistem Laut.
2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia maupun pihak swasta yang melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di wilayah kawasan kritis di pesisir Kalimantan Selatan.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

1. Berdasarkan anggaran yang ditetapkan untuk Bidang Pengelolaan Ruang Laut pada Seksi Konservasi Ekosistem Laut pada tahun 2024 ini masih dapat dikatakan kurang, karena jika dibandingkan dengan luas kawasan ekosistem kritis yang ada di Kalimantan Selatan dengan luas kawasan yang telah direhabilitasi maka luas yang perlu direhabilitasi masih sangat banyak. Sehingga masih diperlukan anggaran yang banyak untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove dan transplantasi terumbu karang di kawasan ekosistem kritis.
2. Musim yang selalu berubah-ubah sehingga terkadang proses rehabilitasi tidak berjalan sesuai rencana

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Mengusulkan peningkatan anggaran pada Seksi Konservasi Ekosistem Laut, khususnya pada kegiatan rehabilitasi pada kawasan kritis mangrove dan terumbu karang,
2. Terus melaksanakan rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik di kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi.

(5). Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang seluruhnya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Keterbatasan sumberdaya untuk mengawasi perairan laut sampai dengan 12 mil tentunya mengharuskan Dinas Kelautan dan Perikanan meningkatkan koordinasi pengawasan dengan Dinas Perikanan di Kabupaten/Kota, serta aparat dari instansi terkait. Selain itu, memberdayakan dan mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terus ditingkatkan.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lapangan perlu didukung dengan SDM aparaturnya yang memadai. Namun demikian dari 13 kabupaten/kota, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2024 hanya memiliki 6 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Kondisi ini tentunya kurang dari ketersediaan ideal untuk menjaga dan mengamankan aktifitas IUU Fishing dan Destructive Fishing yang masih terus terjadi di Kalimantan Selatan.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, melalui penguatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, penggerakan keaktifan POKMASWAS Perikanan dalam membantu pengawasan di lapangan, serta gelar operasi terpadu di perairan laut sampai dengan 12 mil dan perairan umum lintas kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penanganan dan penyelesaian konflik, supervisi proses pemberkasan kasus pelanggaran IUU Fishing dan Destructive Fishing sampai dengan P.21, serta pembinaan penegakan hukum dengan pendekatan preventive melalui kegiatan PSDKP mengajar dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengawasan bagi aparaturnya yang memadai dan POKMASWAS dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lapangan

(6.a). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang berisikan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pada tahun 2024, IKM di lingkup Unit Penyelenggara Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 90,02 sementara itu target yang ditetapkan yaitu 90.

Strategi yang telah dilaksanakan secara umum yaitu:

- Kemudahan dalam memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.
- Tersedia prosedur yang jelas, mudah dan tidak berbelit.
- Kompetensi dan kecakapan petugas dalam melayani pengguna telah memadai.
- Petugas memberikan pelayanan secara menyeluruh dan tuntas.
- Petugas menunjukkan kesungguhan dalam membantu.

Selain itu juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, yaitu:

- Petugas diharuskan lebih ramah.
- Kemampuan memahami materi untuk *Customer Service* perlu ditingkatkan.
- Lebih diperbaiki dan disempurnakan sistem perizinan online.
- Perlu penjelasan lebih detail terkait setiap prosedur.
- Informasi status permohonan layanan dapat lebih diberikan secara rinci.

(6.b). Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan

Pedoman dalam pengembangan inovasi pelayanan publik diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Inovasi pelayanan publik dimaksudkan untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah juga didorong untuk membudayakan semangat *one agency one innovation* (satu instansi satu inovasi). Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi. Sementara itu tujuan dikembangkannya inovasi pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kualitas, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Adapun tipe inovasi tersebut meliputi: inovasi produk, inovasi proses, inovasi organisasi, inovasi manajemen, inovasi produksi, inovasi komersial atau pemasaran, dan inovasi jasa.

Sampai dengan tahun 2024 ini, jumlah inovasi pelayanan publik yang dicanangkan di lingkup UPP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebanyak 6 (enam) buah inovasi sebagai berikut:

1. E-Mutuskan di BPMHP.
2. E-Lakasi di PP Kotabaru.
3. Si Iwak Peda di PP Banjarmasin.
4. Sepat_BP2HP di Bidang BP2HP.
5. Sifaras di Bidang Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan
6. Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan melalui Sistem Berbasis Spasial

Diharapkan setiap tahunnya terdapat inovasi baru yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4). Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Berikut program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2024 :

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, melalui:

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- c. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT;
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT;
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, melalui:

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan.
- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, melalui:

- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing.
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melalui:

- a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sd 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat;
 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dengan Sub Kegiatan berupa:

- Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut.
- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, melalui:

- a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil
 - Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- h. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- i. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

III. BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

III.1. SASARAN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

Tabel 3.29. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	155,80 Ha

1). Perbandingan Realisasi Dengan Target

Berikut pada Tabel 3.30 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan pada kinerja utama dan indikator kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

Tabel 3.30. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	155,80 Ha	218,55 Ha	140,27%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut (2024)

Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Pengertian :

Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi merupakan akumulasi luas ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi sampai dengan tahun n (sampai dengan tahun berjalan) dengan satuan hitung Ha (hektar). Kawasan ekosistem pesisir yang direhabilitasi adalah kawasan mangrove dan kawasan terumbu karang.

Realisasi luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi ditentukan berdasarkan aksi kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilaksanakan sd. tahun n.

Rumus :

Adapun cara menghitung luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi adalah sebagai berikut :

$$A = B + C$$

Dimana :

A = Jumlah Total Luas Kawasan Ekosistem Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun 2024

B = Jumlah Total Luas Kawasan Ekosistem Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun 2023

C = Jumlah Total Luas Kawasan Ekosistem Yang Direhabilitasi Pada Tahun 2024

Sumber : Data Terolah dari Bidang Pengelolaan Ruang Laut (2024)

Capaian Kinerja :

Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh realisasi luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2024 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A &= B + C \\ &= 174,25 \text{ Ha} + 44,30 \text{ Ha} \\ &= \mathbf{218,55 \text{ Ha}} \end{aligned}$$

Keragaan luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2024 :

Target = 155,80 Ha

Realisasi = 218,55 Ha

Dan untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{218,55 \text{ Ha}}{155,80 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \mathbf{140,27\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2024 adalah sebesar 140,27% (Sangat Memuaskan).

Dan berikut pada Tabel 3.31 disajikan data perkembangan luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi di Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.31. Data Perkembangan Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun 2024

Uraian	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	86 Ha	91 Ha	95,30 Ha	95,55 Ha	102,55 Ha	125,65 Ha	174,25 Ha	218,55 Ha

2). Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut:

Tabel 3.32. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		% Capaian
			2023	2024	
1	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	174,25 Ha	218,55 Ha	140,27%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.33 disajikan perbandingan realisasi kinerja yang dicapai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi							% Capaian
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	91 Ha	95,30 Ha	95,55 Ha	102,55 Ha	125,65 Ha	174,25 Ha	218,55 Ha	140,27%
Rata-rata Capaian										100%
Kategori Capaian										Sangat Memuaskan

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

1. Melaksanakan rehabilitasi Terumbu Karang dan Kawasan Mangrove secara terkontrol dan terus menerus.

Pada tahun 2024 ini berdasarkan anggaran yang tersedia pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut, kegiatan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir yang dilaksanakan adalah:

- Rehabilitasi mangrove seluas 42,50 Ha terdiri dari:
 - a. 150.000 batang mangrove di Desa Tanjung Pangga, Desa Tanjung Sungkai, Desa Tanjung Tengah, Desa Sarang Tiung dan Desa Gedambaan Kabupaten Kotabaru seluas 26,9 Ha
 - b. 55.000 batang mangrove di Desa Muara Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu seluas 9,9 Ha
 - c. 32.000 batang mangrove di Desa Pagatan Besar dan Desa Bawah Layung Kabupaten Tanah Laut seluas 5,7 Ha
- Rehabilitasi terumbu karang seluas 1,80 Ha terdiri dari :
 - a. pemasangan 110 unit (0,5 Ha) transplantasi karang di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru.
 - b. pemasangan 230 unit (1,3 Ha) transplantasi karang di Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu melalui dana CSR

2. Melaksanakan kaji tiru teknologi pengelolaan Terumbu Karang
3. Melaksanakan monev kawasan konservasi perairan dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

4. Mengadakan sosialisasi Kepmen KP tentang Kawasan Konservasi Perairan.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut terutama pada kegiatan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir kritis (mangrove dan terumbu karang) adalah :

1. Masih luasnya kawasan kritis di pesisir serta belum optimalnya rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang (ekosistem pesisir merupakan penyangga utama dari semua aktifitas dikawasan hulu / daratan / terestrial dan berperan sebagai filter bagi keberlanjutan ekosistem terumbu karang, lamun dan sumberdaya ikan).
2. Terbatasnya porsi anggaran untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan juga musim yang selalu berubah-ubah sehingga terkadang proses rehabilitasi tidak berjalan sesuai rencana.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi / penanaman pada kawasan mangrove kritis diperlukan pendekatan yang mengombinasikan vegetasi dengan struktur fisik yang ramah lingkungan sesuai dengan prinsip konservasi, seperti teknik dan teknologi *hybrid engineering* dan metode rumpun berjarak yang dipadukan dengan pemecah gelombang serta perangkat sedimentasi. Selain itu, upaya rehabilitasi harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pengguna ruang laut, akademisi, dan LSM guna mendukung pendanaan, aspek teknis, serta implementasi program. Pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi kunci keberhasilan melalui sosialisasi dan kampanye yang menekankan pentingnya ekosistem mangrove dan terumbu karang dalam menjaga keseimbangan pesisir serta sebagai langkah mitigasi terhadap perubahan iklim
2. Mengusulkan peningkatan anggaran pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut, khususnya pada kegiatan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir kritis (mangrove dan terumbu karang).

4). Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Bidang Pengelolaan Ruang Laut, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
---------	----------	--------------

Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
		Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

III.2. SASARAN KEPALA SEKSI LINGKUP BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

III.2.1. Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut terdapat 2 indikator kinerja pada tahun 2024 ini, yaitu :

- Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola
- Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi

Berikut pada Tabel 3.34 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.34. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dan Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola	179.659,89 Ha	183.931,39 Ha	102,37 %

2	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi	32,15 Ha	44,30 Ha	137,79 %
Rata-rata Capaian Kategori Capaian					120,08%
					Sangat Memuaskan

a. Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola

Pengertian :

Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola adalah total jumlah luasan kawasan konservasi perairan (KKP) dan jumlah luasan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KP3K) yang di monev atau di kelola pada tahun n (tahun berjalan) dengan satuan Ha.

Berdasarkan KEPMEN KKP No. 69 Tahun 2020 untuk luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah 179.659,89 Ha dan luas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) adalah 57.967,24 Ha berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), jadi total keseluruhan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah 237. 627,13 Ha.

Rumus :

Untuk menghitung luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola menggunakan rumus sebagai berikut :

$$LKKWP3KYT = \text{Luas KKPYT tahun } n + \text{Luas KP3KYT tahun } n$$

Dimana :

LKKWP3KYT = Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola

Luas KKPYT tahun n = Luas Kawasan Konservasi Perairan Yang Terkelola pada tahun n

Luas KP3KYT tahun n = Luas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{LKKWP3KYT} &= \text{Luas KKP3YT tahun n} + \text{Luas KP3KYT tahun n} \\ &= 177.469,08 \text{ Ha} + 6.462,31 \text{ Ha} \\ &= \mathbf{183.931,39 \text{ Ha}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola pada tahun 2024 adalah 183.931,39 Ha. Adapun target Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja adalah 179.659,89 Ha, dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2024 ini terealisasi 102,37% (Sangat Memuaskan).

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2024 ini dilaksanakan :

Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

1. KKP Angsana dan KKP Sungai Loban	18.751,68 Ha
2. KKP Kotabaru yaitu Pulau Laut – Pulau Sembilan	158.717,40 Ha
Total KKP Tahun 2024	177.469,08 Ha

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)

1. Kabupaten Tanah Laut	6.462,31 Ha
Total KP3K Tahun 2024	6.462,31 Ha

b. Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi

Pengertian :

Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi adalah jumlah akumulasi luas kawasan terumbu karang dan kawasan mangrove yang direhabilitasi sampai dengan tahun n dengan satuan Ha.

Rumus :

Untuk menghitung luasan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Luas Wilayah Perairan Yang Direhabilitasi} = A + B$$

Dimana :

Luas Wilayah Perairan Yang Direhabilitasi = Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi

A = Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi pada tahun n

B = Luas Kawasan Terumbu Karang Yang Direhabilitasi pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Luas Wilayah Perairan Yang Direhabilitasi} &= A + B \\ &= 42,50 \text{ Ha} + 1,80 \text{ Ha} \\ &= \mathbf{44,30 \text{ Ha}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi pada tahun 2024 adalah 44,30 Ha. Adapun target Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja adalah 32,15 Ha. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 137,79% (Sangat Memuaskan).

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pada tahun 2024 ini dilaksanakan di :

1. Rehabilitasi mangrove seluas 42,50 Ha terdiri dari:

- a. 150.000 batang mangrove di Desa Tanjung Pangga, Desa Tanjung Sungkai, Desa Tanjung Tengah, Desa Sarang Tiung dan Desa Gedambaan Kabupaten Kotabaru seluas 26,9 Ha
- b. 55.000 batang mangrove di Desa Muara Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu seluas 9,9 Ha
- c. 32.000 batang mangrove di Desa Pagatan Besar dan Desa Bawah Layung Kabupaten Tanah Laut seluas 5,7 Ha

2. Rehabilitasi terumbu karang seluas 1,80 Ha terdiri dari :

- a. Pemasangan 110 unit (0,5 Ha) transplantasi karang di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru.

- b. Pemasangan 230 unit (1,3 Ha) transplantasi karang di Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu melalui dana CSR

c. Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut.

Tabel 3.35. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2023	2024	
1	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola	194.698,09 Ha	183.931,39 Ha	102,37 %
2	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi	48,60 Ha	44,30 Ha	137,79 %
Rata-rata Capaian Kategori Capaian				120,08%
				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Selanjutnya disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya pada Tabel 3.36 :

Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut Tahun 2024 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi						Tahun 2024		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola	-	-	-	-	39.033,43 Ha	194.698,09 Ha	179.659,89 Ha	183.931,39 Ha	102,37 %
2	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi	5 Ha	4,3 Ha	0,25 Ha	7 Ha	23,10 Ha	48,60 Ha	32,15 Ha	44,30 Ha	137,79 %
Rata-rata Capaian Kategori Capaian										120,08%
										Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

Dan pada Tabel 3.37 disajikan data perkembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan pada Tabel 3.38 disajikan data perkembangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) di Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 :

Tabel 3.37. Data Perkembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kalimantan Selatan Dari Tahun 2016 - 2024

No	Tahun	Kawasan KKPD di Kalimantan Selatan (Lokasi)	Kawasan KKPD Yang di Monev Pengelolaannya	
			Jumlah	Lokasi
1	2016	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
2	2017	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
3	2018	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
4	2019	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
5	2020	5	0	-
6	2021	2	2	Kotabaru dan Tanah Bumbu
7	2022	179.659,89 Ha	27.954,48 Ha	Kotabaru dan Tanah Bumbu
8	2023	179.659,89 Ha	177.469,08 Ha	Kotabaru dan Tanah Bumbu
9	2024	179.659,89 Ha	177.469,08 Ha	Kotabaru dan Tanah Bumbu

Tabel 3.38. Data Perkembangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) di Kalimantan Selatan Dari Tahun 2016 – 2024

No	Tahun	Kawasan KP3K di Kalimantan Selatan (Lokasi)	Kawasan KP3K Yang di Monev Pengelolaannya	
			Jumlah/Luas	Lokasi
1	2016	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
2	2017	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
3	2018	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
4	2019	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
5	2020	5	0	-
6	2021	3	3	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
7	2022	57.967,24 Ha	11.078,95 Ha	Kotabaru dan Tanah Bumbu
8	2023	57.967,24 Ha	17.229,01 Ha	Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar dan Barito Kuala

9	2024	57.967,24 Ha	6.462,31 Ha	Tanah Laut
---	------	--------------	-------------	------------

Dan pada Tabel 3.39 disajikan data perkembangan luas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi selama kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 :

Tabel 3.39. Data Perkembangan Luas Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi Dari Tahun 2017 – 2024

No	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir sd. 2017	Tahun	Terumbu Karang (Ha)	Mangrove (Ha)	Total Pada Tahun n	Total sd Tahun n
1	12,353.10	sd. 2017	28	58	86	86
2		2018	2	3	5	91
3		2019	1	3.30	4.3	95.30
4		2020	0.25	—	0.25	95.55
5		2021	3	4	7	102.55
6		2022	3	20.10	23.10	125.65
7		2023	1	47.60	48.60	174.25
8		2024	1.80	42.50	44.30	218.55

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

d. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

1. Melaksanakan rehabilitasi Terumbu Karang dan Kawasan Mangrove secara terkontrol dan terus menerus

2. Melaksanakan kaji tiru teknologi pengelolaan Terumbu Karang
3. Melaksanakan monev kawasan konservasi perairan dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Mengadakan sosialisasi Kepmen KP tentang Kawasan Konservasi Perairan

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

1. Keterbatasan anggaran yang tersedia
2. Musim yang selalu berubah-ubah sehingga terkadang proses rehabilitasi tidak berjalan sesuai rencana
3. Belum tersedianya data potensi karbon di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Selatan

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Mengusulkan peningkatan anggaran pada Seksi Konservasi Ekosistem Laut, khususnya pada kegiatan rehabilitasi pada kawasan kritis mangrove dan terumbu karang,
2. Terus melaksanakan rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik di kawasan konservasi maupun di luar kawasan.
3. Melaksanakan kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi karbon di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Selatan

d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Seksi Konservasi Ekosistem Laut maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

III.2.2. Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut terdapat 1 indikator kinerja pada tahun 2024 ini, yaitu :

- a. Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
- b. Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Yang Diterbitkan
- c. Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut

Berikut pada Tabel 3.40 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.40. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%
2	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Yang Diterbitkan	8 Rekomendasi	10 Rekomendasi	125%
3	Tercatatnya Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian					108,33%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

- a. **Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi**

Pengertian :

Merupakan jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur penerbitan atau SOP perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kepada perusahaan yang mengajukan izin pemanfaatan ruang laut pada tahun n.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur penerbitan atau SOP perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Rekomendasi} = \Sigma \text{Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan atau SOP Perizinan Berusaha Yang Pada Tahun n}$$

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur penerbitan atau SOP perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Rekomendasi} &= \Sigma \text{Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan} \\ &\text{atau SOP Perizinan Berusaha Yang Pada Tahun n} \\ &= \mathbf{1 \text{ Rekomendasi}} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur penerbitan atau SOP perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 adalah 1 Rekomendasi. Adapun target jumlah rekomendasi persyaratan dan prosedur penerbitan atau SOP perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 1 Rekomendasi. Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

b. Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Yang Diterbitkan

Pengertian :

Jumlah rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kepada perusahaan yang mengajukan izin pemanfaatan ruang laut pada tahun n.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kepada perusahaan yang mengajukan izin pemanfaatan ruang laut menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Rekomendasi} &= \Sigma \text{Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut} \\ &\quad \text{Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Yang Diterbitkan} \\ &\quad \text{Pada Tahun n} \end{aligned}$$

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kepada perusahaan yang mengajukan izin pemanfaatan ruang laut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Rekomendasi} &= \Sigma \text{Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut} \\ &\quad \text{Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Yang Diterbitkan} \\ &\quad \text{Pada Tahun n} \\ &= \mathbf{10 \text{ Rekomendasi}} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kepada perusahaan yang mengajukan izin pemanfaatan ruang laut pada tahun 2024 adalah 10 Rekomendasi. Adapun target rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kepada perusahaan yang mengajukan izin pemanfaatan ruang laut yang ditetapkan

didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 8 Rekomendasi. Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 125% (Sangat Memuaskan).

c. Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut

Pengertian :

Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut adalah tercatatnya izin lokasi perairan dalam system kadaster laut yang dihasilkan pada tahun n (tahun berjalan) dengan satuan Dokumen.

Kadaster laut merupakan suatu sistem informasi kelautan yang sangat penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut oleh negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 33.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah izin lokasi perairan dalam sistem kadaster laut menggunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Dokumen = $\sum$ Izin Lokasi Perairan Dalam Kadaster Laut pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Dokumen} &= \sum \text{Izin Lokasi Perairan Dalam Kadaster Laut pada tahun n} \\ &= \mathbf{1 \text{ Dokumen}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Kadaster Laut pada tahun 2024 adalah 1 Dokumen. Adapun target Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Kadaster Laut yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 1 Dokumen. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut.

Tabel 3.41. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2023	2024	
1	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	1 Rekomendasi	100%
2	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Yang Diterbitkan	-	10 Rekomendasi	125%
3	Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	3 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian				108,33%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Selanjutnya disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya pada Tabel 3.42 :

Tabel 3.42. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2024 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi						Tahun 2024		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%
2	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-	8 Rekomendasi	10 Rekomendasi	125%
3	Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	-	-	-	-	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian										108,33%
Kategori Capaian										Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Pemanfaatan laut merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada di laut, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memiliki kaitan dengan laut.

Dalam rangka penataan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan diberlakukannya PERMEN KP No. 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyatakan jika semua perizinan lokasi yang dilakukan harus sepengetahuan ijin Menteri Kelautan dan Perikanan.

Maka pada tahun 2024 ini, pada Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut telah:

1. Membuat 1 SOP dalam rangka Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut Yang Menjadi Kewenangan Provinsi berupa SOP Surat Rekomendasi Keterangan Pola Ruang Laut.
2. Melakukan rekomendasi kepada pengaju permohonan izin lokasi dan izin pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (disajikan pada tabel 3.43)
3. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut pada orang per-orangan, koperasi, korporasi serta instansi pemerintahan.
4. Melaksanakan Sosialisasi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042.

Tabel 3.43. Data Pengaju Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024

No	Nama Pengaju	Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Kesesuaian Ruang Perairan	Kegiatan
1	PT. TATA BUMI KHATULISTIWA	permohonan	STS
2	DIAJENG DESIANA		Pengangkatan bahan material besi karena kapal karam
3	TELKOM INDONESIA	Permohonan Rekomendasi SKKL SUB-2	Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sub-2
4	PT. SEBAMBAN TERMINAL UTAMA	Permohonan Keterangan	Tersus
5	PT. PRIBUMI CITRA MEGAH UTAMA	Permohonan Rekomendasi dan Keterangan Pola Ruang Laut	Tersus
6	PT. DUTA TUJUH BERSAUDARA SEJATI	Permohonan Rekomendasi dan Keterangan Pola Ruang Laut	Tersus
7	PT. BAYAN RESOURCES Tbk	Permohonan Surat Keterangan	Tersus
8	PT. SINAR MAS AGRIBUSINESS AND FOOD	Permohonan Keterangan Zona Pola Ruang Laut	dumping area
9	PT. HUMPUSS TRADING	Permohonan Keterangan Zona Pola Ruang Laut	Sandar Kapal Tanki Induk (Oil Barge) Floating Storage Offloading

10	PT. JORONG BARUTAMA GRESTON	Permohonan Data Untuk Pengajuan PKKPR	Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area)
----	-----------------------------	---------------------------------------	---

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

1. Perlu adanya produk hukum turunan terkait pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
2. Masih rendahnya kesadaran bagi para pemanfaat ruang laut atas kewajiban pelaksanaan regulasi yakni izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPR) terhadap pemanfaatan ruang laut baik itu pelaku usaha/swasta maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah
3. ☐ Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi terkait potensi dan sumberdaya serta pemanfaatan ruang laut di wilayah kewenangan provinsi 0-12 mil
4. Terbatasnya porsi anggaran yang didapatkan menyebabkan masih kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam rangka menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan inventarisasi kegiatan reklamasi, maka akan dilaksanakan penyebaran informasi melalui website resmi untuk kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Diperlukan produk hukum turunan seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah tambahan untuk mengatur pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara lebih teknis dan spesifik guna memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
3. Sosialisasi peraturan yang berlaku kepada pengguna ruang laut
4. Perlunya data dan informasi yang diperbaharui terkait ruang laut pada wilayah kewenangan provinsi 0-12 mil.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi

	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
		Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
		Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut

III.2.3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat 3 indikator kinerja pada tahun 2024 ini, yaitu :

- Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Berikut pada Tabel 3.44 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024:

Tabel 3.44. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah	105 Orang	105 Orang	100%

		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	4 Kelompok	100%
3	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	5 Kelompok	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

a. Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengertian :

Merupakan jumlah orang yang mengikuti sosialisasi mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan nilai post tes >80 pada tahun n (tahun berjalan) dengan satuan orang

Rumus :

Untuk menghitung jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Orang} = \sum \text{Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dengan Nilai Post Tes >80 pada tahun n.}$$

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Orang} &= \sum \text{Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Mitigasi Bencana Wilayah} \\ &\quad \text{Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dengan Nilai Post Tes } > 80 \text{ pada} \\ &\quad \text{tahun } n \\ &= \mathbf{105 \text{ Orang}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2024 adalah 105 Orang. Adapun target jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja adalah 105 Orang. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

b. Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengertian :

Merupakan jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibina mengenai penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun n (tahun berjalan) dengan satuan kelompok.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Kelompok} &= \sum \text{Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan} \\ &\quad \text{Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-} \\ &\quad \text{Pulau Kecil pada tahun } n\end{aligned}$$

Capaian Kinerja :

Realisasi Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Kelompok} &= \sum \text{Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan} \\ &\quad \text{Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan} \\ &\quad \text{Pulau-Pulau Kecil pada tahun } n \\ &= \mathbf{4 \text{ Kelompok}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2024 adalah 4 kelompok. Adapun target jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja adalah 4 Kelompok. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

c. Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pengertian :

Merupakan jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun n

Rumus :

Untuk menghitung jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Kelompok} &= \sum \text{Kelompok Masyarakat Yang Memperoleh Pendampingan,} \\ &\quad \text{Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi} \\ &\quad \text{Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan} \\ &\quad \text{pada tahun } n\end{aligned}$$

Capaian Kinerja :

Realisasi Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kelompok} &= \sum \text{Kelompok Masyarakat Yang Memperoleh} \\ &\quad \text{Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,} \\ &\quad \text{Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan} \\ &\quad \text{Pendidikan dan Pelatihan pada tahun } n \\ &= \mathbf{5 \text{ Kelompok}} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 adalah 5 kelompok. Adapun target jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja adalah 5 Kelompok. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tabel 3.45. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2023	2024	
1	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	105 Orang	100%
2	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	4 Kelompok	100%
3	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	5 Kelompok	100%

			Rata-rata Capaian	100%
			Kategori Capaian	Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya pada Tabel 3.46:

Tabel 3.46. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	60 orang	150 orang	90 orang	90 orang	105 orang	105 orang	100 %
2	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Lokasi	3 Lokasi	3 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	100%
3	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan	-	-	-	-	5 Kelompok	5 Kelompok	100%

	Pendidikan dan Pelatihan							
Rata-rata Capaian								100%
Kategori Capaian								Sangat Memuaskan

Dan pada Tabel 3.47 disajikan data perkembangan jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan pada Tabel 3.48 disajikan data perkembangan jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 3.47. Data Perkembangan Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Tahun	Target Lokasi/Kelompok Yang Masyarakat Pesisirnya Dibina	Realisasi Lokasi/Kelompok Yang Masyarakat Pesisirnya Dibina	
			Jumlah	Lokasi
1	2018	4 Lokasi	4 Lokasi	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
2	2019	3 Lokasi	3 Lokasi	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
3	2020	2 Lokasi	-	-
4	2021	3 Lokasi	3 Lokasi	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
5	2022	3 Kelompok	3 Kelompok	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
6	2023	4 Kelompok	4 Kelompok	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
7	2024	4 Kelompok	4 Kelompok	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

Tabel 3.48 Data Perkembangan Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Tahun	Jumlah Peserta Sosialisasi Mitigasi Bencana (Orang)	Jumlah Peserta Dengan Nilai Post Test >80 (Orang)
1	2018	60 Orang	60 Orang
2	2019	60 Orang	60 Orang
3	2020	60 Orang	60 Orang
4	2021	150 Orang	150 Orang
5	2022	90 Orang	90 Orang
6	2023	90 Orang	90 Orang
7	2024	105 Orang	105 Orang

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2024 ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah :

- a) Kegiatan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diikuti oleh 105 orang dan dilaksanakan di 3 kabupaten, yaitu :
 1. Desa Sungai Teras Luar Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala
 2. Desa Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
 3. Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru
- b) Kegiatan penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada 4 kelompok, yaitu :
 1. Kelompok Taruna Mangrove Desa Sungai Bakau Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
 2. Kelompok Bakau Lestari Desa Kuala Lupak Kabupaten Barito Kuala
 3. Kelompok PAMALI, Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru
 4. Kelompok Pokmaswas Karang Indah Lestari Desa Sungai Dua Laut Kabupaten Tanah Bumbu.
- c) Kegiatan pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada 5 kelompok, yaitu:
 1. Kelompok Nelayan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru

2. Kelompok Usaha Bersama Desa Rantau Panjang Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
3. Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut
4. Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru
5. Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

1. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya mitigasi
2. Terbatasnya porsi anggaran yang didapatkan menyebabkan masih kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pembinaan dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada kelompok-kelompok yang telah terbentuk.
2. Melaksanakan sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan penyadartahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

IV. BIDANG PERIKANAN TANGKAP

IV.1. SASARAN KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Tabel 3.49. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perikanan Tangkap

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	220.000 Ton
2	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	99,00

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Berikut pada Tabel 3.50 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan pada kinerja utama dan indikator kinerja Kepala Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

Tabel 3.50. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Bidang Perikanan Tangkap

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	220.000 Ton	218.022 **) Ton	99,10%
2	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	99,00	98,96	99,96%
Rata-rata Capaian					99,53%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap (2024)

Keterangan : **) Angka Sementara berdasarkan Data per bulan Pebruari 2025

a. Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Pengertian :

Merupakan jumlah hasil produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum daratan yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun n (tahun berjalan)

Rumus :

$$A = B + C$$

Dimana :

A : Total Produksi Perikanan Tangkap pada tahun n

B : Produksi Perikanan Tangkap di Laut pada tahun n

C : Produksi Perikanan Tangkap di PUD pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah total produksi perikanan hasil produksi perikanan tangkap dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$A = B + C$$

$$A = 158.250 \text{ Ton} + 59.772 \text{ Ton}$$

$$A = \mathbf{218.022 \text{ Ton}}$$

Berikut disajikan data produksi perikanan tangkap di laut dan di perairan umum daratan yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

Tabel 3.51. Data Produksi Perikanan Tangkap di Laut dan di PUD Pada Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2024 **) Ton		
		Tangkap Laut	Tangkap PUD	Total
1	Balangan	-	738,4	738,4
2	Banjar (Martapura)	7.616,9	1.607,9	9.224,9
3	Barito Kuala	3.538,1	5.108,0	8.646,1
4	Hulu Sungai Selatan	-	12.561,2	12.561,2
5	Hulu Sungai Tengah	-	8.370,3	8.370,3
6	Hulu Sungai Utara	-	12.568,2	12.568,2
7	Banjarbaru	-	351,7	351,7
8	Banjarmasin	17,7	1.606,0	1.623,8
9	Kotabaru	68.709,2	6.415,9	75.125,1
10	Tabalong	-	2.056,4	2.056,4

11	Tanah Bumbu	44.775,0	2.623,4	47.398,4
12	Tanah Laut	33.593,4	2.162,5	35.755,9
13	Tapin	-	3.602,0	3.602,0
	Total	158.250	59.772	218.022

Sumber Data: Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

Keragaan jumlah total produksi perikanan hasil produksi perikanan tangkap dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

Target = 220.000 Ton

Realisasi = 218.022 **) Ton

Dan untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator jumlah produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{218.022}{220.000} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \mathbf{99,10\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja jumlah total produksi perikanan tangkap dari seluruh kab/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 99,10% (Sangat Memuaskan).

Angka realisasi untuk produksi perikanan tangkap ini masih bersifat sementara karena belum dilakukan validasi ditingkat nasional, kegiatan validasi biasanya dilaksanakan pada semester II (bulan Maret tahun n+), sehingga masih memungkinkan untuk terjadi peningkatan di produksi tangkap ini.

Dan berikut pada Tabel 3.52 disajikan data perkembangan jumlah total produksi perikanan tangkap di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2017 sd Tahun 2024.

Tabel 3.52. Data Perkembangan Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017 sd Tahun 2024

Uraian	Tahun (Ton)							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi di Laut	179.696,11	186.453	127.139	136.949	157.645	144.588	148.692	158.250

Produksi di PUD	67.914,89	75.697	83.130	70.280	60.901	62.666	61.405,47	59.772
Total Produksi Perikanan Tangkap	247.811	262.149	210.269	207.229	218.546	207.254	210.097,47	218.022

b. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pengertian :

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) yang dihasilkan pada tahun n (tahun berjalan)

Rumus :

$$NTN = \frac{It \text{ NTN}}{Ib \text{ NTN}} \times 100\%$$

Dimana :

It NTN : Indeks harga yang diterima oleh nelayan

Ib NTN : Indeks harga yang dibayar oleh nelayan

Capaian Kinerja :

Realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2024 adalah :

$$NTN = \frac{It \text{ NTN}}{Ib \text{ NTN}} \times 100\%$$

$$NTN = \frac{121,17}{122,44} \times 100\%$$

$$NTN = \mathbf{98,96}$$

Keragaan NTN pada tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Target} = 99,00$$

$$\text{Realisasi} = 98,96$$

Dan untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator nilai tukar nelayan pada tahun 2024 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{98,96}{99,00} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \mathbf{99,96\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja nilai tukar nelayan adalah sebesar 99,96% (Sangat Memuaskan).

Dan berikut pada Tabel 3.54 disajikan data perkembangan nilai tukar nelayan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sd Tahun 2024.

Tabel 3.54. Data Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2020 sd Tahun 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
NTN	98,90	102,08	97,29	98,99	98,96

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Bidang Perikanan Tangkap:

Tabel 3.56. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		% Capaian
			2023	2024	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	210.097,47	218.022	99,10%
2	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,99	98,96	99,96%
Rata-rata Capaian					99,53%
Kategori Capaian					Sangat

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.57 disajikan perbandingan realisasi kinerja yang dicapai oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.57. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi						% Capaian
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	210.269	207.229	218.546	207.254	210.097,47	218.022	99,10%
2	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	112,10	98,90	102,08	97,29	98,99	98,96	99,96%
Rata-rata Capaian									99,53%
Kategori Capaian									Sangat Memuaskan

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

• Produksi Perikanan Tangkap

Jumlah total produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 ini masih bersifat angka sementara, karena belum dilaksanakan validasi satu data statistik kelautan dan perikanan di tingkat pusat untuk tahun 2024 ini, pelaksanaan validasi satu data baru akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun n+1 berikutnya (bulan Maret tahun 2025).

Sejauh ini upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah dengan cara meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan melalui penyediaan paket bantuan sarana perikanan tangkap ramah lingkungan, pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum melalui pelepasliaran (restocking) ikan lokal di reservat perairan umum serta melaksanakan kegiatan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM nelayan untuk meningkatkan kemandirian usahanya.

- **Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang dihasilkan berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2024 adalah 98,96. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 untuk target NTN adalah 99,00 dan realisasi NTN tahun 2024 adalah 98,96 maka capaian persennya hanya sebesar 99,96%. Angka yang didapatkan ini merupakan angka mutlak dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terutama Bidang Perikanan Tangkap melakukan koordinasi dengan BPS akan data lapangan yang didapatkan oleh Tim BPS dalam melakukan perhitungan survei di lapangan, mengingat angka NTN ini menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan nelayan.

- b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja**

- Terjadinya penurunan kegiatan penangkapan ikan karena factor cuaca dan iklim yang menyebabkan kegiatan penangkapan ikan cukup berkurang secara signifikan.
- Adanya pembatasan tangkapan ikan di laut dengan adanya Maksimum Sustainable Yield (MSY) atau Potensi Lestari Sumberdaya Ikan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah 270.000 Ton, dengan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) untuk program sumberdaya perikanan berkelanjutan, dengan indikator kinerja proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu $\leq 72\%$.

Pada tahun 2024 ini perhitungan untuk JTB dari Potensi Lestari :

$$\text{JTB} = \frac{218.022 \text{ Ton}}{270.000 \text{ Ton}} \times 100\%$$

$$\text{JTB} = 80,74\%$$

Dari hasil produksi perikanan tangkap Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah 218.022 Ton, maka 80,74% hasil yang didapat dari potensi lestari.

- c. Rencana Tindak Lanjut**

- Mengusulkan peningkatan anggaran pada Bidang Perikanan Tangkap, khususnya pada kegiatan restocking ikan dan pengadaan alat tangkap ikan di perairan darat
- Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan BPS Provinsi Kalimantan Selatan

- 4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja**

Untuk mendukung capaian kinerja di Bidang Perikanan Tangkap, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT

IV.2. SASARAN KEPALA SEKSI LINGKUP BIDANG PERIKANAN TANGKAP

IV.2.1. Kepala Seksi Kenelayanan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Kenelayanan terdapat 3 indikator kinerja pada tahun 2024 ini, yaitu:

- Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
- Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan
- Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia

Berikut pada Tabel 3.58 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Kenelayanan pada Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

Tabel 3.58. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Kenelayanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan	240 Rekomendasi	522 Rekomendasi	230%
3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian					143,33%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

a. Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi

Pengertian :

Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi adalah jumlah dokumen standar operasional prosedur (SOP) selama 1 (satu) tahun sebagai acuan/standarisasi penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi yang dihasilkan pada tahun n (tahun berjalan).

Dokumen SOP Izin Usaha Perikanan Tangkap Kapal Perikanan yang diterbitkan merupakan pedoman teknis dalam penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi sehingga terwujud pelayanan prima (exelent service), harmonisasi dan integritas perizinan pusat dan daerah.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi menggunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Dokumen = Jumlah Dokumen SOP Yang Diterbitkan pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Dokumen} &= \text{Jumlah Dokumen SOP Yang Diterbitkan pada tahun } n \\ &= \mathbf{2 \text{ Dokumen}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi pada tahun 2024 adalah 2 Dokumen. Adapun target jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi adalah 2 Dokumen. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

b. Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan

Pengertian :

Jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan adalah jumlah surat rekomendasi izin usaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi yang diterbitkan pada tahun n (tahun berjalan).

Rumus :

Untuk menghitung jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Rekomendasi} = \text{Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan pada tahun } n$$

Capaian Kinerja :

Realisasi Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Rekomendasi} = \text{Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan pada tahun } n$$

= 552 Rekomendasi

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan pada tahun 2024 adalah 522 Rekomendasi. Adapun target jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja adalah 240 Rekomendasi. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja tahun 2024 adalah 230% (Sangat Memuaskan).

c. Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia

Pengertian :

Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia adalah jumlah data kenelayanan yang terbaru sebagai media informasi pada tahun n (tahun berjalan). Data dan informasi terkait berupa jumlah izin usaha perikanan yang diterbitkan (menurut ukuran kapal, profil usaha, alat penangkapan ikan), Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap, Jumlah Peserta Pelatihan ANKAPIN Tk. III, Jumlah Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Jumlah Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Dokumen = Layanan Data Yang Tersedia pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Jumlah Dokumen = Layanan Data Yang Tersedia pada tahun n
= 4 Dokumen

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia pada tahun 2024 adalah 4 Dokumen. Adapun target jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja adalah 4 Dokumen. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Seksi Kenelayanan.

Tabel 3.59. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Kepala Seksi Kenelayanan

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2023	2024	
1	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan	411 Rekomendasi	552 Rekomendasi	230%
3	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	7 Dokumen	4 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian				143,33%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya untuk Kepala Seksi Kenelayanan.

Tabel 3.60. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Capaian Kinerja %
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan	239 Rekomendasi	338 Rekomendasi	563 Rekomendasi	411 Rekomendasi	552 Rekomendasi	230%
3	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	0 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	100%

	Rata-rata Capaian	143%
	Kategori Capaian	Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

1. Indikator jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi terealisasi dengan capaian 100% (2 dokumen). Dokumen yang diterbitkan berupa 2 dokumen SOP, yaitu:

- ✚ SOP SIUP

- ✚ SOP Baru SIPI dan SIKPI

2. Indikator jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan terealisasi dengan capaian 230% (552 rekomendasi). Penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan sebanyak 552 rekomendasi yang terdiri dari :

- ✚ Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sebanyak 34 Rekomendasi.

- ✚ Penerbitan rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (SIPI-WPPNRI) sebanyak 66 Rekomendasi.

- ✚ Penerbitan rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan antar Pelabuhan Perikanan (SIKPI-PP) sebanyak 87 Rekomendasi.

- ✚ Penerbitan Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (eBKP-NK) sebanyak 365 Dokumen.

3. Indikator jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia terealisasi dengan capaian 100% (4 dokumen). Dokumen berupa:

- ✚ Data KUB (Kelompok Usaha Bersama),

- ✚ Data seHAT Nelayan,

- ✚ Data BPAN dan

- ✚ Data Perijinan Kapal Perikanan.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2024 ini tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Kepala Seksi Kenelayanan dalam rangka pencapaian target kinerja karena capaian kinerja pada tahun 2024 ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Namun dengan terbatasnya porsi anggaran yang didapatkan menyebabkan masih kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Seksi Kenelayanan.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Terus menerus melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap terutama kepada pemilik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sd 30 GT,
2. Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pelaku usaha perikanan tangkap berupa pelayanan berbasis on-line, dengan layanan berbasis on-line ini pelaku usaha sangat dimudahkan dalam melakukan pengajuan penerbitan perizinan berusaha.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Seksi Kenelayanan maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT

IV.2.2. Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan terdapat 2 indikator kinerja pada tahun 2024 ini, yaitu :

- a. Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil
- b. Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat

Berikut pada Tabel 3.61 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan pada Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.61. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

a. Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil

Pengertian :

Tersedianya laporan yang menyampaikan informasi mengenai perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut yang dilaksanakan pada tahun n.

Laporan berupa buku statistik produksi perikanan tangkap laut yang dihimpun dari data produksi perikanan tangkap laut kabupaten/kota di Kalimantan Selatan

Rumus :

Untuk menghitung jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah laut sd 12 Mil menggunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Dokumen = Jumlah laporan statistik perikanan tangkap laut yang tersedia pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah laut sd 12 Mil pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jumlah Dokumen = Jumlah laporan statistik perikanan tangkap laut yang tersedia pada tahun n
= **1 Dokumen**

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah laut sd 12 Mil pada tahun 2024 adalah 1 Dokumen. Adapun target jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di

wilayah laut sd 12 Mil di dalam Perjanjian Kinerja adalah 1 Dokumen. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

b. Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat

Pengertian :

Tersedianya laporan yang menyampaikan informasi mengenai perkembangan hasil produksi perikanan tangkap perairan umum daratan yang dilaksanakan pada tahun n.

Laporan berupa buku statistik produksi perikanan tangkap perairan umum daratan yang dihimpun dari data produksi perikanan tangkap perairan umum daratan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan

Rumus :

Untuk menghitung jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah perairan darat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Dokumen} = \text{Jumlah laporan statistik perikanan tangkap perairan umum daratan yang tersedia pada tahun n}$$

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah perairan darat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Rekomendasi} &= \text{Jumlah laporan statistik perikanan tangkap perairan umum daratan yang tersedia pada tahun n} \\ &= \mathbf{1 \text{ Dokumen}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah perairan darat pada tahun 2024 adalah 1 Dokumen. Adapun target jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah perairan darat di dalam Perjanjian Kinerja adalah 1 Dokumen. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan.

Tabel 3.62. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2023	2024	
1	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian				100%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya untuk Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan.

Tabel 3.63. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Capaian Kinerja %
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian							100%

	Kategori Capaian	Sangat Memuaskan
--	------------------	------------------

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap, maka Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan telah melaksanakan kegiatan :

1. Pertemuan pendataan statistic perikanan tangkap, kegiatan dilaksanakan dalam rangka menghimpun data produksi perikanan tangkap (di perairan laut dan di perairan umum daratan) dari seluruh kabupaten/kota se Kalimantan Selatan, sehingga dapat diketahui angka produksi perikanan tangkap (di perairan laut dan di perairan umum daratan) di Kalimantan Selatan
2. Temu Koordinasi Log Book Penangkapan Ikan LBPI di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru
3. Temu Koordinasi Pengelolaan WPPNRI 713 dan WPPNRI 712 Provinsi Kalimantan Selatan
4. Pembinaan Log Book di 3 (tiga) KUB di Kabupaten Banjar
5. Kegiatan Sosialisasi Kelestarian Sumberdaya Ikan di Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2024 ini tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan dalam rangka pencapaian target kinerja karena capaian kinerja pada tahun 2024 ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan pertemuan berkelanjutan pada kegiatan statistic perikanan tangkap
2. Melaksanakan pertemuan berkelanjutan pada kegiatan pembinaan log book penangkapan ikan

4). Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan (di Laut)
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Untuk Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan (di PUD)

IV.2.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap terdapat 2 indikator kinerja pada tahun 2024 ini, yaitu :

- Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd. 12 Mil
- Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Perairan Umum Daratan (PUD)

Berikut pada Tabel 3.65 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap pada Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.65. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Target Perubahan 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	14 Unit	34 Unit	34 Unit	100%
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	3 Unit	8 Unit	8 Unit	100%
Rata-rata Capaian						100%

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

a. Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah Laut sd. 12 Mil

Pengertian :

Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 Mil adalah jumlah unit bantuan hibah sarana usaha perikanan tangkap di perairan laut yang diserahkan kepada kelompok masyarakat pada tahun n (tahun berjalan).

Rumus :

Untuk menghitung jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 Mil menggunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Unit Hibah = Jumlah Unit Hibah Yang Diserahkan pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 Mil pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jumlah Unit Hibah = Jumlah Unit Hibah Yang Diserahkan pada tahun n
= **34 Unit**

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 Mil pada tahun 2024 adalah 34 Unit. Adapun target jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 Mil adalah 34 Unit. Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

Kegiatan dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten, yaitu di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan di Kabupaten Kotabaru, dengan nama kelompok nelayan yang menerima bantuan hibah sebagai berikut :

❖ **Hibah Bantuan Alat Tangkap Ikan Perairan Laut (Gillnet/Trammel Net)**

1. KUB Kayuh Baimbai Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru

2. KUB Harapan Desa Sungai Pinang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru
3. KUB Pada Idi Desa Pudi Seberang Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru
4. KUB Rintis Maju Desa Karang Payau Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru
5. KUB Harapan Jaya Segumbang Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
6. KUB Kakap Merah Desa Pejala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
7. KUB Antasan Desa Pulau Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu

❖ **Hibah Bantuan Mesin Kapal Perairan Laut**

1. KUB Hidup Bersama Nelayan Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
2. KUB Doa Ibu Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
3. KUB Rajungan Betung Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
4. KUB Rajungan Barat Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
5. KUB Ketamba Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
6. KUB Ikan Todak Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
7. KUB Karya Muda Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
8. KUB Kakap Merah Delima Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
9. KUB Rampa Laut Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
10. KUB Dermaga Harapan Sukses Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
11. KUB Group Senja Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
12. KUB Sumber Laut Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
13. KUB Lautan Lestari Dua Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
14. KUB Citra Kumpul Bersama Nelayan Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
15. KUB Pancing Kakap Merah Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
16. KUB Laut Luas Dihati Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru

17. KUB Putra Laut Mandar Desa Rampa Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru
18. KUB Lobster III Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
19. KUB Koleksi Mina Laut Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
20. KUB Sumber Usaha Bersama Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut
21. KUB Bina Harapan Bersama Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut

❖ **Hibah Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan**

1. KUB Mutiara Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru
2. KUB Putra Sinar Laut Desa batuah Kecamatan kusan hilir Kabupaten Kotabaru
3. KUB Putra Bagang Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
4. KUB Putra Wiritasi Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
5. KUB Padaidi Selalu Jaya Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
6. KUB Karya Bagan Tancap Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau laut Sigam Kabupaten Kotabaru

b. Jumlah Sarana Usaha Penangkapan Yang Tersedia Di Wilayah Perairan Darat

Pengertian :

Jumlah sarana usaha penangkapan yang tersedia di wilayah perairan darat adalah jumlah unit bantuan hibah sarana usaha perikanan tangkap di perairan umum daratan yang diserahkan kepada kelompok masyarakat pada tahun n (tahun berjalan)

Rumus :

Untuk menghitung jumlah sarana usaha penangkapan yang tersedia di wilayah perairan darat menggunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Unit Hibah = Jumlah Unit Hibah Yang Diserahkan pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah sarana usaha penangkapan yang tersedia di wilayah perairan darat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Unit Hibah} &= \text{Jumlah Unit Hibah Yang Diserahkan pada tahun } n \\ &= \mathbf{8 \text{ Unit}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah sarana usaha penangkapan yang tersedia di wilayah perairan darat pada tahun 2024 adalah 8 Unit. Adapun target jumlah sarana usaha penangkapan yang tersedia di wilayah perairan darat adalah 8 Unit. Dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan nama kelompok nelayan yang menerima bantuan hibah adalah :

❖ Hibah Bantuan Alat Tangkap Ikan (Gillnet/Trammel Net dan Tempirai) di Perairan Darat

1. KUB Baruh Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. KUB Lancar Jaya Desa Tanirah Kubah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. KUB Sumber Usaha Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

❖ Hibah Bantuan Perahu Bermotor Perairan Darat dan Mesin Perahu

1. KUB Pencari Nafkah Desa Bangkau Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. KUB Rakat Bebarakat Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. KUB Bina Warga Desa Bejayau Lama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. KUB Perikanan Jaya Indah Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5. KUB Karya Bersama Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2). Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

Tabel 3.66. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2023	2024	
1	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	9 Unit	34 Unit	100%
2	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	4 Unit	8 Unit	100%
Rata-rata Capaian				100%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

Pada Tabel 3.66 realisasi kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap pada tahun 2024 ini, untuk kegiatan jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 mil jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 ada peningkatan sebanyak 25 unit, pada tahun 2023 hanya 9 unit dan pada tahun 2024 ini menjadi 34 unit. Sedangkan untuk kegiatan jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 juga ada peningkatan sebanyak 4 unit, dimana pada tahun 2023 hanya sebanyak 4 unit dan pada tahun 2024 menjadi 8 unit.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya pada Tabel 3.67:

Tabel 3.67. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Tahun 2024 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi						Tahun 2024		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang	18 Unit	8 Unit	0 Unit	12 Unit	6 Unit	9 Unit	34 Unit	34 Unit	100%

	Tersedia di Wilayah Laut sd. 12 Mil									
2	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	-	-	-	5 Unit	2 Unit	4 Unit	8 Unit	8 Unit	100%
Rata-rata Capaian										100%
Kategori Capaian										Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

Pada Tabel 3.68 disajikan data perkembangan jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil selama kurun waktu 2018 – 2024.

Tabel 3.68. Data Perkembangan Jumlah Sarana Penangkapan Laut Yang Diserahkan Dari Tahun 2018 – 2024

No	Tahun	Jumlah Paket Hibah Sarana Penangkapan Laut Yang Diserahkan (Unit)
1	2018	18
2	2019	8
3	2020	-
4	2021	12
5	2022	6
6	2023	9
7	2024	34

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

Dan pada Tabel 3.69 disajikan data perkembangan jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan umum daratan selama kurun waktu 2018 – 2024.

Tabel 3.69. Data Perkembangan Jumlah Sarana Penangkapan Perairan Umum Daratan Yang Diserahkan Dari Tahun 2018 – 2024

No	Tahun	Jumlah Paket Hibah Sarana Penangkapan Laut Yang Diserahkan (Unit)
1	2018	-
2	2019	-
3	2020	-
4	2021	5
5	2022	2
6	2023	4

7	2024	8
---	------	---

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya optimalisasi peningkatan kinerja terus dilakukan oleh Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, terutama pada kegiatan hibah kepada masyarakat/kelompok di perairan laut berupa :

- Bantuan Alat Tangkap Ikan Perairan Laut (Gillnet/Trammel Net)
- Bantuan Mesin Kapal Perairan Laut
- Bantuan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Sedangkan kegiatan hibah kepada masyarakat/kelompok di perairan umum daratan berupa:

- Bantuan Alat Tangkap Ikan (Gillnet/Trammel Net dan Tempirai) Perairan Darat
- Bantuan Perahu Bermotor Perairan Darat dan Mesin Perahu

Kegiatan hibah ini dalam rangka meningkatkan produksi perikanan di bidang perikanan tangkap. Permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan di Kalimantan Selatan sedikit demi sedikit mulai teratasi. Harapan kedepannya dengan bantuan hibah yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan akan membantu para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2024 ini tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dalam rangka pencapaian target kinerja karena capaian kinerja pada tahun 2024 ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Namun dengan terbatasnya porsi anggaran yang didapatkan menyebabkan masih kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap terutama masih kurangnya paket bantuan hibah yang diberikan kepada nelayan disetiap tahunnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Melakukan penambahan paket bantuan yang akan diberikan kepada nelayan, baik itu untuk nelayan di perairan laut maupun nelayan di perairan umum.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Perairan Laut)
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)

V. BIDANG PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP)

V.1. SASARAN KEPALA BIDANG PSDKP

Tabel 3.70. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang PSDKP

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	100%

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Berikut pada Tabel 3.71 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan pada kinerja utama dan indikator kinerja Kepala Bidang PSDKP berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.71. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Bidang PSDKP

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap	100%	100%	100%

	Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku			
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang PSDKP 2024

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku

Pengertian :

Perbandingan antara jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang memenuhi peraturan perundang-undangan di wilayah perairan laut sd 12 mil, dengan total jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa kepatuhannya, di kali 100%.

Kepatuhan (*compliance*) usaha perikanan adalah kesesuaian kegiatan usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang terdiri dari pelaku usaha di bidang penangkapan ikan, pelaku usaha di bidang pengolahan hasil perikanan dan pelaku usaha di bidang pembudidayaan ikan

Rumus :

Untuk menghitung persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan per-uu yang berlaku menggunakan persamaan berikut :

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n (\frac{C_i}{S_i} \cdot 100\%)}{n}$$

Dimana:

Xpsdp = Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan per-uu yang berlaku

C_i = Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh

S_i = Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa kepatuhannya

i = Jenis komponen pelaku usaha kelautan dan perikanan

n = Jumlah komponen pelaku usaha kelautan dan perikanan

Capaian Kinerja :

Realisasi pada tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{390/390 \times 100\% + 2.605/72.605 \times 100\% + 529/529 \times 100\%}{3}$$

$$X = \frac{100 + 100 + 100}{3}$$

$$X = \frac{300}{3}$$

$$X = 100\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 ini adalah 100%. Adapun target yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah 100%, dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2024 ini adalah 100% (Sangat Memuaskan).

Berikut disajikan data hasil evaluasi kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan per-UU yang berlaku berdasarkan objek yang diperiksa.

Hasil Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Per-UU Yang Berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No.	Uraian	Objek Yang Diperiksa	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang Diperiksa Kepatuhan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang Patuh	Persentase % Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=((5)/(4))* 100%
1.	Persentase Kepatuhan Operasional Kapal Perikanan Terhadap Per-UU (X _i)	Jumlah kepemilikan kapal penangkapan ikan nelayan di laut berdasarkan ukuran (unit)			
		10 – 30 GT	390	390	100,00
		Rata-rata X _i			100,00
2.	Persentase Kepatuhan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Terhadap Per-UU (X _o)	Pengolah Hasil Perikanan	482	482	100,00
		Pemasar Hasil Perikanan	47	47	100,00

Rata-rata x_o					100,00
3.	Persentase Kepatuhan Usaha Pembudidaya Ikan Terhadap Per-UU (x_b)	Pembudidaya Ikan Air Tawar	2.031	2.031	100,00
		Pembudidaya Ikan Air Payau	571	571	100,00
		Pembudidaya Ikan di Laut	3	3	100,00
Rata-rata x_p					100,00
$X_{psdp} = ((x_i) + (x_o) + (x_p)) / 3$					100,00
Rata-rata Capaian					100,00
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang PSDKP Tahun 2024

Data Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	
1	Jumlah Unit Kapal Perikanan (10 – 30 GT) Yang Diperiksa Kepatuhan Terhadapa Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku	Jumlah Unit Kapal Perikanan 10 – 30 GT = 390 Unit, dengan rincian sebagai berikut :	
		PP Kotabaru	58 Unit
		PP Batulicin	221 Unit
		PP Muara Kintap	37 Unit
		PP Banjarmasin	74 Unit
2	Jumlah Pembudidayaan Ikan Yang Mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Diperiksa Kepatuhan Terhadapa Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku	Jumlah Pembudidayaan Ikan = 2.605 Buah, dengan rincian sebagai berikut :	
		Pembudidayaan Ikan Air Tawar	2.031 Buah
		Pembudidayaan Ikan Air Payau	571 Buah
		Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Buah
3	Jumlah Unit Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan Provinsi Yang Mempunyai Izin Usaha Perikanan Provinsi Yang Diperiksa Kepatuhan Terhadapa Peraturan Perundangan Yang Berlaku	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan = 529 Unit, dengan rincian sebagai berikut :	
		Unit Usaha Pengolahan	482 Unit
		Unit Usaha Pemasaran	47 Unit

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2024 untuk Kepala Bidang PSDKP :

Tabel 3.72. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		% Capaian
			2023	2024	

1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.74 disajikan perbandingan realisasi kinerja yang dicapai oleh Kepala Bidang PSDKP pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 3.73. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi						% Capaian
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	-	98%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian									100%
Kategori Capaian									Sangat Memuaskan

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang seluruhnya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Keterbatasan sumberdaya untuk mengawasi perairan laut sampai dengan 12 mil tentunya mengharuskan Dinas Kelautan dan Perikanan meningkatkan koordinasi pengawasan dengan Dinas Perikanan di Kabupaten/Kota, serta

aparatus dari instansi terkait. Selain itu, memberdayakan dan mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terus ditingkatkan.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lapangan perlu didukung dengan SDM aparatur pengawas perikanan yang memadai. Namun demikian dari 13 kabupaten/kota, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2024 hanya memiliki 6 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Kondisi ini tentunya kurang dari ketersediaan ideal untuk menjaga dan mengamankan aktifitas IUU Fishing dan Destructive Fishing yang masih terus terjadi di Kalimantan Selatan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang yaitu:

- Meningkatkan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, melalui penguatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, penggerakan keaktifan POKMASWAS Perikanan dalam membantu pengawasan di lapangan, serta gelar operasi terpadu di perairan laut sampai dengan 12 mil dan perairan umum lintas kabupaten/kota.
- Fasilitasi penanganan dan penyelesaian konflik, supervisi proses pemberkasan kasus pelanggaran IUU Fishing dan Destructive Fishing sampai dengan P.21, serta pembinaan penegakan hukum dengan pendekatan preventive melalui kegiatan PSDKP mengajar dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
- Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengawasan bagi aparatur pengawas perikanan dan POKMASWAS dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lapangan.

Berikut data pelaku usaha perikanan yang patuh terhadap peraturan per-UU yang berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

Tabel 3.74. Data Pelaku Usaha Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Per-UU di Provinsi Kalimantan Selatan Pada Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Diperiksa (orang)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Diperiksa yang Patuh (orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
1.	Kotabaru	2.420	2.420	100,00
2.	Tanah Bumbu	1.104	1.104	100,00
3.	Tanah Laut	715	715	100,00

No.	Kabupaten/Kota	Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Diperiksa (orang)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Diperiksa yang Patuh (orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
4	Barito Kuala	179	179	100,00
5	Banjar	730	730	100,00
6	Banjarmasin	157	157	100,00
7	Banjarbaru	209	209	100,00
8	Tapin	151	151	100,00
9	Hulu Sungai Selatan	81	81	100,00
10	Hulu Sungai Tengah	198	198	100,00
11	Hulu Sungai Utara	18	18	100,00
12	Tabalong	116	116	100,00
13	Balangan	181	181	100,00
Kalimantan Selatan		6.259	6.259	100,00

Sumber : Data Bidang PSDKP Tahun 2024

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Bidang PSDKP, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sd. 12 Mil
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya

V.2. SASARAN KEPALA SEKSI LINGKUP BIDANG PSDKP

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Target dan realisasi IKU pada Eselon IV lingkup Bidang PSDKP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.75. Target dan Realisasi IKU Eselon IV lingkup Bidang PSDKP tahun 2024

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100%
Kepala Seksi Pengawasan dan Pemantauan SDKP					
1.	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Laut sd 12 Mil	Jumlah Laporan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Laut sd 12 Mil	5	5	100,00
2.	Terlaksananya Temu Koordinasi PSDKP Kal-Sel	Jumlah Laporan Hasil Temu Koordinasi PSDKP Kal-Sel	1	1	100,00
3.	Terlaksananya Temu Pokmaswas	Jumlah Laporan Hasil Temu Pokmaswas	1	1	100,00
4.	Terlaksananya Pembinaan POKMASWAS	Jumlah Lokasi Pembinaan POKMASWAS Yang Dibina	5	5	100,00
5.	Terlaksananya Patroli/Razia Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan SDKP di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Lokasi Patroli/Razia Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan SDKP di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	6	6	100,00
6.	Terlaksananya Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan	Jumlah Lokasi Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan Yang Terawasi	3	3	100,00
7.	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Lokasi Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Terawasi	3	3	100,00
8.	Terlaksananya Konsolidasi Pokmaswas	Jumlah Lokasi Konsolidasi Pokmaswas	3	3	100,00
9.	Terlaksananya Penilaian Pokmaswas	Jumlah Lokasi Penilaian Pokmaswas	7	7	100,00
10.	Terlaksananya Koordinasi/ Konsultasi/ Bimtek/Rapat/ Pertemuan	Jumlah Lokasi Koordinasi/ Konsultasi/Bimtek/ Rapat/Pertemuan	9	9	100,00
Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum					
1.	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan Laut sd 12 Mil	100	100	100,00
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Perairan Laut sd 12 Mil	100	100	100,00
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Laut sd 12 Mil	100	100	100,00
		Jumlah Peserta Sosialisasi Yang Paham Tentang Peraturan Per- UU di Bidang Perikanan (di Perairan Laut)	100	100	100,00
		Jumlah dokumen Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang tersusun	1	1	100,00
		Sinkronisasi dan Validasi Data Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	1	1	100,00
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Umum Daratan	100	100	100,00
2.	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Perairan Umum Daratan	100	100	100,00
		Jumlah Peserta Sosialisasi Yang Paham Tentang Peraturan Per- UU di Bidang Perikanan (di Perairan Umum Daratan)	50	50	100,00

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100%
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	100	100	100,00
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan					
1.	Terlaksananya Serah Terima Pemasangan Papan Seruan Untuk POKMASWAS	Jumlah Papan Seruan Untuk POKMASWAS Yang Terpasang di Perairan Laut dan di PUD	11	11	100,00
2.	Terlaksananya Serah Terima Hibah Bantuan Perahu Motor Tahun 2024	Jumlah Perahu Motor Yang Telah Diserahkan Kepada POKMASWAS di Perairan Laut dan di PUD	6	6	100,00
3.	Terlaksananya Serah Terima Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pengawasan Untuk POKMASWAS	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pengawasan Yang Telah Diserahkan Untuk POKMASWAS di Perairan Laut dan di PUD	11	11	100,00
				Rata-rata Capaian	100,00
				Kategori Capaian	Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang PSDKP Tahun 2024

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Perbandingan realisasi IKU Eselon IV di lingkup Bidang PSDKP tahun 2024 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.76. Perbandingan Realisasi IKU Eselon IV lingkup Bidang PSDKP tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024	
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100%
Kepala Seksi Pengawasan dan Pemantauan SDKP							
1.	Jumlah Laporan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Laut sd 12 Mil	5	5	5	5	5	100,00
2.	Jumlah Laporan Hasil Temu Koordinasi PSDKP Kal-Sel	1	1	1	1	1	100,00
3.	Jumlah Laporan Hasil Temu Pokmaswas	1	1	1	1	1	100,00
4.	Jumlah Lokasi Pembinaan POKMASWAS Yang Dibina	5	5	5	5	5	100,00
5.	Jumlah Lokasi Patroli/Razia Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan SDKP di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	6	6	6	6	6	100,00
6.	Jumlah Lokasi Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan Yang Terawasi	3	3	3	3	3	100,00
7.	Jumlah Lokasi Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Terawasi	3	3	3	3	3	100,00
8.	Jumlah Lokasi Konsolidasi Pokmaswas	3	3	3	3	3	100,00
9.	Jumlah Lokasi Penilaian Pokmaswas	7	7	7	7	7	100,00
10.	Jumlah Lokasi Koordinasi/ Konsultasi/Bimtek/ Rapat/Pertemuan	9	9	9	9	9	100,00
Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum							
1.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan Laut sd 12 Mil	100	100	100	100	100	100,00

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100%
2.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Perairan Laut sd 12 Mil	100	100	100	100	100	100,00
3.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Laut sd 12 Mil	100	100	100	100	100	100,00
4.	Jumah Peserta Sosialisasi Yang Paham Tentang Peraturan Per-UU di Bidang Perikanan (di Perairan Laut)	100	100	100	100	100	100,00
5.	Jumlah dokumen Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang tersusun	-	-	-	1	1	100,00
6.	Sinkronisasi dan Validasi Data Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	-	-	1	1	1	100,00
7.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Umum Daratan	-	-	100	100	100	100,00
8.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Perairan Umum Daratan	-	-	100	100	100	100,00
9.	Jumah Peserta Sosialisasi Yang Paham Tentang Peraturan Per-UU di Bidang Perikanan (di Perairan Umum Daratan)	150	70	35	50	50	100,00
10.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	100	100	100	100,00
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan							
16.	Jumlah Papan Seruan Untuk POKMASWAS Yang Terpasang di Perairan Laut dan di PUD	5	3	3	11	11	100,00
17.	Jumlah Perahu Motor Yang Telah Diserahkan Kepada POKMASWAS di Perairan Laut dan di PUD	3	2	6	6	6	100,00
18.	Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pengawasan Yang Telah Diserahkan Untuk POKMASWAS di Perairan Laut dan di PUD	-	-	-	11	11	100,00
					Rata-rata Capaian		93,94
					Kategori Capaian		Sangat Memuaskan

Sumber Data: Bidang PSDKP Tahun 2024

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2024, capaian IKU Eselon IV lingkup Bidang PSDKP sebesar 100,00%. Capaian tahun 2024 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang

terrealisasi sebesar 93,94%. Seluruh kegiatan tahun 2024 di lingkup Bidang PSDKP dapat terealisasi 100%.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Esselon IV lingkup Bidang PSDKP, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sd. 12 Mil
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya

Tabel 3.77. Data POKMASWAS Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Pokmaswas	Nama Ketua / No. HP	Jumlah Anggota	Tahun Pembentukan	Penetapan Pembentukan (SK)	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Alamat	Sarana dan Prasarana Pokmaswas			Aktif/ Tidak Aktif
									Nama Barang	Tahun Perolehan	Sumber Dana	
1	Banjarmasin	BELAYUNG SAKTI	ASMURI / 085248025607	54 Orang				Jl. Tatah Belayung, Kecamatan Banjarmasin Selatan				Aktif
2	Banjarmasin	UDANG LESTARI	SYAHRANI / 082357864588	40 Orang				Jl. Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan				Aktif
3	Banjarmasin	RAKAT MUFAKAT	MULYADI / 082350992593	30 Orang				Jl. Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur				Aktif
4	Banjarmasin	BINA WARGA	MUHIDIN / 083142259439	25 Orang				Jl. Sei Gempa, Kecamatan Banjarmasin Utara				Aktif
5	Banjarbaru	BATU KAPUR	JAHRANIANSYAH / 08224564147	10 Orang				Jl. UPT Trans Cempaka Batu RT. 036 RW. 010 Kel. Cempaka, Kecamatan Cempaka				Aktif
6	Banjarbaru	R.O. ULIN	RUSTAMAJI / 082153274951	11 Orang				Jl. Sidodadi 1 RT. 002 RW. 006 Kel. Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan				Aktif
7	Banjarbaru	MAJU BERSAMA	M. NOOR / 085101656427	10 Orang				Jl. Sapta Marga Kel. Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin				Aktif
8	Banjarbaru	PASIR PUTIH	H. ABDULLAH	10 Orang				Kel. Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang				Aktif
9	Banjarbaru	MINA SEJAHTERA	SUDIONO / 081349546869	12 Orang				Gunung Kupang RT. 036 RW. 10 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka				Aktif
10	Banjarbaru	BANGKAL	H. SAUKONI / 081349586127	10 Orang				Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka				Aktif
11	Banjarbaru	DANAU GALUH	SADRI / 081348846606	24 Orang				Jl. Purnawirawan Tambak Jariah Kel. Palam Kec. Cempaka				Aktif
12	Banjarbaru	SALAM LESTARI	MUCHLIS / 081349343665	11 Orang				Jl. Nusantara RT. 6 RW. 2 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang				Aktif

13	Banjar	KASTURI	BAIHAKI / 082151892675	23 Orang	2020		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat				Aktif
14	Banjar	ABULUNG	M. NOOR / 081251808001	19 Orang	2009		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat	HP	2016	APBN	Aktif
									GPS	2022	APBD PROV.	
									Rompi Pokmaswas 15			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monocular 2			
									Handlamp 5			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
15	Banjar	BINA BANUA	M. YAMIN / 082156526206	12 Orang	2011		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Taluk Selong, Kecamatan Martapura Barat				Tidak Aktif
16	Banjar	PEMUDA PEDULI	SYAMSUDI / 081251307518	10 Orang	2020		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur				Aktif
17	Banjar	FAJAR LESTARI	ZAINAL ABIDIN / 081251619399	9 Orang	2003		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Aranio				Aktif
18	Banjar	KARYA BERSAMA	MURTADO / 0852579790	11 Orang	2013		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio	HP	2016	APBN	Tidak Aktif
19	Banjar	BINA BERSAMA	KARMAJI / 085248269267	21 Orang	2007		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk				Aktif
20	Banjar	RAKAT	SYAMSUDIN / 081347007712	15 Orang	2009		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Sei. Bangkal, Kecamatan Sungai Tabuk	GPS	2022	APBD PROV	Aktif
									Rompi Pokmaswas 15			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monocular 2			
									Handlamp 5			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			

21	Banjar	SADAR UNTUK MAJU	MAHYUNI	25 Orang	2010		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk	HP	2016	APBN	Tidak Aktif
22	Banjar	PUTRI SALJU	JASMANI / 085345448561	14 Orang	2010		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Munggur Raya, Kecamatan Astambul				Aktif
23	Banjar	BINA KELAUTAN	NAHWANI	10 Orang	2008	29 Juli 2024	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh				Aktif
24	Banjar	PANTAI HARAPAN	MURSIDI / 085249859653	10 Orang	2008		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Tanipah, Kecamatan Aluh-Aluh				Aktif
25	Banjar	MINA LESTARI	H. BADRUDDIN / 081251336607	55 Orang	2016		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan	HP ALDO-007	2017	APBD PROV.	Aktif
									Rompi Pokmaswas 15			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monocular 2			
									Handlamp 5			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
26	Banjar	BUBUHAN SADAR LESTARI	SULAIMAN	16 Orang	2021		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Pandak Daun, Kecamatan Karang Intan				Aktif
27	Banjar	BARISAN PEMUDA PANDAK DAUN	HAMLI	15 Orang	2021		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Pandak Daun, Kecamatan Karang Intan				Aktif
28	Banjar	JAMBU MERAH	ANANG SYAHRANI	17 Orang	2021		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Pejambuan, Kecamatan Sungai Tabuk				Aktif
29	Banjar	PULAU JAYA	MUHSIN MAKKI	34 Orang	2021		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul				Aktif
30	Banjar	MAJU MANUNTUNG	PATHUL	20 Orang	2022	28-Mar-24		Ds. Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk				Aktif
31	Banjar	BERKAT BERSAMA	SOFIANNOR / 085349400780	31 Orang	2022	28-Mar-24	Pengawasan sumberdaya perikanan	Desa Sungai Tuan Kecamatan Astambul				Aktif
32	Banjar	PATARAHAH	HIKMATULLAH	25 Orang	2022	28-Mar-24		Ds. Karang Intan, Kec. Karang Intan				Aktif

33	Banjar	AMAN SENTOSA	MUHAMMAD JAIDI	20 Orang	2022			Ds. Pingaran Ulu, Kec. Astambul				Aktif
34	Banjar	BINA SUNGAI BERSAMA	ANANG SUPIAN	13 Orang	2023	29 Juli 2024	Pengawasan sumberdaya perikanan	Ds. Aluh-Aluh Besar, Kec. Aluh-Aluh				Aktif
35	Banjar	MANGGURUH	FERDY	15 Orang	2023			Ds. Tiwingan Lama, Kec. Aranio				Aktif
36	Banjar	LESTARI ALAM	SUBLIANOR /08312868847	15 Orang	2023		Pengawasan sumberdaya perikanan	Desa Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh - Aluh				Aktif
37	Banjar	PECINTA LINGKUNGAN	ARDIANSYAH/ 085390530134	6 Orang	2023		Pengawasan sumberdaya perikanan	Desa Pemurus, Kecamatan Aluh - Aluh				Aktif
38	Banjar	AKAR BAGANTUNG	MUHAMMAD ALI	12 orang	2024			Ds. Akar Bagantung, Kec. Martapura Timur				Aktif
39	Banjar	LESTARI ALAM										Aktif
40	Banjar	PENGIRAK										Aktif
41	Banjar	BARAKAT										Aktif
42	Barito Kuala	SADAR BERSAMA	H. JAMHARI / 081347119779	10 Orang	2009		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit	Handpone	2009	APBD KAB.	Aktif
									Handy Talky	2012	APBD KAB.	
									Senter 3	2014	APBD KAB.	
									Kamera Digital			
									Rompi Pokmaswas 20			
									Handy Talky 2	2015	APBD KAB.	
									Kamera Digital	2015	APBD PROV.	
									Teropong			
									Senter			
									Topi			
									Rompi Pokmaswas			
									Kaos Lengan Panjang			

									Handy Talki			
									Papan Seruan	2016	APBD PROV.	
43	Barito Kuala	SADAR KARYA	MIRHAN / 085251323005	10 Orang	2009		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Pantang Raya, Kecamatan Tabukan	Handy Talky	2012	APBD KAB.	Aktif
									Baju & Celana 10	2014	APBD KAB.	
									Topi 10			
									Jaket 10			
									Senter 2			
									HT 2	2015	APBD KAB.	
									Senter 3			
									Kamera Digital			
									Handphone	2016	APBD PROV.	
									Papan Seruan	2017	APBD PROV.	
44	Barito Kuala	SHANDY CITRA	RUSBANDI	10 Orang	2011		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Lepas, Kecamatan Bakumpai	Handi Talky 2	2015	APBD KAB.	Aktif
									Kamera Digital			
									Senter 3			
									Handphone	2016	APBD PROV.	
									Papan Seruan			
									Rompi 11	2019	APBD PROV.	
									Sepatu Boat 11			
									Baju Pokmaswas 11			
45	Barito Kuala	BUSER	MASRAWAN/ 085249764400	10 Orang	2011		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak	Perahu Motor	2013	APBD KAB.	Aktif
									Handi Talky			
									Teropong	2014	APBD PROV.	
									Kamera Digital			
									Senter			
									10 Rompi			
									10 Topi			
									3 Senter	2014	APBD KAB.	
									Kamera Digital			

									20 Rompi Pokmaswas			
									2 Handy Talki	2015	APBD KAB.	
46	Barito Kuala	RUKUN BERSAMA	DAHLANSYAH / 085393394064	11 Orang	2015		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Sungai Gampa, Kecamatan Rantau Badauh				Aktif
47	Barito Kuala	GRAHA BAKTI MULIA	AL-AMINUDDIN / 085705085438	29 Orang	2020		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak				Aktif
48	Barito Kuala	SEPAKAT	SURIADI / 082148313297	13 Orang	2015		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Bagus, Kecamatan Marabahan	Handphone	2016	APBD PROV.	Aktif
									Papan Seruan			
									Handphone	2017	APBD PROV.	
49	Barito Kuala	BERKAT BERSAMA	H. M. YAMANI / 081348195969	45 Orang	2006		Perikanan Tangkap	Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit	HandyTalki	2004	APBD KAB.	Aktif
									Perahu Motor	2014	APBD KAB.	
									Teropong	2014	APBD PROV.	
									Kamera Digital			
									Senter			
									Rompi Pokmaswas 10 buah			
									Topi 10 buah			
									Baju dan Celana 11 lembar	2014	APBD KAB.	
									Topi 11 buah			
									Jaket 11 buah			
									Senter 2 buah			
									HandyTalki 2 buah	2015	APBD KAB.	
									Papan Seruan	2017	APBD PROV.	
50	Barito Kuala	KEMITRAAN	M. SABDI / 085249877581	10 Orang	2009		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Balandean, Kecamatan Alalak	Handphone	2009	APBD KAB.	Aktif
									Perahu Motor	2010	APBD KAB.	
									HandyTalki	2012	APBD KAB.	
									Teropong	2014	APBD PROV.	
									Kamera Digital			
									Senter			
									Rompi Pokmaswas 10 buah			

									Topi 10 buah			
									Senter 3 buah	2014	APBD KAB.	
									Kamera Digital			
									Rompi Pokmaswas 20 buah			
									HandyTalki 2 buah	2015	APBD KAB.	
									Papan Seruan		APBD PROV.	
51	Barito Kuala	SUNGAI MADANG	AHMAD SAIHANI	10 Orang	2011		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan	HandyTalky	2012	APBD KAB.	Aktif
									Perahu Motor			
									Teropong	2014	APBD PROV.	
									Kamera Digital			
									Senter			
									Rompi Pokmaswas 10 buah			
									Topi 10 buah			
									Senter 3 buah	2014	APBD KAB.	
									Kamera Digital			
									Rompi Pokmaswas 20 buah			
									HandyTalki	2015	APBD KAB.	
52	Barito Kuala	KARYA BERSAMA	MASLANI	11 Orang	2011		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Karya Baru, Kecamatan Tabunganen				Aktif
53	Barito Kuala	BAGUS PEDULI	HASAN	10 Orang	2011		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Bagus, Kecamatan Marabahan	Baju dan Celana 10 lembar	2014	APBD KAB.	Aktif
									Topi 10 lembar			
									Jaket 10 lembar			
									Senter 2 buah			
									Handy Talki 2 buah	2015	APBD KAB.	
									Kamera Digital			
									Senter 3 buah			
54	Barito Kuala	SUMBER ABADI	MISRAN	11 Orang	2015		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Tatah Alayung, Kecamatan Mandastana				Tidak Aktif

55	Barito Kuala	MINA LESTARI	IBRAHIM	20 Orang	2011		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen	Perahu Motor	2013	APBD KAB.	Aktif
									Handy Talki			
									Senter 3 buah	2014	APBD KAB.	
									Kamera Digital			
									Rompi Pokmaswas 20 buah			
									Kamera Digital	2015	APBD PROV.	
									Teropong			
									Senter			
									Topi			
									Rompi Pokmaswas			
									Baju Kaos Lengan Panjang			
56	Barito Kuala	BERANTAS BERSAMA	MARDANI	30 Orang	2006		Perikanan Tangkap dan Budidaya	Desa Badandan, Kecamatan Cerbon				Aktif
57	Balangan	MINA LESTARI	AUD TAHYUDIN / 081210400170	10 Orang	2014		Pengawasan Perairan	UPT Lajar Papuyuan, Kecamatan Lampihong	Papan Seruan (1 buah)	2021	APBD PROV.	Aktif
58	Balangan	SUKA MAJU	M. JUMAIDI / 082159629574	13 Orang	2011		Pengawasan Perairan	Desa Murung Abuin, Kecamatan Paringin Selatan	Perlengkapan Pokmaswas	2019	APBD KAB	Aktif
									GPS	2022	APBD PROV.	
									Rompi Pokmaswas 15 bh			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monokuler			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
59	Balangan	PULAU BEREDAR	M. ABIDIN / 085348176298	12 Orang	2015		Pengawasan Perairan	Desa Baruh Bahinu Dalam, Kecamatan Parigin Selatan	Perlengkapan Pokmaswas	2019	APBD KAB	Aktif
60	Balangan	TELAGA BEREDAR	M. ZAINI/ 083144170582	10 Orang	2015		Pengawasan Perairan	Desa Telaga Purun, Kecamatan Paringin Selatan	Perlengkapan Pokmaswas	2021	APBD KAB.	Aktif
61	Balangan	LEPASI	SUKIRMAN / 082253324739	10 Orang	2017		Pengawasan Perairan	Desa Lok Hamawang, Kecamatan Lampihong	Perlengkapan Pokmaswas	2019	APBD KAB	Tidak Aktif

62	Balangan	MAJU BERSAMA	MUSTAFA KEMAL / 081944242277	10 Orang	2015		Pengawasan Perairan	Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan	Perlengkapan Pokmaswas	2021	APBD KAB.	Aktif
63	Balangan	KERAYAU LESTARI	RIDUAN / 081346801813	10 Orang	2018		Pengawasan Perairan	Desa Liyu, Kecamatan Halong	Papan Seruan (1 buah)	2021	APBD PROV.	Aktif
64	Balangan	LESTARI PERIKANAN	MULYONO	16 Orang	2020		Pengawasan Perairan	Desa Sungai Barung, Kecamatan Juai	Perlengkapan Pokmaswas	2019	APBD KAB	Aktif
65	Hulu Sungai Tengah	BINA USAHA	NOOR AHMADI / 085346390976	50 Orang	5 Desember 2008		Patroli pengawasan	Desa Tabat RT. 04, Kecamatan Labuan Amas Utara	Kapal Motor (2 unit)	2019	APBD PROV	Aktif
									Handy Talkie (1 unit)			
									Handphone (1 unit)	2013	APBD KAB	
									Handphone (1 unit)	2017	APBD KAB	
									Kamera Digital (1 unit)			
									Senter (10 unit)			
									Seragam/Rompi (10 buah)	2009	APBD KAB	
									Kaos Pokmaswas (5 buah)	2007	APBD KAB	
									Kaos Pokmaswas (10 buah)	2009	APBD KAB	
									Sepatu Boot (5 buah)	2016	APBD KAB	
									Papan Seruan (2 buah)			
66	Hulu Sungai Tengah	BINA BERSAMA	ABDUL WAHID / 08235011578	34 Orang	24 Februari 2003		Patroli pengawasan	Desa Tabat RT. 01, Kecamatan Labuan Amas Utara	Kapal Motor (2 unit)	2019	APBD PROV	Aktif
									Handy Talkie (1 unit)			
									Handphone (1 unit)	2013	APBD KAB	
									Handphone (1 unit)	2018	APBD KAB	
									Kamera Digital (1 unit)			
									Senter (10 unit)			
									Sepatu Boot (5 buah)	2016	APBD KAB	
									Papan Seruan (1 buah)			
67	Hulu Sungai Tengah	SETIA KAWAN	PARMAN / 082358750934	15 Orang	1 Juli 2011		Patroli pengawasan	Desa Pahalatan, Kecamatan Labuan Amas Utara	Kapal Motor (1 unit)		APBN	Aktif
									Handy Talkie (1 unit)			
									Handphone (1 unit)	2013	APBD KAB	
									Handphone	2018	APBD KAB	

									Sepatu Boot (5 buah)	2016	APBD KAB	
									Papan Seruan (1 buah)			
68	Hulu Sungai Tengah	PANGGANG KUNING	ABDURAHMAN / 082350457433	10 Orang	2013		Patroli pengawasan	Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan	Kapal Motor (2 unit)			Aktif
									Handy Talkie (1 unit)			
									Handphone (1 unit)	2013	APBD KAB	
									Handphone (1 unit)	2016	APBD KAB	
									Kamera Digital (1 unit)			
									Senter (5 unit)			
									Sepatu Boot (5 buah)	2016	APBD KAB	
									Pos Pokmaswas (1 unit)	2016	APBD KAB	
									Papan Seruan (2 buah)			
69	Hulu Sungai Tengah	KARYA BERSAMA	KADERI / 081348693517	20 Orang	2013		Patroli pengawasan	Desa Tungkup, Kecamatan Labuan Amas Utara	Kapal Motor (2 unit)			Aktif
									Handy Talkie (1 unit)			
									Handphone (1 unit)	2013		
									Handphone (1 unit)	2016		
									Kamera Digital (1 unit)			
									Senter (5 unit)			
									Sepatu Boot (5 buah)	2016		
									Pos Pokmaswas (1 unit)	2016		
									Papan Seruan (2 buah)			
70	Hulu Sungai Tengah	KERUING	DIAN / 085249923250	10 Orang	2013		Patroli pengawasan	Desa Perumahan, Kecamatan Labuan Amas Utara	Kapal Motor (1 unit)			Aktif
									Handy Talkie (1 unit)			
									Handphone (1 unit)	2016		
									Kamera Digital (1 unit)			
									Teropong (1 unit)			
									Senter (5 unit)			
									Sepatu Boot (5 buah)	2016		
									Pos Pokmaswas (1 unit)	2017		

									Papan Seruan (2 buah)			
71	Hulu Sungai Tengah	BERKAT SABAR	SAIBATUL HAMDI / 085248358416	19 Orang	2011		Patroli pengawasan	Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan	Kapal Motor (1 unit)			Aktif
									Handphone (1 unit)	2013		
									Handphone (1 unit)	2016		
									Kamera Digital (1 unit)			
									Teropong (1 unit)			
									Senter (5 buah)			
									Sepatu Boot (5 buah)	2016		
									Pos Pokmaswas (1 unit)	2017		
									Papan Seruan (3 buah)			
72	Hulu Sungai Tengah	KERAMAT URANG TUHA	SUPIANI	33 Orang	25 Februari 2009		Patroli pengawasan	Desa Manta'as, Kecamatan Labuan Amas Utara	Kapal Motor (2 unit)			Aktif
									Handy Talkie (1 unit)			
									Handphone (1 unit)	2013		
									Kamera Digital (1 unit)			
									Senter (5 unit)			
									Sepatu Boot (5 buah)	2016		
									Papan Seruan (1 buah)			
73	Hulu Sungai Tengah	USAHA BERSAMA	SYAHRANI	50 Orang	10 Desember 2008		Patroli pengawasan	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara	Kapal Motor (2 unit)			Aktif
									Handy Talkie (1 unit)			
									Papan Seruan (1 buah)			
74	Hulu Sungai Tengah	BERKAT BERSATU	MISERAN	23 Orang	21 September 2007		Patroli pengawasan	Desa Pahalatan, Kecamatan Labuan Amas Utara	Kapal Motor (2 unit)			Aktif
									Handy Talkie (2 unit)	2008		
									Kaos Pokmaswas (10 buah)	2008		
									Papan Seruan (1 buah)			
75	Hulu Sungai Tengah	PANGGANG RAMBA	BADERI	26 Orang	1 Juli 2005		Patroli pengawasan	Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan	Kapal Motor (1 unit)			Aktif
									Handy Talkie (2 unit)	2006		
									Kaos Pokmaswas (5 buah)	2007		
76	Hulu Sungai Tengah	BERKAT SETUJU	YUSERAN	11 Orang	2013		Patroli pengawasan		Kapal Motor (1 unit)			Aktif

								Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan	Sepatu Boot (5 buah)	2016		
77	Hulu Sungai Tengah	MAJU BERSAMA	JUNAIDI	13 Orang	2013		Patroli pengawasan	Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan	Kapal Motor (2 unit)			Aktif
									Handphone (1 unit)	2016		
									Sepatu Boot (5 buah)	2016		
									Pos Pokmaswas (1 unit)	2016		
									Papan Seruan (1 buah)			
78	Hulu Sungai Selatan	BASAMAAN	ROBYANOOR	37 Orang				Desa Bangkau, Kecamatan Kandungan	Handphone	2018	APBN	Aktif
79	Hulu Sungai Selatan	KERJASAMA	BERAHIM	24 Orang				Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara	Perahu Bermotor (2 unit)	2020	APBD PROV	Aktif
									Papan Seruan	2021	APBD PROV	
									GPS	2022	APBD PROV	
									Rompi Pokmaswas 15 buah			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monokuler 2 bh			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
80	Hulu Sungai Selatan	PANTAI ULIN	ABDUL LAHMAN	61 Orang				Desa Pantai Ulun, Kecamatan Simpung				Aktif
81	Hulu Sungai Selatan	TERATAI	ARDI	15 Orang				Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan				Aktif
82	Hulu Sungai Selatan	MUNING	H. NURDIN	21 Orang				Desa Pandan Sari, Kecamatan Daha Selatan				Aktif
83	Hulu Sungai Selatan	GAMURUNG	MUKERANSYAH	23 Orang				Desa Amparaya, Kecamatan Simpung				Aktif
84	Hulu Sungai Selatan	SUKA MAJU	M. HUSAINI	63 Orang				Desa Panjampang, Kecamatan Simpung				Aktif
85	Hulu Sungai Selatan	AKBAR	M. YANA	22 Orang				Desa Baru, Kecamatan Daha Barat				Aktif
86	Hulu Sungai Selatan	AMANAHAH	ARIANTO	20 Orang				Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat	Handphone	2018	APBN	Aktif
87	Hulu Sungai Selatan	RAKAT MUFAKAT	YUSRAN	66 Orang				Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Simpung				Aktif
88	Hulu Sungai Selatan	KARYA AMANDIT	HUSIN	32 Orang				Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan				Aktif

89	Hulu Sungai Selatan	RAKAT MUFAKAT	AAN	93 Orang				JL. Nagara Kandangan RT. 02/II Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan				Aktif
90	Hulu Sungai Selatan	PERKASA	IMUK	25 Orang				Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang				Aktif
91	Hulu Sungai Selatan	SAPU JAGAT	BADARUDIN	68 Orang				Desa Baggo Tanggul, Kecamatan Kalumpang				Aktif
92	Hulu Sungai Selatan	GAWI MANUNTUNG	SAHIDIN	15 Orang				Desa Pandak Daun, Kecamatan Daha Selatan				Aktif
93	Hulu Sungai Selatan	BERKAT BERSAMA	M. DAMIYATI	67 Orang				Desa Pandak Daun, Kecamatan Daha Utara				Aktif
94	Hulu Sungai Selatan	MAJU BERSAMA	ALIYAS	40 Orang				Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara	Perahu Motor 2 unit	2018	APBD PROV	Aktif
95	Hulu Sungai Selatan	USAHA MEMBANGUN	ABDUL HAMID	17 Orang				Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara				Aktif
96	Hulu Sungai Utara	86	ASRANI / 085248705587	15 Orang				Desa Kandang Halang, Kecamatan Amuntai Tengah				Aktif
97	Hulu Sungai Utara	SUMBER MAKMUR	FAHRURAJI / 085248966616	15 Orang				Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik				Aktif
98	Hulu Sungai Utara	NELAYAN MEMBANGUN	BIJIRMI / 085247948679	15 Orang				Desa Sungai Papuyu, Kecamatan Babirik	Handphone	2018	APBN	Aktif
99	Hulu Sungai Utara	HARAPAN USAHA	AHMADI / 081349354012	17 Orang				Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik				Aktif
100	Hulu Sungai Utara	SUMBER LESTARI	SUBELI	10 Orang				Desa Sungai Kuini, Kecamatan Sungai Pandan				Aktif
101	Hulu Sungai Utara	SADAR KARYA	MAHYUDIN	15 Orang				Desa Rantau Karau Raya, Kecamatan Sungai Pandan				Aktif
102	Hulu Sungai Utara	MAJU BERSAMA	ZAINI	15 Orang				Desa Tampakang, Kecamatan Paminggir				Aktif
103	Hulu Sungai Utara	BINA BERSAMA	MARHAT	15 Orang				Desa Sungai Durait Hulu, Kecamatan Babirik				Aktif
104	Hulu Sungai Utara	BERKAT MAJU	ARDIMAN / 085251413306	10 Orang				Desa Banyu Tajun Dalam, Kecamatan Sungai Pandan				Aktif
105	Hulu Sungai Utara	MAJU BERSAMA	BAHRUDIN	10 Orang				Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan				Aktif
106	Hulu Sungai Utara	SUKA MAJU	AMIN	18 Orang				Desa Sungai Durait , Kecamatan Tengah Babirik	Handphone	2018	APBN	Aktif
107	Hulu Sungai Utara	SUMBER TELAGA	SABIRIN / 082255258539	29 Orang				Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah				Aktif
108	Hulu Sungai Utara	BUNGA TERATAI	GAFURI RAHMAN	27 Orang				Desa Hambuku Tengah, Kecamatan Sungai Pandan				Aktif

109	Hulu Sungai Utara	MANDALA	M. ROBI	23 Orang				Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah				Aktif
110	Hulu Sungai Utara	HARAPAN MASSA	M. ROBI	24 Orang				Desa Durait Tenga Kecamatan Babirik				Aktif
111	Kotabaru	PADA IDI	H. SULAIMAN/ 085332138368	15 Orang				RT.03 RW.01, Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar				Aktif
112	Kotabaru	RAJAWALI	ALIUDDIN / 085249501856	14 Orang				RT/RW.02/01, Desa Teluk Sirih, Kecamatan Pulau Laut Selatan				Aktif
113	Kotabaru	BINA BERSAMA	SUPRIADI	20 Orang				Jln. Pantai Baru RT/ RW.03/02 Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	Handphone	2018	APBN	Aktif
114	Kotabaru	BAMEGA SAIJA'AN	RAHMANSYAH	20 Orang				Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara				Aktif
115	Kotabaru	KUDA LAUT	H. SYAMSUL / 081348071559	20 Orang				Jln. Padat Karya RT/RW.04/02, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara				Aktif
116	Kotabaru	SELAYAR BERSATU	NURDIANSYAH, S.Pd / 085390272222	10 Orang				Jln. Pendidikan RT/RW. 01/01 No. 28 Desa Tanjung Pelayar, Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar				Aktif
117	Kotabaru	HIDUP BERSAMA	SIRAJUDDIN / 081217613202	10 Orang				Jln. Budi Luhur RT/RW. 02/01, Desa Pulau Kerasian, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan				Aktif
118	Kotabaru	LUMBA-LUMBA	TASWIN / 082151051769	11 Orang				RT/ RW. 06/02, Desa Kerayaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan				Aktif
119	Kotabaru	KARANG TANJUNG	DARDIANSYAH / 081317205991	10 Orang				RT. 05, Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kelumpang Tengah	Papan Seruan (1 buah)	2021		Aktif
120	Kotabaru	PANTAI KELUMPANG	M. BAYANI / 082153039667	10 Orang				RT/ RW. 05/02, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan	Handphone	2018		Aktif
121	Kotabaru	SIPATUO	SINRANG / 085391991855	32 Orang				RT/ RW. 01/01, Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar	Handphone	2021		Aktif
122	Kotabaru	MAJU BERSAMA	ABDUL GAFAR / 085248846063	13 Orang				RT/ RW. 02/01, Desa Tanjung Sungkai, Kecamatan Pulau Laut Barat				Aktif
123	Kotabaru	SAHABAT LAUT	LATUO	15 Orang				RT/ RW. 06/03, Desa Tengah,Pulau Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan				Aktif
124	Kotabaru	MUTIARA SARANG TIUNG	ABDUL MULUD / 085345290888	10 Orang				Jl. Berangas Km. 8,5 RT.04, Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara				Aktif

125	Kotabaru	BERKAT RAKAT	NASTAJUDIN / 085259939829	19 Orang				Jln. Berangas RT.01 Desa Teluk Gosong, Kecamatan Pulau Laut Timur				Aktif
126	Kotabaru	PUTRA NELAYAN	BAHRUDIN / 085348689768	14 Orang				Jl. Madrasah RT.02, Desa Pudi Seberang, Kecamatan Kelumpang Utara				Aktif
127	Kotabaru	BINA LAUT SEJAHTERA	AMIRUDDIN	18 Orang				Kampung Baru RT.05 RW.03 Ds. Tanjung Nyiur Kecamatan Pulau Sembilan				Aktif
128	Kotabaru	BANGKIT BERSAMA	BEDDU	15 Orang				Jl. Mercu Suar RT/RW. 03/002 Ds. Tanjung Kunyit Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar				Aktif
129	Tapin	BAMIGA	SALMAN/ 081285830589	36 Orang	21-01-2009		Pengawasan	Desa Banua Halat Kanan Kecamatan Tapin Utara	Perahu Motor	2013	APBD KAB.	Aktif
									HandyTalki			
									Jaket			
130	Tapin	SUMBER REZEKI	AMIRUL/ 081349653729	15 Orang	19-12-2021		Pengawasan	Desa Gadung Kecamatan Bakarangan	Perahu Motor	2013	APBD KAB.	Aktif
									HandyTalki			
									Jaket			
									GPS	2015	APBD KAB.	
									Kamera Digital			
									Senter			
									Rompi Pokmaswas			
									Baju Kaos Pokmaswas			
131	Tapin	PADANG KARUKAN	SYAIDINA HAMZAH / 081349650639	13 Orang	07-04-2015		Pengawasan	Desa Tangkawang Lama, Kecamatan Bakarangan	Perahu Motor	2015	APBD KAB.	Aktif
									Pelampung			
									HandyTalki			
									Kamera Digital			
									Rompi Pokmaswas			
									Senter			
									Baju Kaos Pokmaswas			
									Handphone	2017	APBD PROV.	
132	Tapin	KURNIA SUBUR	A. YANI	12 Orang	2012		Pengawasan	Desa Masta Kecamatan Bakarangan				Aktif
133	Tapin	RAWA LESTARI	ARMADI	17 Orang	12-6-2008		Pengawasan	Desa Masta Kecamatan Bakarangan	Perahu Motor	2022	APBD PROV.	Aktif

134	Tapin	KARATAU JAYA	RUSMIADI / 082255404043	12 Orang	27-03-2012		Pengawasan	Desa Bundung Kecamatan Bakarangan	Perahu Motor	2014	APBD KAB.	Aktif
									HandyTalki			
									Pelampung			
									Kamera Digital			
									Senter			
									Rompi Pokmaswas			
									Handphone	2017	APBD PROV.	
									Papan Seruan			
									Perahu Motor	2021	APBD PROV.	
									Papan Seruan			
135	Tapin	SUMBER HARAPAN	ARBAIN	11 Orang	2008		Pengawasan	Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara	Perahu Motor	2015	APBD KAB.	Aktif
									HandyTalki			
									Pelampung			
									Kamera Digital			
									Senter			
									Rompi Pokmaswas			
136	Tapin	SI KAWAH	KADERAN	9 Orang	2009		Pengawasan	Desa Pariok Kecamatan Candi Laras Utara	Perahu Motor	2014	APBD KAB.	Aktif
									HandyTalki			
									Pelampung			
									Kamera Digital			
									Senter			
									Rompi Pokmaswas			
137	Tapin	DOA BERSAMA	NONO / 085390608182	15 Orang	25-05-2010		Pengawasan	Desa Rawana Kecamatan Candi Laras Utara	Handphone	2017	APBD PROV.	Aktif
									Perahu Motor	2022	APBD PROV.	
138	Tapin	MAWAS DIRI	SUPIADI/ 085347410776	15 Orang	12-06-2009		Pengawasan	Desa Teluk Haur Kec. Candi Laras Utara	Perahu Motor	2013	APBD KAB.	Tidak Aktif
									HandyTalki			
									Jaket			
139	Tapin	SUWARGA	MUSA	11 Orang	30-09-2009		Pengawasan	Desa Sajawa Kecamatan Candi Laras Utara	Perahu Motor	2013	APBD KAB.	Aktif
									HandyTalki			
									Jaket			

140	Tapin	SAMA BERJUANG	RUSTAM	30 Orang	2011		Pengawasan	Desa Rawana Kecamatan Candi Laras Utara				Aktif
141	Tapin	USAHA BERSAMA	MUHAMMAD	15 Orang	05-12-2008		Pengawasan	Desa Rawana Kecamatan Candi Laras Utara				Aktif
142	Tapin	MURUNG INDAH	NAPIAH	11 Orang	2012		Pengawasan	Desa Sei. Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan				Aktif
143	Tapin	MUNING BERSAMA	ABD.MANAP	10 Orang	2011		Pengawasan	Desa Sei. Rutas Kecamatan Candi Laras Selatan				Aktif
144	Tapin	RAWA LESTARI	AHMAD SYARKANI/ 085390977738	17 Orang	02-03-2013		Pengawasan	Desa Marampiua Kecamatan Candi Laras Selatan	Perahu Motor	2014	APBD KAB.	Aktif
									HandyTalki			
									Pelampung			
									Kamera Digital			
									Senter			
									Rompi Pokmaswas			
									Handphone	2017	APBD PROV.	
									Papan Seruan			
									Papan Seruan	2020	APBD PROV.	
									Perahu Motor	2021	APBD PROV.	
145	Tapin	BINI USAHA	DARHAM	25 Orang	16-05-2007		Pengawasan	Desa Hiyung, Kec. Candi Laras Selatan	Kapal	2013	APBD KAB.	Aktif
									HandyTalki			
									Jaket			
146	Tanah Laut	INDAH LESTARI	MARHALAN/	20 Orang				Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan	GPS	2022	APBD PROV.	Aktif
									Rompi Pokmaswas 15 buah			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monokuler 1 bh			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
147	Tanah Laut	BATU LIMA	RUSLAN ARIANDI	51 Orang				Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung				Aktif
148	Tanah Laut	BINA WARGA	JOHANSYAH	20 Orang				Desa Ranggung Dalam, Kecamatan Takisung				Aktif
149	Tanah Laut	BINA BERSAMA	DAUD	24 Orang				Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong				Aktif
150	Tanah Laut	SUKA DAMAI	AHMAD ZARKASIH	12 Orang				Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari				Aktif

151	Tanah Laut	MAJU BERSAMA	RIDUAN	15 Orang				Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur				Aktif
152	Tanah Laut	JELANG MASA DEPAN	RUSIANSYAH / 085348313033	9 Orang				Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau				Aktif
153	Tanah Laut	WADAH TANI	SUPARIAN	10 Orang				Desa Benua Tengah, Kecamatan Takisung				Aktif
154	Tanah Laut	DEWA TANJUNG	AKLI	29 Orang				Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan				Aktif
155	Tanah Laut	BAKTI HARAPAN MASA	M. YUSUF	8 Orang				Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau				Aktif
156	Tanah Laut	ARUNG SAMUDRA	H. ISKANDAR	10 Orang				Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap				Aktif
157	Tanah Laut	ARMADA NELAYAN	AWAR	13 Orang				Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur				Aktif
158	Tanah Laut	TELAGA SAMUDRA	MUHAMMAD	10 Orang				Desa Telaga Langsat, Kecamatan Takisung				Aktif
159	Tanah Laut	GUNTUNG LESTARI	MAHLAN	10 Orang				Desa Guntung Besar, Kecamatan Pelaihari				Aktif
160	Tanah Laut	BURUNG LAUT	JURIANSYAH	12 Orang				Desa Tabanio, Kecamatan Takisung				Aktif
161	Tanah Laut	LAUT BIRU	KASTAN	20 Orang				Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung				Aktif
162	Tanah Laut	RAWA BAKAU ABADI	BASIR	13 Orang				Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau				Aktif
163	Tanah Laut	MINA RAWA MAKMUR	SARMAN	15 Orang				Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur				Aktif
164	Tanah Laut	MINA ATU-ATU LESTARI	SYAID TOHIR	13 Orang				Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari				Aktif
165	Tanah Laut	SRIKANDI JAYA	MISRAN	20 Orang				Desa Srikandi, Kecamatan Kurau				Aktif
166	Tanah Laut	HARAPAN BERSAMA	KHAIRUDDIN	20 Orang				Desa Handil Suruk, Kecamatan Bumi Makmur				Aktif
167	Tanah Laut	KAYUH BAIMBAI	ABDUL SANI	20 Orang				Desa Bawah Layung, Kecamatan Kurau				Aktif
168	Tanah Laut	SAMUDRA JAYA	UMAR	20 Orang				Desa Swarangan, Kecamatan Jorong				Aktif
169	Tanah Laut	BINA KARYA	M. EFENDY	30 Orang				Desa Benua Rata, Kecamatan Bati-Bati				Aktif
170	Tanah Laut	MANUNGGAL LESTARI	BUDI HANDOKO	28 Orang				Desa Kayu Abang, Kecamatan Tambang Ulang				Aktif
171	Tanah Laut	KUNYIT LESTARI	NAKHROWI	26 Orang				Desa Kunyit, Kecamatan Pelaihari				Aktif
172	Tanah Laut	AMBAWANG LESTARI	YITNO OTOMO	28 Orang				Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar				Aktif
173	Tabalong	AMBARAWA	ABRAR	23 Orang	15 Juni 2009			Desa Hapalah, Kecamatan Banua Lawas				Aktif
174	Tabalong	USAHA BERSAMA	M. YUSUF	30 Orang	8 Mei 2012			Desa Batang Banyu, Kecamatan Banua Lawas	GPS	2022	APBD PROV.	Aktif
									Rompi Pokmaswas 15 buah			
									Teropong Binokuler			

									Teropong Monokuler 1 bh			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
175	Tabalong	PESAYANGAN	TAUFIKURRAHMAN 085389036910	16 Orang	9 Mei 2012			Desa Sungai Durian No. 13 RT. 1 RW., Kecamatan Banua Lawas				Aktif
176	Tabalong	SUKA MAKMUR	ABDUL KARIM/ HUSNI	17 Orang	16 Mei 2018			Habau Hulu, Kecamatan Banua Lawas				Aktif
177	Tabalong	UNDAN SWARNA	SULAIMAN / 085390490569	17 Orang	28 Mei 2014			Desa Talan No. 43 RT. 04 RW., Kecamatan Banua Lawas				Aktif
178	Tabalong	SUKA MAJU	JAILANI	20 Orang				Desa Hariang, Kecamatan Banua Lawas				Aktif
179	Tabalong	BINGKAI RAYA	SUHARDI	13 Orang	3 Juni 2010			Desa Ampukung, Kecamatan Kelua				Aktif
180	Tabalong	LUNDU JAYA	ARNADI	20 Orang	25 Mei 2015			Desa Ampukung, Kecamatan Kelua				Aktif
181	Tabalong	PELITA	KARTAMI / 085247740995	23 Orang	19 Juni 2002			Desa Jirak No. 28 RT. II RW., Kecamatan Pugaan,	GPS	2022	APBD PROV.	Aktif
									Rompi Pokmaswas 15 buah			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monokuler 1 bh			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
182	Tabalong	WAJA SAMPAI KAPUTING	M. SALEH /085249009489	23 Orang				Desa Pampanan No. RT. 02 RW., Kecamatan Pugaan				Aktif
183	Tabalong	MADANG LESTARI	MASRANI	25 Orang	30 November 2017			Desa Madang, Muara Harus				Aktif
184	Tabalong	SUMBER REZEKI	YAKUPDIN	12 Orang				Desa Tamunti, Kecamatan Pugaan				Aktif
185	Tabalong	MAWAR	JULKIPLI HANAPI	15 Orang	8 Des 2010			Desa Sungai Rukam I, Kecamatan Pugaan				Aktif
186	Tabalong	KERANGKANG RAYA	MURJANI	15 Orang				Desa Sungai Rukam II, Kecamatan Pugaan				Aktif
187	Tabalong	MINA PEDULI	SALMANA	16 Orang	1 Juli 2009			Desa Banua Lawas, Kecamatan Banua Lawas				Aktif
188	Tabalong	HARIANG LESTARI	MASRAN / JUMRI	16 Orang	3 Juli 2009			Desa Hariang, Kecamatan Banua Lawas				Aktif
189	Tabalong	BERKAT SABAR	JUNAIDI	25 Orang	27 April 2010			Desa Purai, Kecamatan Banua Lawas				Aktif

190	Tabalong	MAJU BERSAMA	HADIAN TO	20 Orang				Desa Talan, Kecamatan Banua Lawas				Aktif
191	Tabalong	SUKSES SELALU	M. HUSNANDAR Y.	25 Orang	15-Nov-16			Desa Pematang, Kecamatan Banua Lawas				Aktif
192	Tabalong	SINAR BARU	ASTARI	15 Orang				Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua				Aktif
193	Tabalong	KARYA BERSAMA	ARNI	25 Orang	8 Des 2010			Desa Binturu, Kecamatan Kelua				Aktif
194	Tabalong	BELANTI JAYA	SYARKAWI	25 Orang	16 April 2015			Desa Masintan, Kecamatan Kelua				Aktif
195	Tabalong	TELAGA MAKMUR	ARPAN	27 Orang	16-Nov-16			Desa Karangan, Putih Kecamatan Kelua				Aktif
196	Tabalong	SUKA MAKMUR	BASRI	14 Orang				Desa Madang, Muara Harus				Aktif
197	Tabalong	SUMBER REZEKI	DEUT	15 Orang				Desa Warukin, Kecamatan Tanta				Tidak Aktif
198	Tabalong	HARAPAN BARU	JUHRI	20 Orang				Desa Pulau Ku'u, Kecamatan Tanta				Aktif
199	Tabalong	SADAR BERSAMA	AHMAD	25 Orang				Desa Walangkir, Kecamatan Tanta				Aktif
200	Tabalong	TUNJUR LESTARI	IMAN	12 Orang				Desa Pangi, Kecamatan Tanjung				Tidak Aktif
201	Tabalong	SABAR	RUSMA	21 Orang				Desa Mahe Seberang, Kecamatan Tanjung				Aktif
202	Tabalong	ARWANA	ANTONG	15 Orang				Desa Tanjung Kecamatan Tanjung				Aktif
203	Tabalong	BERKAT SETIA	SYAHRUNI	23 Orang				Desa Pangi Kecamatan Tanjung				Aktif
204	Tabalong	MINA LESTARI	SUDIBIO UTOMO	15 Orang				Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pundak				Tidak Aktif
205	Tabalong	SINAR AGUNG	SYAHRANSYAH	30 Orang	10 Mei 2010			Desa Suput Kecamatan Haruai				Aktif
206	Tanah Bumbu	HARAPAN MAJU	IR. HAIRUDIN	17 Orang				Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat				Aktif
207	Tanah Bumbu	CINTA BAHARI	MULIYANSYAH					Desa Wiritasi, Kecamatan Kusan Hilir	Handphone	2018	APBD PROV.	Aktif
208	Tanah Bumbu	BERKAT USAHA	TAKING	24 Orang				Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir				Aktif
209	Tanah Bumbu	TIGA SERANGKAI	MULYADI	20 Orang				Desa Salimuran, Kecamatan Kusan Hilir				Aktif
210	Tanah Bumbu	BERDIKARI	YUSDIANI	27 Orang				Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui	GPS	2022	APBD PROV.	Aktif
									Rompi Pokmaswas 15 buah			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monokuler 1 bh			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
211	Tanah Bumbu	KARANG KIMA	SAYID FIRDAUS	27 Orang				Desa Angsana, Kecamatan Angsana	Handphone	2018	APBD PROV.	Aktif

									GPS	2022	APBD PROV.	
									Rompi Pokmaswas 15 bh			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monokuler 1 bh			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
212	Tanah Bumbu	KARANG INDAH LESTARI	AMIRUDDIN	22 Orang				Desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban	GPS	2022	APBD PROV.	Aktif
									Rompi Pokmaswas 15 buah			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monokuler 1 bh			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
213	Tanah Bumbu	POLEWALI	M. IDRIS	18 Orang				Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir				Aktif
214	Tanah Bumbu	ANTASAN	MONNENG	19 Orang				Desa Pulo Satu, Kecamatan Kusan Hilir				Aktif
215	Tanah Bumbu	USAHA MAJU	TARSAH	17 Orang				Desa Pulo Satu, Kecamatan Kusan Hilir				Aktif
216	Tanah Bumbu	DANAU INDAH	H. MASRANI / 082350631447	20 Orang				Desa Danau Indah, Kecamatan Batulicin	Papan Seruan (1 buah)	2021	APBD PROV.	Aktif
217	Tanah Bumbu	BINA BERSAMA	ASWADI RAHMAN	16 Orang				Desa Anjir Baru, Kecamatan Kusan Hulu	Papan Seruan (1 buah)	2021	APBD PROV.	Aktif
									GPS	2022	APBD PROV.	
									Rompi Pokmaswas 15 buah			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monokuler 1 bh			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
218	Tanah Bumbu	MAKMUR BERSAMA	MULYADI	22 Orang				Desa Tibaru Panjang, Kecamatan Kusan Hulu				Aktif
219	Tanah Bumbu	BINA MAKMUR	ABDUL HALIM	13 Orang				Desa Lasung, Kecamatan Kusan Hulu				Aktif

220	Tanah Bumbu	SUNGAI DANAU LESTARI	MUHAMMAD ZAKKY	26 Orang				Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui	GPS	2022	APBD PROV.	Aktif
									Rompi Pokmaswas 15 buah			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monokuler 1 bh			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			
221	Tanah Bumbu	TIBARAU JAYA	MIJARI RAHMAN	23 Orang				Desa Tibarau Panjang, Kec. Kusan Hulu	GPS	2022	APBD PROV.	Aktif
									Rompi Pokmaswas 15 buah			
									Teropong Binokuler			
									Teropong Monokuler 1 bh			
									Handlamp 5 buah			
									Kamera Bawah Air			
									Kamera Semipro			

Sumber: Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

VI. BIDANG BUDIDAYA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (BP2HP)

VI.1. SASARAN KEPALA BIDANG BP2HP

Tabel 3.78. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang BP2HP

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	177.272 Ton
2	Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	100,20
3	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan (UPI) Yang Memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)	14 UPI

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat 3 indikator kinerja utama pada tahun 2024 ini, yaitu :

1. Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
3. Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan (UPI) Yang Memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)

Berikut pada Tabel 3.79 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Bidang Budiaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.79. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Bidang BP2HP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	177.272 Ton	151.438 **) Ton	85,42%
2	Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	100,20	103,30	103,09%
3	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan (UPI) Yang Memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)	14 UPI	15 UPI	107,14%
Rata-rata Capaian					98,55%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber : Bidang BP2HP Tahun 2024

Ket : **) angka sementara per bulan Pebruari tahun 2025

Pada Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, berikut merupakan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2024 :

1. Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh kab/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 sebesar 151.438 Ton (angka sementara per Pebruari 2025) atau dengan pencapaian sebesar 85,42% dari target 177.272 ton, yang meliputi:
 - a. Produksi budidaya ikan di laut pada Kabupaten Kotabaru,
 - b. Produksi budidaya ikan di air payau pada Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala
 - c. Produksi budidaya air tawar pada 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan.
2. Nilai Tukar Pembudidayaan ikan

Nilai Tukar Perikanan digunakan sebagai salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan pelaku usaha yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh pelaku usaha. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) berasal dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh Pembudidaya Ikan (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar oleh Pembudidaya Ikan (Ib) dikalikan dengan 100.

Berdasarkan data BPS tahun 2024, rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kalimantan Selatan tahun 2024 sebesar 103,30 atau dengan pencapaian sebesar 103,09% dari target 100,20

3. Jumlah unit usaha produk hasil perikanan (UPI) yang memiliki sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) tahun 2024 sebanyak 15 unit UPI atau pencapaian sebesar 107,14% dari target 14 UPI

Tabel 3.80. Data Unit Pengolahan Ikan yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2024

NO.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Komoditi	Lokasi	Tujuan Distribusi	Penerapan Mutu Persyaratan Standar
1	PT. Misaja Mitra	Udang Beku, Ikan Pelagis, Demersal Beku.	Kab. Kotabaru	Eksport Jepang, Taiwan dan Vietnam Via Jakarta	SKP & HACCP
2	PT. Saijaan Lintas Pulau Laut	Ikan Pelagis Beku, Ikan Demersal/Cepha Beku,	Kab. Kotabaru	Antar Pulau	SKP
3	PT. Kalimantan Fishery	Udang Beku	Kota Banjarmasin	Eksport Jepang, Taiwan China dan Korea Via Jakarta	SKP & HACCP
4	PT. Wirontono Baru	Udang Segar/Beku	Kota Banjarmasin	Eksport Jepang, Hongkong, Malaysia dan Vietnam Via Jakarta	SKP & HACCP
5	PT. EBIMAS BESAR	Ikan Pelagis Beku, Ikan Demersal/Cepha Beku,	Kab. Tanah Laut	Antar Pulau	SKP
6	UD. Surya Baru	Udang Segar/Beku	Kab. Tanah Laut	Antar Pulau / Ekspor	SKP & HACCP
7	CV. Baruna Sinar Abadi	Udang Segar/Beku	Kab. Tanah Laut	Antar Pulau/ Ekspor	SKP & HACCP
8	PT. Karimata Timur	Udang Segar/Beku	Kab. Tanah Laut	Eksport Eropa, Jepang Via Surabaya	SKP & HACCP
9	CV. Muara Laut	Ikan Segar dan Kepiting Hidup	Kota Banjarbaru	Antar Pulau	SKP & HACCP
10	CV. TIGA A	Ikan Kepiting, Belut, Kerang Hidup, Udang, Rajungan dan Ikan Pelagis/Demersal Segar	Kab. Banjar	Antar Pulau	SKP & HACCP

11	PT. Fresh On Time	Rajungan Pasteurisasi dan Udang Beku	Kab. Banjar	Antar Pulau / Ekspor	SKP & HACCP
12	Nidy Rian	Ikan Pelagis/Demersal (Beku)	Kota Banjarmasin	Antar Pulau	SKP
13	Anang Ramli	Ikan Pelagis/Demersal (Beku)	Kota Banjarmasin	Antar Pulau	SKP
14	Gemilang Maju Jaya	Stik Ikan	Kab. Tabalong	Domestik Kal Sel	SKP
15	Amplang Qita	Amplang Ikan	Kab. Kotabaru	Domestik Kal Sel	SKP

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Tabel 3.81 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Kepala Bidang BP2HP

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2023	2024	
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	157.116,78 Ton	151.438 Ton	85,42%
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	100,11	103,30	103,09%
3	Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan (UPI) Yang Memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)	12 UPI	15 UPI	107,14%
Rata-rata Capaian				98,55%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.82 Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Bidang BP2HP Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	136.957 Ton	148.814,63 Ton	130.355,18 Ton	157.116,78 Ton	177.272 Ton	151.438 **) Ton	85,42%
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	99,33	106,52	102,10	100,11	100,20	103,30	103,09%
3	Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan (UPI) Yang Memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)	-	-	-	12 UPI	14 UPI	15 UPI	107,14%
Rata-rata Capaian								98,55%
Kategori Capaian								Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya – Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan/Pembinaan Pembudidayaan Ikan di Laut meliputi :
 - i. Melaksanakan Pembinaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), yaitu:
 - a. Kegiatan Sosialisasi Prosedur Pengajuan dan Kewenangan Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) yang diikuti oleh 33 peserta dari 6 Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan yang dilaksanakan tanggal 6 – 7 Nopember 2024 di Kota Banjarmasin
 - b. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Komoditas	Nama Kelompok
1	Tanah Laut	Ikan Bandeng	Kelompok Karya Bakti Kelompok Pada Elo
2	Barito Kuala	Ikan Bandeng	Kelompok Budidaya Ikan Suka Maju Kelompok Bahaur Bahagia
3	Tanah Bumbu	Udang dan Kepiting	Pokdakan Jaya Abadi Pokdakan Pammase Pokdakan Tajur Laut
4	Kotabaru	Udang dan Rumput Laut	Pokdakan Hidup Bersama Pokdakan Putra Tanjung Pokdakan Sinar Laut

- ii. Melaksanakan pertemuan jejaring dan monitoring pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya pada 10 Kabupaten/Kota
 - iii. Melaksanakan pengelolaan data statistic budidaya ikan tahun 2024 melalui penginputan dan validasi data
2. Melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka pendataan dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian lahan yang dimanfaatkan dengan usaha budidaya yang akan dikembangkan, pada 8 (delapan) lokasi pada 8 (delapan) Pokdakan budidaya rumput laut, kakap dan udang di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut.
 3. Melaksanakan penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Darat (Air Payau dan Air Tawar) Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 paket bantuan hibah sarpras budidaya ikan bandeng di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala sedangkan bantuan hibah sarpras ikan gabus sebanyak 3 paket di Kampung Gabus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara.
 4. Melaksanakan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yaitu :
 - ✚ Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko



Koordinasi Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan se- Kalimantan Selatan dilaksanakan di Kota Banjarbaru yang diikuti oleh Pelaku Usaha Pengolahan Ikan, Pembina Mutu Kabupaten/Kota dan Staf Dinas Perikanan dari 13 Kab/Kota se- Kalimantan Selatan.

5. Bimbingan Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam rangka menghasilkan produk yang berdaya saing melalui promosi produk olahan yang dihasilkan oleh pelaku usaha pada kegiatan GEMARIKAN, Bazaar dan Pameran.
6. Melaksanakan Pengelolaan Satu Data PDSPKP melalui Pertemuan Penyusunan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan Validasi Data Statistik Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan di Banjarbaru yang diikuti oleh Petugas Validator, Enumerator dan Staf Dinas Perikanan dari 13 Kabupaten/Kota.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2024 ini, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).
2. Sebagian besar pembudidaya udang, ikan bandeng dan kepiting di tambak menerapkan teknologi budidaya sederhana yang mengandalkan makanan alami.
3. Tidak ada fasilitasi untuk pupuk subsidi bagi pembudidaya ikan oleh pemerintah sehingga menggunakan pupuk non subsidi dengan jumlah yang tidak sesuai rekomendasi karena harganya yang relatif mahal.
4. Pembudidaya rumput laut di tambak baru tahap uji coba pembuatan kebun bibit sebanyak 2 orang di Kabupaten Tanah Bumbu dan belum ada pemetaan lokasi dan jadwal tanam rumput laut di laut sesuai dengan kondisi perairan dan iklim (musim dan angin) di Kabupaten Kotabaru
5. Tingginya harga pakan ikan dan lemahnya permodalan sehingga pemberian pakan terhadap ikan budidaya tidak sesuai rekomendasi
6. BBI lokal produksinya belum optimal dan sebagian besar benih patin didatangkan dari Pulau Jawa sehingga menambah biaya produksi.
7. Adanya kejadian kematian massal ikan pada budidaya ikan di karamba akibat perubahan kualitas air sungai yang drastis rendah akibat hujan di bagian hulu
8. Hilangnya ikan yang dibudidayakan akibat jebolnya pematang tambak akibat banjir rob di pesisir Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala

9. Rendahnya pemahaman pelaku usaha pengolahan ikan dalam penerapan GMP SSOP.
10. Lemahnya permodalan sehingga sebagian besar pelaku usaha pengolahan belum memiliki ruang produksi terpisah dari kegiatan rumah tangga.
11. Kurangnya akses terhadap informasi dan promosi untuk pemasar dan pengolah hasil perikanan.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan pembinaan secara terpadu antara seksi budidaya dengan seksi sarpras budidaya terhadap pembudidaya ikan.
2. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi konsistensi penerapan CBIB bagi pembudidaya yang telah memiliki sertifikat CBIB dan melakukan sosialisasi pemahaman Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan pembinaan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) untuk pembudidaya yang belum menerapkan GMP SSOP.
3. Mengusulkan pemenuhan bantuan pupuk non subsidi ke DJPB – KKP
4. Melakukan bimtek pembuatan pakan dan probiotik biofish
5. Melakukan bantuan hibah sarpras budidaya ikan bandeng, kepiting, udang, kakap, rumput laut dan ikan gabus terhadap pembudidaya ikan di laut, air payau dan air tawar.
6. Peningkatan daya saing produk dan peningkatan kapasitas SDM UMKM melalui pelatihan/bimtek, fasilitasi peralatan/sarana pengolahan pangan, bantuan permodalan, serta perluasan pemasaran (digital marketing).
7. Koordinasi dengan pembina mutu kabupaten/kota, untuk kemudian menyiapkan kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan SKP bagi pelaku usaha pengolahan ikan.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Bidang BP2HP maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan

	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

VI.2. SASARAN KEPALA SEKSI LINGKUP BIDANG BP2HP

VI.2.1. Kepala Seksi Budidaya Perikanan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Budidaya Perikanan terdapat 4 indikator kinerja pada tahun 2024 ini, yaitu :

- Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Resiko
- Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat
- Jumlah Pembudidaya

Berikut pada Tabel 3.83 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Budidaya Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.83 Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Budidaya Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Resiko	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	215 Orang	215 Orang	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

2). Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Seksi Budidaya Perikanan :

Tabel 3.84. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Kepala Seksi Budidaya Perikanan

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2023	2024	
1	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Resiko	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	Jumlah Pembudidaya	50 Orang	215 Orang	100%
Rata-rata Capaian				100%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Budidaya Perikanan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.85. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Budidaya Perikanan Tahun 2024 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Resiko	-	-	4	1	2	2	100%
2	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	2	2	2	100%
3	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat	1	1	1	3	3	3	100%
4	Jumlah Pembudidaya	25	25	50	50	50	215	100%
Rata-rata Capaian								100%
Kategori Capaian								Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya – Upaya Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2024, capaian ke-4 IKU Kepala Seksi Budidaya Perikanan rata-rata sebesar 100,00%.

Sementara itu beberapa hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kepala Seksi Budidaya Perikanan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan

📌 Kegiatan Koordinasi dalam rangka Pendataan dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan telah dilaksanakan antara lain:

- a. Pokdakan Berkat Usaha, Kabupaten Tanah Bumbu
- b. Pokdakan Padaelo, Kabupaten Tanah Bumbu
- c. Pokdakan Sinar Maju Bersatu, Kabupaten Tanah Bumbu
- d. Pokdakan Bersama Jaya, Kabupaten Tanah Bumbu
- e. Pokdakan Tri Cemerlang, Kabupaten Kotabaru
- f. Pokdakan Pada Idi, Kabupaten Kotabaru
- g. Pokdakan Abadi Makmur, Kabupaten Kotabaru
- h. Pokdakan Ikan Manangin dan Pokdakan Putra Tiger, Kabupaten Tanah Laut

Adapun hasil koordinasi dalam rangka Pendataan dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan adalah sebagai berikut :

Pokdakan Berkat Usaha dan Pokdakan Padaelo

1	Nama Pembudidaya	RASYID	JAMALUDDIN, S.Ag
2	Alamat Lokasi Usaha	Desa Pandamaran Jaya, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu	
3	Luas Area Budidaya (Ha) / Unit / Petak	5 Ha	4 Ha
4	Status Kepemilikan	Pribadi	Pribadi
5	Tahun mulai usaha Rumput Laut	September, 2023	September, 2023
6	Asal Bibit	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
7	Tebar (kg) / Unit / Petak	4000 kg	2000 kg
8	Panen (kg) / siklus	Belum masa panen, karena sementara masih pengembangan	

Pokdakan Sinar Maju Bersatu dan Pokdakan Bersama Jaya

Nama Pembudidaya	Jupri (Bersama Jaya)	H.Parung (Sinar Maju Bersatu)	H.Satturuddin (Sinar Maju Bersatu)	H.M.Arpa (Sinar Maju Bersatu)
Status Kepemilikan	Pribadi	Pribadi	Pribadi	Pribadi
Luas Area Budidaya/Tambak (Ha)	4	2	4	5
Tebar/Petak/Unit (Kg)	2000	2000	2000	2000
Parameter Uji Kualitas Air:				
- pH (SNI / 7 – 8,5)	7	7	7	7
- Suhu (°C) (SNI / 26 – 32)	28	30	30	32
- Salinitas (mg/l) (SNI / 28 – 34)	17	18	16	17

Pokdakan Tri Cemerlang

1	Nama Pokdakan	TRI CEMERLANG
2	Alamat Lokasi Usaha	Desa Tanjung Serudung Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru
3	Luas Area Budidaya (Ha)/Unit/Petak	64 M ² x 4
4	Status Kepemilikan	Kelompok
5	Tahun Mulai Usaha Rumput Laut	02 Februari 2020
6	Asal Bibit	UPTD. PBAPL Prov.Kalsel
7	Tebar (kg) / Unit / Petak	1200 kg/unit
8	Panen (kg) /Siklus	Masa pemeliharaan sekitar 4 – 6 bulan, dengan panen 1 kg

Pokdakan Pada Idi dan Pokdakan Abadi Makmur

Nama Pembudidaya	Jamaludin (Pokdakan Pada Idi)	Baharudin (Pokdakan Abadi Makmur)
Status Kepemilikan	Pribadi	Pribadi
Luas Area Budidaya/Tambak (Ha)	60	170
Petak / Unit	15	34
Komoditas	Bandeng, Udang dan Kepiting	Bandeng, Udang dan Kepiting
Asal Benih	BBI Kab.Kotabaru	BBI Kab.Kotabaru
Parameter Uji Kualitas Air:		
- pH (SNI / 7 – 8,5)	7	7
- Suhu (°C) (SNI / 26 – 32)	28	30
- Salinitas (mg/l) (SNI / 28 – 34)	28	30

Pokdakan Ikan Manangin dan Pokdakan Putra Tiger

Nama Pokdakan	Ikan Manangin	Putra Tiger
Alamat Lokasi Usaha	Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut	Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut
Luas Area Budidaya (Ha)	80 Ha	39 Ha
Status Kepemilikan	Pribadi	Pribadi
Tahun Mulai Usaha Udang dan Bandeng	15 Desember 2005	4 Februari 2019
Komoditas	Udang dan Bandeng	Udang dan Bandeng
Asal Bibit Bandeng	Bali	Bali
Tebar (kg) / Unit / Petak	10.000 ekor	10.000 ekor
Panen (kg) /Siklus	Masa pemeliharaan sekitar 6 bulan, dengan panen 1 Kg	Masa pemeliharaan sekitar 6 bulan, dengan panen 1 Kg

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- ✚ Melaksanakan kegiatan pertemuan dalam rangka Validasi Data Statistik Budidaya Perikanan diikuti oleh 39 orang peserta dari 13 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru.
- ✚ Koordinasi dan verifikasi data statistik budidaya perikanan yang dilaksanakan ke Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- ✚ Melaksanakan kegiatan pengambilan sampel dalam rangka pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit ikan/udang, yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pokdakan Berkat Mufakat), Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu (Pokdakan Sumber Makmur), Kabupaten Kotabaru (Pokdakan Mandiri), Kabupaten Tabalong (Kelompok Berkah Bersama),

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pokdakan Sumber Pulau Besar) dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kelompok Tabungan Iwak Toman). Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan usaha budidaya perikanan. Pembudidaya ikan disarankan untuk selalu memonitor kesehatan ikan dan kondisi kualitas air lingkungan budidayanya agar penyebaran penyakit dan penurunan kualitas air budidaya perikanan dapat diantisipasi sebelum menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha budidaya perikanan itu sendiri.

Adapun Hasil Uji Sampel Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan/ Udang sebagai berikut :

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Jenis Sampel	Jumlah	Parameter Uji	Hasil Uji	Keterangan
1	Kolam Patin	Air Kolam	2	Dissolved Oxygen (DO) (mg/l)	6,3	Minimal 3.0 mg/l
	Bapak Yusron			pH	6,7	6 - 9
	Pokdakan Berkat Mufakat			Amoniak (mg/l)	1	Maksimum 0,5 mg/l
	Desa Baluan			Nitrit (mg/l)	0,01	Maksimum 0,06 mg/l
	Kec. Pandawan			Fosfat (mg/l)	0,05	Maksimum 1,0 mg/l
	Kab. Hulu Sungai Tengah			Besi (mg/l)	1,5	Maksimum 0,3 mg/l
			1	Streptococcus	Negatif	
			1	Bacilus Streptobacil	Negatif	
2	Tambak Udang	Air Tambak	2	Dissolved Oxygen (DO) (mg/l)	6,7	Minimal 3.0 mg/l
	M. Suhari			pH	6,6	6 - 9
	Desa Tanggul Rejo			Amoniak (mg/l)	0	Maksimum 0,5 mg/l
	Kec. Tabunganen			Nitrit (mg/l)	0,3	Maksimum 0,06 mg/l
	Kab. Barito Kuala			Fosfat (mg/l)	0	Maksimum 1,0 mg/l
				Besi (mg/l)	0,1	Maksimum 0,3 mg/l
			2	Bakteri	Tidak Teridentifikasi	
3	Tambak Udang	Air Tambak	2	Dissolved Oxygen (DO) (mg/l)	5,7	Minimal 3.0 mg/l
	Ibu Salama			pH	6,6	6 - 9
	Desa Stagen			Amoniak (mg/l)	0,2	Maksimum 0,5 mg/l
	Kec. Pulau Laut Utara			Nitrit (mg/l)	0,02	Maksimum 0,06 mg/l
	Kab. Kotabaru			Fosfat (mg/l)	0,06	Maksimum 1,0 mg/l
				Besi (mg/l)	0,1	Maksimum 0,3 mg/l
			4	Bakteri	Tidak Teridentifikasi	
4	Kolam Sumber Rezeki	Air Kolam	2	Bakteri	Tidak Teridentifikasi	
	Jln. Irigasi Sungai Ulin					
	Kec. Karang Intan					
	Kab. Banjar					

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Jenis Sampel	Jumlah	Parameter Uji	Hasil Uji	Keterangan
5	Jembatan Desa Banyu Hirang	Air Sungai	2	Kadmium (CD)	Tidak Terdeteksi	Maksimum 0,01 mg/l
	Kec. Cempaka			Plumbun (PB)	Tidak Terdeteksi	Maksimum 0,03 mg/l
	Kota Banjarbaru			Merkuri (Hg)	< LOQ 0,00053 mg/l	Maksimum 0,02 mg/l
6	Kolam Nila	Air Sungai	2	Dissolved Oxygen (DO) (mg/l)	4,1	Minimal 3.0 mg/l
	Kolam "A"			pH	6,75	6 - 9
	Pokdakan Sumber Pulau Besar			Amoniak (mg/l)	0,6	Maksimum 0,5 mg/l
	Desa Asam			Nitrit (mg/l)	0	Maksimum 0,06 mg/l
	Kec. Sungai Raya			Fosfat (mg/l)	0	Maksimum 1,0 mg/l
	Kab. Hulu Sungai Selatan			Besi (mg/l)	1	Maksimum 0,3 mg/l
			1	Streptococcus	Negatif	
			1	Bacilus Streptobacil	Negatif	
7	Karamba Jaring Apung	Air Rawa		Dissolved Oxygen (DO) (mg/l)	4,2	Minimal 3.0 mg/l
	Bapak Rudiannor			pH	6,1	6 - 9
	Kelompok Tabungan Iwak Toman			Amoniak (mg/l)	0,4	Maksimum 0,5 mg/l
	Desa Baru			Nitrit (mg/l)	0	Maksimum 0,06 mg/l
	Kec. Danau Panggang			Fosfat (mg/l)	0	Maksimum 1,0 mg/l
	Kab. Hulu Sungai Utara			Besi (mg/l)	0,6	Maksimum 0,3 mg/l
8	Karamba Jaring Apung	Air Sungai		Dissolved Oxygen (DO) (mg/l)	3,9	Minimal 3.0 mg/l
	Bapak Salahudin			pH	5,95	6 - 9
	Kelompok Berkah Bersama			Amoniak (mg/l)	1,6	Maksimum 0,5 mg/l
	Desa Pugaan			Nitrit (mg/l)	0	Maksimum 0,06 mg/l
	Kec. Pugaan			Fosfat (mg/l)	0	Maksimum 1,0 mg/l
	Kab. Tabalong			Besi (mg/l)	0,4	Maksimum 0,3 mg/l
9	Tambak	Udang	2	Virus (WSSV)	Negatif	
	Pokdakan Sumber Makmur (A. Akil)					
	Desa Pendamaran Jaya RT. 003					
	Kec. Satui					
	Kab. Tanah Bumbu					
	Pokdakan Sumber Makmur (Nursiah)	Udang	2	Virus (WSSV)	Negatif	
	Desa Pendamaran Jaya RT. 003					
	Kec. Satui					
	Kab. Tanah Bumbu					

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Jenis Sampel	Jumlah	Parameter Uji	Hasil Uji	Keterangan
10	Pokdakan Kamboja (Idrus)	Udang	1	Virus (WSSV)	Negatif	
	Desa Pantai					
	Kec. Kalumpang Selatan					
	Kab. Kotabaru					
11	Pokdakan Kamboja (Suwardi)	Udang	1	Virus (WSSV)	Negatif	
	Desa Pantai					
	Kec. Kalumpang Selatan					
	Kab. Kotabaru					
12	Pokdakan Kamboja (Salimi)	Udang	1	Virus (WSSV)	Negatif	
	Desa Pantai					
	Kec. Kalumpang Selatan					
	Kab. Kotabaru					
13	Pokdakan Kamboja (Idrus)	Udang	1	Virus (WSSV)	Negatif	
	Desa Pantai					
	Kec. Kalumpang Selatan					
	Kab. Kotabaru					
14	Pokdakan Kamboja (M. Amir)	Udang	1	Virus (WSSV)	Negatif	
	Desa Pantai					
	Kec. Kalumpang Selatan					
	Kab. Kotabaru					
15	Pokdakan Bina Bersama (Subei)	Udang	1	Virus (WSSV)	Negatif	
	Desa Pantai					
	Kec. Kalumpang Selatan					
	Kab. Kotabaru					
16	Pokdakan Bina Bersama (Hasni)	Udang	1	Virus (WSSV)	Negatif	
	Desa Pantai					
	Kec. Kalumpang Selatan					
	Kab. Kotabaru					
17	Pokdakan Bina Bersama (Nawir)	Udang	1	Virus (WSSV)	Negatif	
	Desa Pantai					
	Kec. Kalumpang Selatan					
	Kab. Kotabaru					

Pada Tabel 3.86 berikut disajikan perkembangan pelaksanaan bimtek pengelolaan kesehatan ikan/bimtek pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan :

Tabel 3.86. Perkembangan Pelaksanaan Bimtek Pengendalian dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan di Kalimantan Selatan

No	Tahun	Kabupaten	Jumlah Peserta
1	2017	Tabalong (30 Orang) Hulu Sungai Utara (30 Orang)	60 Orang
2	2018	Hulu Sungai Tengah (30 Orang) Tapin (30 Orang)	60 Orang
3	2019	Tabalong (30 Orang) Hulu Sungai Utara (30 Orang)	60 Orang
4	2020	-	-
5	2021	Tanah Bumbu (30 Orang) Kotabaru (30 Orang)	60 Orang
6	2022	Barito Kuala (35 Orang) Banjarmasin (35 Orang)	70 Orang
7.	2023	Tanah Bumbu (25 Orang) Kotabaru (25 Orang)	50 Orang
8.	2024	Kotabaru - Pokdakan Mandiri (20 Orang) Tabalong - Kelompok Berkah Bersama (15 Orang) Hulu Sungai Selatan - Pokdakan Sumber Pulau Besar (15 Orang)	50 Orang

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

- Melaksanakan kegiatan Pertemuan Jejaring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya, yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru. Adapun hasil pertemuan jejaring adalah tersedianya Konsep PERGUB tentang Pembentukan Gugus Tugas Tanggap Darurat Pengendalian Penyakit Ikan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Prosedur Pengajuan dan Kewenangan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) yang diikuti oleh 33 peserta dari 6 Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 7 November 2024 di Kota Banjarmasin.

- ✚ Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) telah terealisasi dilaksanakan sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok
1.	Tanah Laut	Kelompok Karya Bakti dan Pada Elo
2.	Barito Kuala	Kelompok Budidaya Ikan Suka Maju dan Bahaur Bahagia
3.	Tanah Bumbu	Pokdakan Jaya Abadi dan Pammase
4.	Kotabaru	Pokdakan Hidup Bersama

- ✚ Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Budidaya Rumput Laut telah terealisasi dilaksanakan sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok
1.	Kotabaru	Kelompok Sinar Laut, Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar
2.	Kotabaru	Kelompok Putra Tanjung, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru

- ✚ Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Budidaya Kepiting di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2024 ini, hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Realisasi produksi budidaya perikanan Kalimantan Selatan tahun 2024 diperkirakan sekitar 151.438 ton, belum mencapai target sebesar 177.272 ton, yang disebabkan antara lain :
 - Minimnya penambahan luas lahan budidaya bahkan cenderung menyusut
 - Kurangnya minat pembudidaya merubah sistem budidaya tradisional menjadi sistem tradisional plus atau semi intensif khususnya pada budidaya air payau sehingga produktivitas rendah
 - Data produksi budidaya perikanan dihitung berdasarkan metode sampling sehingga kemungkinan ada bias data.
 - Kenaikan biaya produksi tidak sebanding dengan kenaikan harga jual komoditas perikanan sehingga mengurangi margin yang mengakibatkan sektor budidaya tidak tumbuh signifikan

2. Nilai Tukan Pembudidaya Ikan (NTPi) cenderung stagnan, hal ini disebabkan dalam bulan bulan tertentu indeks jual pembudidaya lebih rendah dibanding indeks beli yang menyebabkan nilai NTPi menurun.
3. Belum maksimalnya kesadaran akan pentingnya melengkapi perizinan dasar berusaha berbasis resiko khususnya NIB (Nomor Induk Berusaha)
4. Rendahnya kesadaran dari pembudidaya ikan tentang pentingnya pelaksanaan prinsip CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik), meskipun secara regulasi untuk sertifikasi hanya diwajibkan untuk pembudidaya skala besar dan atau usaha budidaya dengan komoditas ekspor
5. Dalam hal CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik), masih banyak unit-unit pembenihan ikan yang belum melaksanakan prinsip CPIB untuk menghasilkan benih ikan baik, hal ini terkait masih dalam masa transisi aturan kewenangan pembinaan dan sertifikasi CPIB sesuai dengan struktur dan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terbaru.
6. Belum ada insentif harga untuk produk benih dan ikan konsumsi yang telah melaksanakan sertifikasi CBIB dan CPIB

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan sinergi dengan pihak Kabupaten/Kota dan Kementerian termasuk Penyuluh Perikanan, untuk terus melaksanakan pembinaan teknis untuk peningkatan produktivitas pembudidaya ikan
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang pentingnya melengkapi perizinan dasar dan perizinan sektor bagi usaha pembudidaya ikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

4). Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Seksi Budidaya Perikanan maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

VI.2.2. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat 1 indikator kinerja utama pada tahun 2024 ini, yaitu :

- Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko
- Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing.

Berikut kegiatan pendukung dalam tercapainya Indikator Kinerja Utama pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diantaranya ialah :

- Persentase Kegiatan Pertemuan Dalam Rangka Koordinasi Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan se- Kalimantan Selatan
- Persentase Kegiatan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dalam rangka Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan Pencegahan Stunting
- Persentase Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
- Persentase Kegiatan Pertemuan Petugas Angka Konsumsi Ikan (AKI)
- Persentase Kegiatan Pertemuan Petugas Satu Data PDSPKP
- Persentase Kegiatan Pameran Kalsel Expo dan Pameran dalam rangka Memperingati Hari Ikan Nasional (HARKANAS)
- Persentase Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi dan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional

Berikut pada Tabel dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 :

Target 3.87. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi P2HP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25	27	108
2	Terlaksananya Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi Unit Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	25	32	128
Rata-rata Capaian					118%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

Target Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada tahun 2024 ini ada 2 Kinerja Utama yaitu :

1. Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar telah realisasi sebanyak 27 Unit Usaha dari target 25 Unit Usaha dan,
2. Terlaksananya Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Bagi Unit Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing telah realisasi sebanyak 32 Unit Usaha dari target 25 Unit Usaha.

Kegiatan Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko sebagai pendukung untuk Indikator Kinerja Utama Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha

Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar realisasi sebanyak 27 Unit Usaha dengan capaian 108% dari target 25 Unit Usaha, antara lain :

- a. Kabupaten HSS sebanyak 1 unit usaha
- b. Kabupaten Kotabaru sebanyak 5 unit usaha
- c. Kabupaten Balangan sebanyak 1 unit usaha
- d. Kabupaten Tabalong sebanyak 1 unit usaha
- e. Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2 unit usaha
- f. Kabupaten Tanah Laut sebanyak 6 unit usaha
- g. Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1 unit usaha
- h. Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 1 unit usaha
- i. Kota Banjarmasin sebanyak 1 unit usaha
- j. Kota Banjarbaru sebanyak 2 unit usaha
- k. Kabupaten Banjar sebanyak 6 unit usaha

Berikut Data Pelaku Usaha/ Unit Pengolahan Ikan (UPI)

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA UPI	ALAMAT	PERSYARATAN PERIJINAN BERUSAHA					SKP	KETERANGAN
				KUSUKA PENGOLAHAN	IJIN USAHA	NIB	PIRT	HALAL /HAKI		
1.	Banjarbaru	POKLAHSAR JAYA MAKMUR CASHEILA	Jl. Tunas Baru Komp. Graha Mega II No. 3 Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan 70714	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
		Pelangi Cakrawala Mandiri	Jl. Sukarelawan Gg. Al Aman No. 03 RT./RW. 024/010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
2.	Banjarmasin	Poklarsar MEKAR BERSAMA	Jl. Pangeran RT.009 RW. 001 Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	✓	✓	✓	✓	✓	-	BELUM MEMENUHI STANDAR
3.	Banjar	Poklarsar Sari Rasa dan Selera Banua	Jl. Kampung Melayu Ulu RT/RW. 003/002 Desa Melayu Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar	✓	✓	✓	✓	✓	-	RUANG PRODUKSI ADA KURANG RESPON

		DANISH KITCHEN	Komplek Berlian Lestari Permai no. 14 Jl. Gotong Royong III, Sungai Sipai Martapura Kel. Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 70611	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
		POKLAHSAR (UMKM KATUYUNG)	Komplek Citra Permata Biru, Sekumpul Martapura	✓	✓	✓	✓	✓	-	PROSES SKP
		PT. FRESH ON TIME SEAFOOD'	JL. UPT IRI GASI RIAM KANAN II, Desa, Sungai Batang, Kec. Martapura Bar., Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70618	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
		SURIASYAH	Aluh - aluh, Kabupaten Banjar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
		PT. AGROBOGA UTAMA CABANG BANJARMASIN	Komp Pergudangan Bumi Basirih D6, Jl. Gubernur Soeardjo, Basirih, Kec. Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70242	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
4.	Hulu Sungai Selatan	POKLAHSAR TIGA PUTERA DAHA	Jl. Baruh Kambang, Baruh Kembang, Kec. Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
5.	Hulu Sungai Tengah	Poklarsar Paiwakan Banua Haruyan	Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	-	PROSES SKP
6.	Hulu Sungai Utara	Kerupuk Ibu Ana	Desa Kota Raden No. 84, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara	✓	-	-	✓	✓	-	RUANG PRODUKSI ADA KURANG RESPON
7.	Balangan	Poklarsar Usaha Bersama	Jl. Desa Buntu Karaw, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan	-	-	✓	✓	✓	-	BEDAH RUANG PRODUKSI
8.	Tabalong	Kelompok MM - VIEA	Desa Banua Lawas, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong	-	-	-	✓	-	-	BEDAH RUANG PRODUKSI
9.	Tanah Laut	Poklarsar Jalan Baimbay "OMEGA AMPLANG"	JL. Wisata Takisung, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut	✓	✓	✓	✓	✓	-	RUANG PRODUKSI SUDAH TERPISAH
		Poklarsar "USAHA MANDIRI"	Desa Tanjung Dewa, Kecamatan PAnyipatan, Kabupaten Tanah Laut	✓	✓	✓	✓	✓	-	RUANG PRODUKSI SUDAH TERPISAH

		UD SURYA BARU	Jl. Swadaya, Raden, Kec. Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70853	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
		PT. EBIMAS BESAR	jl. Ahmad Yani km. 45,6, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Gn. Raja, Kec. Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70854	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
		PT. KARIMATA TIMUR	Jl. Pintas Sambangan, Nusa Indah, Kec. Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70852	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
		CV. BARUNA SINAR ABADI	Jl. Pintas Sambangan No.KM, RW.47, Pulau Sari, Kec. Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70854	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
10.	Tanah Bumbu	Poklahsar Tapandang	Jl. HM Amin RT.004 Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu	✓	✓	✓	✓	✓	-	BEDAH RUANG PRODUKSI
		PT. BORNEO EBI SAKANA	Jl Keramat Pisang, Kabupaten Tanah Bumbu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
11.	Kotabaru	Amplang Saijaan	Jl. H. Hasan Basri No.13, Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113	✓	✓	✓	✓	✓	-	RUANG PRODUKSI ADA KURANG RESPON
		AMPLANG QITA	Jl. Baharu Utara, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
		PT. MISAJA MITRA	Jl. Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
		PT. SAIJAAN LINTAS PULAU LAUT	JALAN RAYA STAGEN, KOMPLEK PPI STAGEN Kabupaten Kotabaru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP
		PT. JIABAO JITUAN INDONESIA	Jalan Raya PPI No. 01, RT. 10/RW. 03, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	PERIJINAN LENGKAP

Adapun Kegiatan yang mendukung dalam tercapainya Indikator Kinerja Utama pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diantaranya ialah :

1. Terlaksananya kegiatan pertemuan dalam rangka Koordinasi Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan se- Kalimantan Selatan dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan telah terealisasi 100%.

Kegiatan Bazar/ Pasar Murah dalam rangka Memperingati HBKN, Kegiatan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dalam rangka Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan Pencegahan Stunting, Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), Kegiatan Pameran Kalsel Expo dan Pameran dalam rangka Memperingati Hari Ikan Nasional (HARKANAS) sebagai pendukung untuk Indikator Kinerja Utama Terlaksananya Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Bagi Unit Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing realisasi sebanyak 32 Unit Usaha dengan capaian 128% dari target 25 Unit Usaha, antara lain :

1. Kegiatan Bazar/ Pasar Murah dalam rangka Memperingati HBKN berpartisipasi dengan 10 Unit Usaha.
2. Kegiatan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dalam rangka Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan Pencegahan Stunting berpartisipasi dengan 13 Unit Usaha.
3. Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) berpartisipasi dengan 2 Unit Usaha.
4. Kegiatan Pameran Kalsel Expo dan Pameran dalam rangka Memperingati Hari Ikan Nasional (HARKANAS) berpartisipasi dengan 8 Unit Usaha.

Berikut Keragaan UPI atau UMKM

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA UPI	ALAMAT	KEGIATAN PEMBERDAYAANN USAHA/ PROMOSI PRODUK			JENIS PRODUK
				GEMARIKAN	BAZAR	PAMERAN	
1	Banjarbaru	Pelangi Cakrawala Mandiri	Jl. Sukarelawan Gg. Al Aman No. 03 RT./RW. 024/010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru	-	✓	✓	Pempek, Tekwan
		POKLAHSAR JAYA MAKMUR CASHEILA	Jl. Tunas Baru Komp. Graha Mega II No. 3 Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan 70714	✓	✓	✓	Abon Ikan, Sepat Sambal, Kerupuk Haruan
		AMPLANG IDAMAN	Jalan Sriwijaya Kelurahan Landasan Ulin Utara.	-	-	✓	Amplang
		MAMA DILDAN	Jl. Raya Aries komplek Bumi Cahaya No.1 no. 4, Bintang, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714	-	✓	✓	Saluang Goreng, Saluang Renyah, Telang Masak Asam Manis
		PEMPEK CEKYAH	komplek Bumi Cahaya Bintang, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714	-	-	✓	Pempek Ikan
		VIRCA	Jl.Sungai Sumba No.4 Rt.10/01 Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714	-	✓	✓	Ikan Asap, bandeng Presto
		LELE BUMBU RISKA (BerryBee Fish & Farm)	Jl. Ir. PM. Noor KM 1, Pondok Darmindho Permai No.65, RW.5, Sei Ulin, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714	✓	✓	-	Ikan Segar Bumbu
		LELE BUMBU BABY LELE	Jl. Cahaya Jalur 10, Loktabat Sel., Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714	-	✓	-	Ikan Segar Bumbu
		RIAN FROZEN FOOD	Pondok Darmindho Permai RW.5, Sei Ulin, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714	-	✓	-	Ikan Segar Bumbu
		BU ISTIK (alhusna food)	Jalan Karang Mekar No.101 RT.20 RW.11 Loktabat Utara, Banjarbaru 70714.	-	✓	-	Frozen Food

		POKDAKAN SUGIH MAKMUR	Jl. Mentaos Raya, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714	-	✓	-	Ikan Patin
2	Banjar	DANISH KITCHEN	Komplek Berlian Lestari Permai no. 14 Jl. Gotong Royong III, Sungai Sipai Martapura Kel. Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 70611	✓	✓	✓	Frozen Food
		POKLAHSAR (UMKM KATUYUNG)	Komplek Citra Permata Biru, Sekumpul Martapura	✓	✓	✓	Kue Ikan, Abon Ikan, Tepung Ikan
		RENA AMPLANG	Komplek Asabri, Desa Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70612	-	-	✓	Amplang
		POKDAKAN LESTARI	Cindai Alus Kecamatan Martapura	-	✓	-	Ikan Patin
		DAPUR AYA	Sekumpul, Martapura	✓	-	-	Frozen Food
		NAGET IKAN HAFIDZ	Sekumpul, Martapura	✓	-	-	Frozen Food
		TOKO NAFIS	Sekumpul, Martapura	✓	-	-	Frozen Food
3	Hulu Sungai Selatan	POKLAHSAR TIGA PUTERA DAHA	Jl. Baruh Kambang, Baruh Kembang, Kec. Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,	✓	✓	✓	Kerupuk Ikan
4	Hulu Sungai Tengah	Poklahsar Paiwakan Banua Haruyan	Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah	✓	-	✓	Abon Ikan,
		ANN FOOD	desa junjung buih sungai malang rt.004 amuntai tengah, kalimantan selatan	✓	-	-	Abon Ikan
5	Balangan	Poklahsar Usaha Bersama	Jl. Desa Buntu Karaw, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan	✓	-	-	Kerupuk Kulit Pisang Ikan Haruan
6	Tabalong	Poklahsar Gugah Selera (GEMILANG MAJU JAYA)	Jl. A. Yani, Desa Mantuil RT.001 Kecamatan Muara Arus, Kabupaten Tabalong	✓	✓	✓	Stik Ikan, Es krim Ikan, Kacang Salut Haruan

7	Tanah Laut	Poklahsar Jalan Baimbay "OMEGA AMPLANG"	Jl. Wisata Takisung, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut	✓	-	✓	Amplang
8	Tapin	R&R FOOD	Jl. Bupati H. Said Alwi, Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan	✓	✓	✓	Abon Ikan, Pentol Ikan

Adapun Kegiatan yang mendukung dalam tercapainya Indikator Kinerja Utama pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diantaranya ialah :

1. Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Petugas Angka Konsumsi Ikan (AKI) dengan target kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan telah terealisasi 100%.
2. Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Petugas Satu Data PDSPKP dengan target kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan telah terealisasi 100%.
3. Terlaksananya Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional sebanyak 2 kali kegiatan telah terealisasi 100%.

1) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 3.88. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Kepala Seksi P2HP

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2023	2024	
1	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	-	27 Unit	100%
2	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	23 Unit	32 Unit	100 %

Rata-rata Capaian	118%
Kategori Capaian	Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.89 Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi P2HP Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	-	-	-	-	25	27	108
2	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	0	0	28	23	25	32	128
Rata-rata Capaian								100%
Kategori Capaian								Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

2) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM atau Unit Pengolah Ikan di Kalimantan Selatan diantaranya adalah aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, kualitas sumberdaya manusia pengelolanya, dan kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi. Adapun strategi penguatan dan pengembangan UMKM atau Unit Pengolah Ikan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing produk dan peningkatan kapasitas SDM UMKM melalui pelatihan/bimtek, fasilitasi peralatan/sarana pengolahan pangan, bantuan permodalan, serta perluasan pemasaran (digital marketing), sehingga dapat menghasilkan produk olahan yang berdaya saing.

Produk olahan yang berdaya saing mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada produk perikanan yang diproduksi, untuk itu UMKM atau Unit Pengolah Ikan harus memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Beberapa kendala masih dihadapi oleh para UMKM atau Unit Pengolah Ikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya salah satu syarat dari terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah tempat produksi harus terpisah dengan dapur rumah tangga. Kebanyakan dari UMKM atau Unit Pengolah Ikan di Kabupaten/Kota dapur produksinya masih belum terpisah, sehingga ini menjadi kendala masih banyaknya UMKM atau Unit Pengolah Ikan di Kabupaten/Kota masih belum memiliki SKP.

Pada tahun 2024 ini, langkah awal yang diupayakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah melaksanakan koordinasi dengan Pembina Mutu masing-masing Kabupaten/Kota, untuk kemudian menyiapkan kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan SKP bagi UMKM Kabupaten/Kota binaan Pembina Mutu yang memungkinkan memenuhi persyaratan. Kemudian Pembina Mutu dari Provinsi akan melaksanakan pembinaan ke UMKM atau Unit Pengolah Ikan Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan oleh Pembina Mutu Kabupaten/Kota.

Untuk Indikator Kinerja Utama pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yaitu Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko telah realisasi sebanyak 27 Unit Usaha dengan capaian 108% dan Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing telah realisasi sebanyak 32 Unit Usaha dengan capaian 128%.

Berikut disajikan perkembangan pemberian paket bantuan di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :

Tabel 3.90 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko

No.	Tahun	Jumlah Unit Usaha
1.	2017	-
2.	2018	-
3.	2019	-
4.	2020	-
5.	2021	-
6.	2022	-
7.	2023	-
8.	2024	27

Tabel 3.91 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing

No	Tahun	Jumlah Unit Usaha
1.	2017	-
2.	2018	-
3.	2019	-
4.	2020	-
5.	2021	-
6.	2022	28
7.	2023	23

8.	2024	32
----	------	----

3) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

VI.2.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budiadaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (BP2HP)

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat 2 indikator kinerja pada tahun 2024 ini, yaitu :

- a. Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Berikut pada Tabel 3.92 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 :

Tabel 3.92. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana BP2HP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan.atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	7 Unit	70%
2	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	1 Unit	100%
Rata-rata Capaian					85%
Kategori Capaian					Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

Target Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada tahun 2024 ini adalah 11 unit sarana pembudidayaan ikan yang berupa bantuan benih ikan bandeng dan pakan, sarana budidaya gabus haruan, benih udang windu (gelondongan), sarana prasarana budidaya kepiting, polikultur udang windu dan kepiting, dan sarana budidaya rumput laut. Dari 11 unit target tersebut hanya 8 unit yang dapat terealisasi dan 3 unit tidak terealisasi dikarenakan ketidaksiapan kelompok untuk memenuhi syarat-syarat teknis budidaya di tambak dan adanya permintaan kelompok terhadap ukuran benih ikan/udang yang telah tercantum di dalam RKA 2024 serta pengalaman kelompok yang baru satu tahun menguasai teknis budidaya di tambak mengakibatkan penyesuaian anggaran hibah yang di anggarkan.

Adapun paket bantuan yang terealisasi/diserahkan adalah :

1. 2 Unit Sarana Budidaya Bandeng di Kabupaten Barito Kuala
2. 2 Unit Sarana Budidaya Bandeng di Kabupaten Tanah Laut
3. 1 Unit Sarana Prasarana Budidaya Gabus Haruan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. 1 Unit Sarana Prasarana Budidaya Gabus Haruan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
5. 1 Unit Sarana Prasarana Budidaya Gabus Haruan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

6. 1 Unit Sarana Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Kotabaru

Adapun paket bantuan yang tidak terealisasi/tidak diserahkan adalah :

1. 1 Unit Sarana Prasarana Budidaya Kepiting di Kabupaten Tanah Bumbu
2. 1 Unit Sarana Budidaya Polikultur Udang Windu dan Kepiting di Kabupaten Tanah Bumbu
3. 1 Unit Sarana Budidaya Udang Windu (gelondongan) di Kabupaten Tanah Bumbu

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tabel 3.93

Tabel 3.93. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2023	2024	
1	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	7 Unit	70%
2	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	1 Unit	100 %
Rata-rata Capaian				85%
Kategori Capaian				Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya pada Tabel 3.94 :

Tabel 3.94. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana BP2HP Tahun 2024 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Tahun 2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	10	5	5	10	7	70%
2	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0	0	0	1	1	1	100%
Rata-rata Capaian								85%
Kategori Capaian								Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2024

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Salah satu permasalahan yang dihadapi pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar di Kalimantan Selatan adalah terbatasnya permodalan usaha. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunannya menyediakan paket/unit bantuan hibah sarana budidaya bagi kelompok.

Pembudidaya Ikan (Pokdakan) bantuan tersebut sifatnya stimulan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas usaha perikanan.

Pada tahun 2024, indikator Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 70%, dan untuk indikator Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut terealisasi sebesar 100%.

Sementara itu, untuk pemberian paket bantuan bagi Poklahsar sejak tahun 2020 tidak lagi dialokasikan anggarannya, dikarenakan adanya pemberlakuan UU 23 Tahun 2014 dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang berdampak pada pembagian kewenangan pembinaan unit usaha P2HP. Untuk pengelolaan P2HP skala kecil mikro kewenangannya berada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk unit usaha P2HP skala menengah dan skala besar di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berikut disajikan perkembangan pemberian paket bantuan di Seksi Sarana dan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :

Tabel 3.95. Perkembangan Pemberian Paket Bantuan di Kalimantan Selatan

No.	Tahun	Jumlah Paket Bantuan Yang Diserah terimakan (Kelompok)
1.	2017	40
2.	2018	39
3.	2019	16
4.	2020	-
5.	2021	10
6.	2022	5
7.	2023	6
8.	2024	8

Keterangan :

Untuk Tahun 2024 :

7 unit paket bantuan dari Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan 1 unit paket bantuan dari Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Tabel 3.96. Data Penerima Hibah Sarana Budidaya TA. 2024

NO.	PENERIMA HIBAH	JENIS HIBAH	VOLUME		ALAMAT	KABUPATAEN
1	Kelompok Suka Maju	Benih Ikan Bandeng dan Pakan	benih 390.000 ekor	pakan 415 kg	Desa Tanggul Rejo Kecamatan Tabungane	Barito Kuala
2	Kelompok Bahaur Bahagia Sungai Telan Besar	Benih Ikan Bandeng dan Pakan	benih 390.000 ekor	pakan 415 kg	Desa Sungai Telan Besar Kecamatan Tabungane	Barito Kuala
3	Kelompok Karya Bakti	Benih Ikan Bandeng dan Pakan	benih 400.000 ekor	pakan 555 kg	Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap	Tanah Laut
4	Kelompok Karya Padaelo	Benih Ikan Bandeng dan Pakan	benih 400.000 ekor	pakan 555 kg	Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap	Tanah Laut
5	Kelompok Sumber Pulau Besar	Sarana Prasarana Budidaya Gabus Haruan	Jaring Trowl 12 buah	pakan 23 Sak	Desa Asam Kecamatan Sungai Raya	Hulu Sungai Selatan
6	Kelompok Mufakat	Sarana Prasarana Budidaya Gabus Haruan	Jaring Tancap 11 buah	pakan 10 Sak	Desa Mahang Baru Kecamatan Labuan Amas	Hulu Sungai Tengah
7	Kelompok Tabungan Iwak Toman	Sarana Prasarana Budidaya Gabus Haruan	Keramba Ulin Beserta Pelampung 10 buah	pakan 75 Sak	Desa Baru Kecamatan Danau Panggang	Hulu Sungai Utara

			Benih Gabus Haruan 7.500 ekor			
8	Kelompok Sinar Laut	Bibit Rumput Laut, Tali Nylon dan Sampan	Bibit 250 kg, Tali nylon 6.100 meter, dan Sampan 1 buah	-	Desa Teluk Tamiang Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar	Kotabaru

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

VII. SEKRETARIAT

VII.1. SASARAN SEKRETARIS

Tabel 3.97. Perjanjian Kinerja Sekretaris

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Berbasis SMART Goals	100%
		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Telah Diversifikasi/Direkonsiliasi Oleh Instansi Terkait	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Dapat Dimanfaatkan/ Dioperasionalkan/Digunakan Sesuai Dengan Fungsi/Peruntukkan/ Masterplan Yang Telah Ditetapkan	100%
		Persentase ASN Yang Dapat Menerapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Umum Kantor Yang Telah Diberikan	100%
		Persentase Pengadaan Barang Yang Telah Termanfaatkan Untuk Menunjang Layanan Kantor	100%

		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Jasa Kantor Yang Telah Diberikan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dapat Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya	100%

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Berikut pada Tabel 3.98 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan pada kinerja utama dan indikator kinerja Sekretaris berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.98. Target dan Realisasi Kinerja Sekretaris

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Berbasis SMART Goals	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Telah Diversifikasi/Direkonsiliasi Oleh Instansi Terkait	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Dapat Dimanfaatkan/ Dioperasionalkan/Digunakan Sesuai Dengan Fungsi/Peruntukkan/ Masterplan Yang Telah Ditetapkan	100%	100%	100%
		Persentase ASN Yang Dapat Menerapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Umum Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang Yang Telah Termanfaatkan Untuk Menunjang Layanan Kantor	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Jasa Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%

		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dapat Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 20223

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untuk Sekretaris :

Tabel 3.99. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		% Capaian
			2023	2024	
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Berbasis SMART Goals	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Telah Diversifikasi/Direkonsiliasi Oleh Instansi Terkait	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Dapat Dimanfaatkan/ Dioperasionalkan/Digunakan Sesuai Dengan Fungsi/Peruntukkan/ Masterplan Yang Telah Ditetapkan	100%	100%	100%
		Persentase ASN Yang Dapat Menerapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Umum Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang Yang Telah Termanfaatkan Untuk Menunjang Layanan Kantor	100%	100%	100%

		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Jasa Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dapat Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya	100%	100%	100%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.100 disajikan perbandingan realisasi kinerja yang dicapai oleh Sekretaris pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 3.100 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					% Capaian
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Berbasis SMART Goals	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Telah Diversifikasi/Direkonsiliasi Oleh Instansi Terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Dapat Dimanfaatkan/ Dioperasikan/Digunakan Sesuai Dengan Fungsi/Peruntukkan/ Masterplan Yang Telah Ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ASN Yang Dapat Menerapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Umum Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang Yang Telah Termanfaatkan Untuk Menunjang Layanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Jasa Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dapat Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian								100%
Kategori Capaian								Sangat Memuaskan

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indikator Kinerja Utama yang diemban oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 capaian yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 100%.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Sekretariat maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
--	--	--

VII.2. SASARAN KEPALA SUB BAGIAN LINGKUP SEKRETARIAT

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Tabel 3.101. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan					
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
Sub Bagian Keuangan dan Aset					
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/Bulan	145 Orang/Bulan	100%
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%

6	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
7	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	5 Paket	100%
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	880 Orang	880 Orang	100%
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	489 Orang	489 Orang	100%
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%

7	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
9	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	100%
10	Tersedianya Mebel untuk Menunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%
11	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	139 Unit	139 Unit	100%
12	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
13	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
14	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarnya Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	100%
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%

16	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	218 Unit	218 Unit	100%
----	--	--	----------	----------	------

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 untk Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat :

Tabel 3.102. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% Capaian
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan					
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	17 Dokumen	100%
Sub Bagian Keuangan dan Aset					
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/Bulan	145 Orang/Bulan	100%
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	12 Dokumen	100%
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	8 Laporan	2 Laporan	100%
5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	665 Laporan	12 Laporan	100%

		dan Konsultasi SKPD			
6	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	12 Paket	100%
7	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
1	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	5 Paket	100%
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	785 Orang	880 Orang	100%
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	489 Orang	100%
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%

7	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
8	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
9	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	4 Unit	14 Unit	100%
10	Tersedianya Mebel untuk Menunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100%
11	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	63 Unit	139 Unit	100%
12	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
13	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
14	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarnya Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	31 Unit	100%
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	100%

16	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	174 Unit	218 Unit	100%
----	--	--	----------	----------	------

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

IKU Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 IKU tersebut tercapai 100% (Sangat Memuaskan).

Berikut daftar dokumen yang tersusun selama tahun 2024 :

1. Buku Angka Konsumsi Ikan (AKI) Tahun 2023
2. Buku LAKIP Tahun 2023
3. Buku LKPj/LPPD Tahun 2023
4. Buku Nilai Tukar Perikanan
5. Buku SAKU Kelautan dan Perikanan
6. Buku Statistik Kelautan dan Perikanan
7. Buku Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
8. Buku Statistik Perikanan Budidaya
9. Buku Statistik Perikanan Tangkap
10. Buku Laporan Tahunan
11. Buku Rancangan Awal RENJA Tahun 2025
12. Buku Rancangan Akhir RENJA Tahun 2025
13. Buku Rancangan Awal RENJA Perubahan Tahun 2024
14. Buku Rancangan Akhir RENJA Perubahan Tahun 2024
15. Laporan Konsolidasi dan Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2024
16. Laporan MONEV TERPADU Tahun 2024
17. Kajian Roadmap Kelautan dan Perikanan

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada tahun 2024 ini mempunyai 7 (tujuh) IKU, dan ketujuh IKU tersebut tercapai 100% (Sangat Memuaskan).

Berikut daftar dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Dokumen Laporan Inventarisasi Barang Daerah yang tersusun selama tahun 2024:

- 1 Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan
 - Laporan Keuangan
 - Laporan Konsolidasi Keuangan

- 2 Dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - Laporan Rencana Kebutuhan BMD
 - Laporan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
 - Laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB)
 - Laporan Barang Persediaan
 - Laporan Rekapitulasi Aset

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tahun 2024 ini mempunyai 16 (enam belas) IKU dan semua indikator telah mencapai realisasi 100% (Sangat Memuaskan)

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Penganggaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2024 mengalami penyesuaian dari anggaran semula yang tercantum dalam DPA-SKPD TA. 2024.

Pada anggaran APBD TA 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 61.516.844.999 dan pada anggaran perubahan APBD-P TA 2024 berubah menjadi Rp. 70.861.757.842

Berikut pada Tabel 3.103 disajikan program dan kegiatan beserta anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.103. Program dan Kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Desentralisasi Tahun Anggaran 2024	Pagu Anggaran (Rp)	
		Sebelum	Sesudah
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	61.719.774.999	70.861.757.842
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	61.719.774.999	70.861.757.842
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	61.719.774.999	70.861.757.842
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.724.790.499	47.367.399.442
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.470.000.000	3.519.886.500
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.470.000.000	3.519.886.500
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.830.523.543	28.750.045.743
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.308.970.243	28.087.220.843
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	517.953.300	659.224.900
3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.600.000	3.600.000
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	180.666.100	253.076.100
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	180.666.100	253.076.100
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.324.842.500	1.443.569.400
3.25.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	500.031.400	508.031.400
3.25.01.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	174.340.000	174.340.000
3.25.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	172.748.100	291.475.000
3.25.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	469.723.000	469.723.000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.686.469.700	2.096.911.300
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	133.470.000	133.470.000
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.923.900	169.375.900
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.185.000	116.135.000
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.154.800	101.262.400
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	82.008.000	82.008.000
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.046.728.000	1.494.660.000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.308.802.300	5.947.178.300
3.25.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.461.240.000	2.636.636.000

3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	480.000.000	955.980.000
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.367.562.300	2.354.562.300
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.299.382.530	1.464.108.073
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110.662.000	110.662.000
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.609.230	356.598.773
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	936.111.300	996.847.300
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.624.103.826	3.892.624.026
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	887.290.000	956.050.000
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.588.903.826	2.788.664.026
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.910.000	147.910.000
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	6.551.967.000	6.551.967.000
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	5.003.064.500	5.003.064.500
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.040.000.000	1.040.000.000
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.660.000.000	3.660.000.000
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	303.064.500	303.064.500
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	975.983.500	975.983.500
3.25.02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Minyak dan Gas Bumi	335.000.000	335.000.000
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	240.983.500	240.983.500
3.25.02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	400.000.000	400.000.000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	572.919.000	572.919.000
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	321.363.000	321.363.000
3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	251.556.000	251.556.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.791.089.600	8.260.463.500
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1.781.468.000	4.950.841.900
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	120.863.000	120.863.000
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.660.605.000	4.829.978.900
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.210.621.600	2.510.621.600
3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	771.644.400	771.644.400
3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.438.977.200	1.738.977.200
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	799.000.000	799.000.000
3.25.03.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	204.884.600	204.884.600
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	395.379.700	395.379.700
3.25.03.1.03.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	198.735.700	198.735.700
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.597.588.300	2.597.588.300
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	150.000.000	150.000.000

3.25.04.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	150.000.000	150.000.000
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	864.458.300	864.458.300
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	108.410.000	108.410.000
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	90.160.000	90.160.000
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	254.084.300	254.084.300
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	411.804.000	411.804.000
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.583.130.000	1.583.130.000
3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.583.130.000	1.583.130.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.715.908.400	3.745.908.400
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.048.892.800	2.019.772.800
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	489.239.400	460.119.400
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1.343.567.200	1.343.567.200
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	13.156.200	13.156.200
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	202.930.000	202.930.000
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.667.015.600	1.726.35.600
3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1.548.035.000	1.607.155.000
3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	76.977.000	76.977.000
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	42.003.600	42.003.600
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.338.431.200	2.338.431.200
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2.338.431.200	2.338.431.200
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	218.556.800	218.556.800
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	2.119.874.400	2.119.874.400
TOTAL		61.719.774.999	70.861.757.842

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Berikut anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024:

Tabel 3.104. Anggaran dan Realisasi Menurut Program Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Bidang	Pagu Anggaran (Rp)	Pencapaian Tahun 2024				
			Target (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Sekretariat	47.367.399.442	100	98,63	42.934.435.063	90,64	4.432.964.379
2	Bidang PRL	6.551.967.000	100	100	6.226.031.876	95,03	325.935.124
3	Bidang Perikanan Tangkap	8.260.463.500	100	100	7.549.128.880	91,39	711.334.620
4	Bidang BP2HP	4.936.019.500	100	91,60	4.018.542.032	81,41	917.477.468
5	Bidang PSDKP	3.745,908.400	100	100	3.335.928.162	89,06	409.980.238
Total		70.861.757.842	100	98,50	64.064.066.013	90,41	6.797.691.829

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 adalah :

1. 6 program,
2. 20 kegiatan dan
3. 43 sub kegiatan,

sedangkan pada tahun 2024 ini untuk program, kegiatan dan sub kegiatan adalah :

1. 6 program,
2. 21 kegiatan dan
3. 54 sub kegiatan.

Berikut perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Tabel 3.105. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tahun 2023			Tahun 2024		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Pengadaan Mebel			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Surat Menyurat		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik			Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut		Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat

	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
					Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
					Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan			Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT			Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sd 12 Mil
					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sd 12 Mil
					Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)
				Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan

					Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
					Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
					Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing
Total			Total		
6 Program	20 Kegiatan	43 Sub Kegiatan	6 Program	21 Kegiatan	54 Sub Kegiatan
Total Anggaran			Total Anggaran		
Rp. 43.481.396.796			Rp. 70.861.757.842		

Sumber: Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel (2023, 2024)

Adapun perbandingan struktur anggaran Belanja Langsung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.106. Perbandingan Struktur Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	2023		2024	
	Belanja	Jumlah (Rp)	Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Operasi	42.088.568.096	Belanja Operasi	64.073.684.392
2	Belanja Modal	1.392.828.700	Belanja Modal	4.179.197.450
	Total	43.481.396.796	Total	70.861.757.842

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan sub sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 secara umum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari realisasi dan capaian beberapa indikator kinerja utama yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka untuk mencapai terwujudnya misi dan visi yang telah ditetapkan selama 6 (enam) tahun melalui RENSTRA Tahun 2021 — 2026, maka diperlukan kesinambungan dan keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja antara lain :

1. Menyusun serta mengefektifkan Pohon Kinerja sebagai landasan dalam penyusunan dokumen kinerja untuk mencapai sinkronisasi antar jenjang/level pada dokumen kinerja.
2. Integrasi indikator kinerja sesuai dengan indikator di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki system pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam system pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala.
2. Melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap pertanggungjawaban kinerja pada masing-masing unit kerja di Dinas dan UPTD.
3. Meningkatkan kualitas reuiu atas laporan kinerja unit kerja di lingkup Dinas dan UPTD.

LAMPIRAN

Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Persiapan patroli terpadu bekerjasama dengan instansi terkait



Pembinaan keaktifan dan Sosialisasi Pokmaswas Perikanan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan



Temu Pokmaswas Perikanan Tingkat
Provinsi Tahun 2024

Keikutsertaan Kalsel dalam Diklat
Polsus WP3K di Pusat

Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum



Mediasi perselisihan pemanfaatan sumber daya kelautan
dan perikanan dengan melibatkan stakeholder terkait



Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perikanan
bagi pelaku pelaku usaha perikanan



Monitoring evaluasi dan konsolidasi data kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan

Sarana dan Prasarana Pengawasan



Penyerahan paket bantuan perahu bermotor bagi Pokmaswas Perikanan



Penyerahan hibah sarana kelengkapan pengawasan bagi Pokmaswas



Pemasangan papan seruan Stop Illegal Fishing dan Destructive Fishing

**Jumlah SDM Aparatur Aktif Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024**

No.	Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota/Satker Pusat	Jumlah SDM Aparatur Pengawasan Aktif (orang)		
		PPNS Perikanan	Polsus WP3K	Pengawas Perikanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	-	1	8
2.	Kotabaru	1	1	-
3.	Tanah Bumbu	-	-	2
4.	Tanah Laut	-	-	-
5.	Barito Kuala	-	-	1
6.	Banjar	-	-	1
7.	Banjarmasin	-	-	-
8.	Banjarbaru	-	-	1
9.	Tapin	-	-	-
10.	Hulu Sungai Selatan	-	-	-
11.	Hulu Sungai Tengah	1	-	2
12.	Hulu Sungai Utara	1	-	1
13.	Tabalong	-	-	1
14.	Balangan	1	-	2
15.	Satker PSDKP Banjarmasin	2	2	3
Jumlah		6	4	22
Jumlah total		32 orang		

Sumber: Bidang PSDKP (2024)

Data Penanganan Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO.	NAMA TERSANGKA	DUGAAN PELANGGARAN	DASAR/ASAL PROSES PENANGANAN PERKARA	WAKTU KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	PROSES PENANGANAN PELANGGARAN	DASAR HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN
1	RAHMAN Als IRAH Als Bin Alm. SALBANI	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan seperangkat alat Strum atau aliran listrik	Patroli lapangan 23 April 2024	01.00 WITA	Perairan Sungai Bangkal Desa Sungai Bangkal Kec. Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	Diproses oleh POLAIRUD POLDA Kalimantan Selatan, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel tanggal 25 April 2024	pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2	PT. CHEIJEDANG FEED KALIMANTAN	Melakukan pembelian tepung ikan (fish meal) 55 dari perusahaan di Semarang, namun dalam tepung ikan (fish meal) 55 tersebut terdapat kandungan lain berupa urea	Pengaduan masyarakat An. Muhammad Ivan dan Munawar Holil selaku perwakilan dari PT CJ Cheiljedang Feed Kalimantan tanggal 20 Maret 2024	-	PT. CHEIJEDANG FEED KALIMANTAN Jl. A. Yani Km. 48 Rt. 004 Rw. 002 Banyu Irang, Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	Diproses oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Kalimantan Selatan, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel tanggal 27 Mei 2024	pasal 120 ayat (1) atau ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3.	KM. PALAWALI 02 (An. PIRMAN, 23 GT/Jaring Insang Hanyut/Kapal Penangkap Ikan)	Kapal melakukan aktifitas perikanan tanpa di lengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Standar Laik Operasi (SLO)	Berita Acara Pemeriksaan Kepala Pelabuhan Perikanan Kotabaru Nomor 0236-Kesyah/PP-KTB/2024 Tanggal 18 Juli 2024	Tanggal 17 Juli 2024	Saat lakukan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Kotabaru	Diproses oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Kotabaru dan Satwas SDKP Kotabaru	(1) Zoom Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tanggal 20 Juli 2024; (2) Pemberian Surat Peringatan I dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Juli 2024
4.	KM. BUNGA MUDA 2 (An. ARDIANSYAH, 18 GT/Jaring Insang Hanyut/Kapal Penangkap Ikan)	(1) Kapal melakukan aktifitas perikanan tanpa di lengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Standar Laik Operasi (SLO) terbaru; (2) Dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) telah habis masa berlakunya; (3) Sertifikat Kelaikan Kapal Penangkap Ikan (SKKP) telah habis masa berlakunya	Berita Acara Pemeriksaan Kepala Pelabuhan Perikanan Kotabaru Nomor 0237-Kesyah/PP-KTB/2024 Tanggal 18 Juli 2024	Tanggal 17 Juli 2024	Saat lakukan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Kotabaru	Diproses oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Kotabaru dan Satwas SDKP Kotabaru	(1) Zoom Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tanggal 20 Juli 2024; (2) Pemberian Surat Peringatan I dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Juli 2024
5.	KM. REJEKI BERSAMA 03 (An. KUDDU, Penangkap Ikan)	(1) Kapal melakukan aktifitas perikanan tanpa di lengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Standar Laik Operasi (SLO) terbaru; (2) Kapal Berlayar dan melakukan aktifitas perikanan tanpa dilengkapi dokumen kapal perikanan dan dokumen perizinan kapal penangkap ikan (SIUP dan SIPI)	Berita Acara Pemeriksaan Kepala Pelabuhan Perikanan Kotabaru Nomor 0238-Kesyah/PP-KTB/2024 Tanggal 18 Juli 2024	Tanggal 17 Juli 2024	Saat lakukan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Kotabaru	Diproses oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Kotabaru dan Satwas SDKP Kotabaru	(1) Zoom Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tanggal 20 Juli 2024; (2) Pemberian Surat Peringatan I dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

NO.	NAMA TERSANGKA	DUGAAN PELANGGARAN	DASAR/ASAL PROSES PENANGANAN PERKARA	WAKTU KEJADIAN	LOKASI KEJADIAN	PROSES PENANGANAN PELANGGARAN	DASAR HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN
							Selatan tanggal 22 Juli 2024
6.	SYAFF'E alias F'I Bin MUHAMMAD SANUSI	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan setrum listrik	Adanya laporan dari masyarakat perihal adanya prang yang menangkap ikan menggunakan setrum ikan, kemudian anggota piket dari Polres Hulu Sungai Utara mengamankan tersangka	04 Agustus 2024	Perairan Sungai Nagara Desa Murung Panti Kecamatan Babink Kabupaten Hulu Sungai Utara	Diproses oleh Polres Hulu Sungai Utara, bekerjasama dengan PPNS Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten HSU untuk menjadi saksi ahli	pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
7.	JOHAN	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan setrum listrik	Tertangkap tangan sedang menangkap ikan dengan setrum di Sungai Nagara oleh Polres Hulu Sungai Utara	11 Agustus 2024	Perairan Sungai Nagara Desa Teluk Mesjid RT. 02 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Diproses oleh Polres Hulu Sungai Utara, bekerjasama dengan PPNS Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten HSU untuk menjadi saksi ahli	pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
8.	NASRULLAH Als EMON Bin JARHANI (Alm)	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ikan	Patroli lapangan 23 April 2024	04.00 WITA	Perairan Sungai Martapura Desa Murung Kenanga Kec. Martapura Kabupaten Banjar	Diproses oleh POLAIRUD POLDA Kalimantan Selatan, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel tanggal 23 Agustus 2024	pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9.	AHMAD RIFANI Als AMAD Bin Alm. MAJMUNI	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ikan	Patroli lapangan 10 November 2024	22.00 WITA	Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar (Perairan Sungai Martapura)	Diproses oleh POLAIRUD POLDA Kalimantan Selatan, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan tanggal 13 November 2024	pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
10.	KM. HARTA YUDA (An. MURSALIM, 24 GT/Pukat Cincin Pelagis Kecil/Kapal Penangkap Ikan) (Sulawesi Selatan)	Kapal melakukan aktifitas perikanan tanpa di lengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Standar Laik Operasi (SLO)	Berita Acara Serah Terima Dokumen Kapal Motor Harta Yuda Nomor 000.1.2.3/1064/P2SDKP/Dislutkan/2024 tanggal 11 November 2024	05 November 2024	Perairan Kotabaru	Diproses oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Kotabaru	(1) Zoom Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tanggal 18 November 2024; (2) Pemberian Surat Peringatan I dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 18 November 2024
11.	KM. ARJUNA INDAH 05 (An. BASRI, 29 GT/Pukat Cincin Pelagis Kecil/Kapal Penangkap Ikan) (Sulawesi Selatan)	Kapal melakukan aktifitas perikanan tanpa di lengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Standar Laik Operasi (SLO)	Berita Acara Serah Terima Dokumen Kapal Motor Harta Yuda Nomor 000.1.2.3/1065/P2SDKP/Dislutkan/2024 tanggal 11 November 2024	05 November 2024	Perairan Kotabaru	Diproses oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Kotabaru	(1) Zoom Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tanggal 18 November 2024; (2) Pemberian Surat Peringatan I dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 18 November 2024
12.	KM. NORLINA IIA (Nahkoda MASARIL, 13 GT, Penangkap Ikan/Jaring Tarik Berkantong	Kapal melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan Lampara Ikan, serta melakukan aktifitas perikanan tanpa di lengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Standar Laik Operasi (SLO), Tidak memiliki SIPI,	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Komandan Kapal Pengawas KP. HIU 07 Nomor 648/Sta.5-HIU.07/PW.413/ PeriodeVI/2024 tanggal 13 November 2024	13 November 2024	Perairan Kotabaru pada posisi 03°53,514' S - 115°56,176'E	Diproses oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Pelabuhan Perikanan Kotabaru dan Satwas SDKP Kotabaru	(1) Zoom Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tanggal 18 November 2024; (2) Pemberian Surat Peringatan I dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 18 November 2024

Sumber: Bidang PSDKP (2024)

Data Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan (orang)			Jumlah (orang)	Jumlah Pelaku Usaha yang Kepatuhan (orang)			% Kepatuhan sd. 2024
		Nelayan	Pembudidaya	P2HP		Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)*100	(10)=(8)/(6)*100
1	Kotabaru	13.066	1.702	483	15.251	2.420	2.420	100,00	15,87
2	Tanah Bumbu	5.126	2.728	482	8.336	1.104	1.104	100,00	13,24
3	Tanah Laut	5.712	1.473	225	7.410	715	715	100,00	9,65
4	Barito Kuala	2.523	2.071	76	4.670	179	179	100,00	3,83
5	Banjar	1.740	2.163	219	4.122	730	730	100,00	17,71
6	Banjarmasin	287	1.165	586	2.038	157	157	100,00	7,70
7	Banjarbaru	107	544	174	825	209	209	100,00	25,33
8	Tapin	1.338	825	7	2.170	151	151	100,00	6,96
9	HSS	2.052	5.874	140	8.066	81	81	100,00	1,00
10	HST	1.430	1.669	309	3.408	198	198	100,00	5,81
11	HSU	18.542	1.687	90	20.319	68	68	100,00	0,33
12	Tabalong	649	2.097	201	2.947	41	41	100,00	3,94
13	Balangan	4.131	1.457	51	5.639	181	181	100,00	3,21
Kalimantan Selatan		56.703	25.445	3.043	85.201	6.234	6.234	100,00	7,32

Keterangan: Angka sementara

Sumber: Data terolah Bidang PSDKP (2024)

**Data Belanja Hibah yang Diserahkan
kepada POKMASWAS Perikanan Tahun 2024**

NO	PENERIMA HIBAH	TAHUN
1.	Pengadaan Perahu Bermotor	
	1. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sungai Danau Lestari	2024
	2. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Abulung Kab. Banjar	2024
	3. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pulau Jaya Kab. Banjar	2024
	4. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Harapan Masa Kab. HSU	2024
	5. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Harapan Usaha Kab. HSU	2024
	6. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Bina Bersama	2024
2.	Perlengkapan Pokmaswas	
	1. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Bina Bersama muara asam-asam Tanah Laut	2024
	2. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Besamaan Kab. HSS	2024
	3. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Harapan Usaha Kab. HSU	2024
	4. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sadar Karya Kab. HST	2024
	5. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Bina Bersama Desa Tabat RT. 04 Kec. Labuhan amas Utara Kab. HST	2024
	6. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Buser Desa Tanjung Harapan Kec. Alalak Barito Kuala	2024
	7. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Harapan Massa Desa Sungai Durait Tengah Kec. Babirik Kab. HSU	2024
	8. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kerayau Lestari Desa Liyu Kec. Halong Kab. Balangan	2024
	9. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perkasa Desa Balimau Kec. Kalumpang Kab. HSS	2024
	10. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sadar Bersama Desa Jejangkit Muara, Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala	2024
	11. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Udang Lestari Jl. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	2024
3.	Penerima dan Pemasangan Papan Seruan	
	1. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Bina Bersama muara asam-asam tala	2024
	2. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Besamaan Kab. HSS	2024
	3. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Harapan Usaha Kab. HSU	2024
	4. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sadar Karya Kab. HST	2024

5.	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Bina Bersama Desa Tabat RT. 04 Kec. Labuhan amas Utara Kab. HST	2024
6.	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Buser Desa Tanjung Harapan Kec. Alalak Barito Kuala	2024
7.	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Harapan Massa Desa Sungai Durait Tengah Kec. Babirik Kab. HSU	2024
8.	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kerayau Lestari Desa Liyu Kec. Halong Kab. Balangan	2024
9.	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perkasa Desa Balimau Kec. Kalumpang Kab. HSS	2024
10.	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sadar Bersama Desa Jejangkit Muara, Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala	2024
11.	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Udang Lestari Jl. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	2024